

2025



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO**

DPUPR | Jl. Raden Wijaya No. 60 Mojokerto – Jawa Timur



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Raden Wijaya Nomor 60, Kranggan, Mojokerto, Jawa Timur 61321

Telepon/ faksimile: (0321) 321958

Laman: <https://dpupr.mojokertokab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 188.45/13/KEP/416-103/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/254/416-012/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- merencanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029;
 - melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029; dan
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 04 Maret 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,



RINALDI RIZAL SABIRIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/13/KEP/416-103/2025
TANGGAL 04 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2025-2029**

NO.	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA
1.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
3.	Anggota	1. Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto 2. Fungsional Perencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto 3. Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto 4. Kasubag Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto 5. Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,


RINALD RIZAL SABIRIN



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Raden Wijaya Nomor 60, Kranggan, Mojokerto, Jawa Timur 61321

Telepon/ faksimile: (0321) 321958

Laman: <https://dpupr.mojokertokab.go.id/>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 188.45/48/KEP/416-103/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 19. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan serta rencana program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode 5 tahun, yang disusun berpedoman kepada RPJMD 2025 - 2029 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Arah Kebijakan

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
- 4.2 Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Daerah Kabupaten Mojokerto
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V : PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

LAMPIRAN

KETIGA : Uraian Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 16 September 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,



DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan Renstra	11
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis	
Perangkat Daerah	13
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.1.1 Peran, Tugas, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.....	15
2.1.2 Sumber Daya yang Dimiliki Dinas PUPR	25
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.....	34
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.....	68
2.1.5 Mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Mojokerto dalam Pemberian Pelayanan	72
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.....	74
2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.....	74
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	76
2.2.1 Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.....	77
2.2.2 Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto	82
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	89
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	90
3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah	90
3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah	96
3.2 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	106
3.3 Arah Kebijakan.....	110
BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	117
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.....	118

4.2 Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Daerah Kabupaten Mojokerto	204
4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	212
4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	220
BAB V Penutup	224
5.1. Kesimpulan	224
5.2. Kaidah Pelaksanaan	225
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	226
LAMPIRAN	
1. Pohon Kinerja DPUPR Kab. Mojokerto	
2. Cascading Kinerja DPUPR Kab. Mojokerto	

BAB I

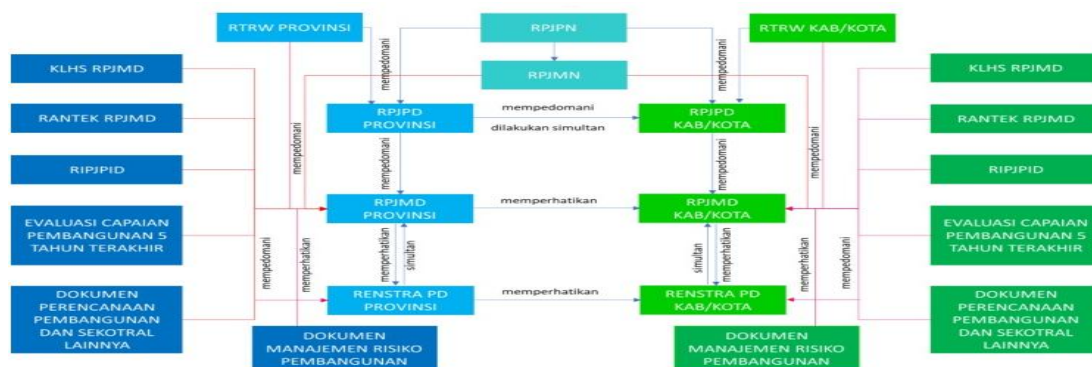
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan instrumen penting dalam sistem perencanaan nasional, yang berfungsi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan lima tahunan di lingkungan perangkat daerah.

Dalam penyusunannya, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan pusat dan daerah, sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, serta penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Inmendagri tersebut mengamanatkan agar setiap perangkat daerah menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur, menyusun indikator kinerja utama, serta memastikan capaian program prioritas nasional dan daerah dalam dokumen Renstra PD.

Hubungan antar dokumen



Sumber : Inmendagri 2/2025

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 ini juga disusun dengan memperhatikan kerangka pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam dokumen visi Indonesia Emas 2045, yang dijabarkan melalui empat hal penting:

1. Nawacita yang Menekankan pembangunan dari pinggiran, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan konektivitas antarwilayah.
2. Astacita yaitu Delapan agenda strategis nasional, antara lain ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta pemerataan infrastruktur yang berkeadilan.
3. Nawa Bhakti Satya yaitu Sembilan prioritas pembangunan Jawa Timur, meliputi pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu kesehatan, tata kelola pemerintahan, ketentraman masyarakat serta pelestarian lingkungan.
4. Catur Abhypraya merupakan Empat pilar pembangunan Kabupaten Mojokerto, yaitu ekonomi berdaya saing, SDM dan kesejahteraan sosial, tata kelola pemerintahan, serta infrastruktur dan lingkungan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari ketiga kerangka kebijakan nasional dan regional tersebut. Infrastruktur yang baik bukan hanya mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah, namun juga menjadi pondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mengelola pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, drainase, air limbah, bangunan gedung, serta penataan ruang wilayah.

Oleh karena itu, penyusunan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto 2025–2029 bertujuan untuk menyediakan arah pembangunan lima tahunan yang selaras dengan prioritas nasional dan daerah, serta merespon isu-isu

strategis lokal seperti peningkatan infrastruktur wilayah perdesaan, penguatan daya tahan terhadap perubahan iklim, serta tata ruang yang berkelanjutan. Renstra ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) setiap tahunnya, serta menjadi dasar dalam pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas publik di sektor infrastruktur.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah, yang meliputi:

1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Sistem Drainase Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2014 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Bendung;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Irigasi;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman

Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah;

36. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Persetujuan Substansi RTRW dan RDTR;
37. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Basis Data dan Penyajian Peta RTRW/RDTR;
38. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan;
40. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 jo. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029;
49. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto;
50. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan arah dan pedoman strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan Arah RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Instansional

Penyusunan renstra ini bertujuan untuk memastikan bahwa arahan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dapat diterjemahkan ke dalam rencana yang lebih spesifik untuk setiap

instansi. Hal ini penting agar tujuan jangka panjang pemerintah daerah tercapai dengan lebih terukur dan terarah.

b. Menjabarkan Permasalahan dalam Rangka Pelayanan dan Isu-Isu Strategis ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja Operasional serta Kegiatan Indikatif OPD

Renstra ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelayanan publik serta isu-isu strategis yang relevan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Permasalahan dan isu-isu strategis ini akan dijabarkan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja operasional yang lebih terperinci, serta kegiatan indikatif yang harus dilakukan oleh OPD untuk mencapainya.

c. Menyediakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan

Renstra ini juga bertujuan untuk menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahun, program-program yang dilaksanakan tetap relevan dan terfokus pada prioritas pembangunan daerah.

d. Menentukan Strategi untuk Pengelolaan Keberhasilan, Penguatan Komitmen yang Berorientasi pada Masa Depan, Adaptif terhadap Perubahan Lingkungan Strategis, Peningkatan Produktivitas serta Menjamin Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Organisasi

Salah satu tujuan utama dari penyusunan reviu ini adalah untuk merumuskan strategi-strategi yang dapat mendukung pengelolaan keberhasilan yang berkelanjutan. Strategi tersebut harus

berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, dan berfokus pada peningkatan produktivitas serta efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Dengan demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dapat meningkatkan kinerja secara optimal dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra.

2. **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Memuat gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah, yang mencakup uraian mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya yang dimiliki; kinerja pelayanan termasuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); serta kelompok sasaran layanan. Selain itu, dapat disertakan informasi tambahan seperti mitra dalam pemberian layanan, dukungan BUMD, dan bentuk kerja sama daerah jika relevan. Subbab selanjutnya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan serta isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah.

3. **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**

Memuat komponen-komponen perencanaan kinerja jangka menengah yang meliputi: (1) Tujuan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai selama periode lima tahun; (2) Sasaran Renstra yang merupakan penjabaran lebih spesifik dan terukur dari tujuan; (3) Strategi yang menggambarkan pendekatan

umum perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut; serta (4) Arah kebijakan sebagai pedoman operasional yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan selama periode perencanaan. Bab ini menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja yang selaras dengan visi, misi, dan agenda pembangunan Kepala Daerah serta RPJMD.

4. **Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan**

Memuat uraian rinci mengenai penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Bab ini mencakup: (1) uraian program yang mencerminkan upaya strategis dalam mencapai tujuan pembangunan; (2) uraian kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan program; dan (3) uraian subkegiatan secara lebih operasional, lengkap dengan indikator kinerja, target capaian, serta pagu indikatif anggaran. Selain itu, bab ini juga memuat (4) target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta (5) target kinerja urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bagian dari akuntabilitas dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2025–2029.

5. **Bab V Penutup**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran vital dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas PUPR mengemban kewenangan pada urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar yang berdampak luas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan berbagai layanan publik yang strategis dan berdampak langsung terhadap masyarakat, meliputi:

1. **Pelayanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**, berupa pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi infrastruktur jalan kabupaten dan jembatan sebagai penunjang konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar dan kegiatan ekonomi.
2. **Pelayanan Sumber Daya Air dan Irigasi**, yang mencakup pengelolaan jaringan irigasi kewenangan kabupaten guna mendukung sektor pertanian, pengendalian banjir, serta konservasi sumber daya air sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan adaptasi perubahan iklim.
3. **Pelayanan Penyehatan Lingkungan Permukiman**, meliputi penyediaan dan pengelolaan sistem drainase, sarana air minum (SPAM), pengolahan air limbah domestik, serta penyediaan sarana dan prasarana persampahan seperti TPS3R. Pelayanan ini ditujukan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.

4. **Pelayanan Penataan Bangunan dan Gedung**, mencakup fasilitasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pengawasan teknis bangunan, serta penataan bangunan gedung pemerintah agar sesuai dengan standar keselamatan, kenyamanan, dan estetika kota.
5. **Pelayanan Jasa Konstruksi**, berupa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa konstruksi lokal, fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi, serta pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi sesuai amanat regulasi nasional. Layanan ini mendorong peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.
6. **Pelayanan Penataan Ruang**, yang meliputi penyusunan dan revisi RTRW dan RDTR, pemberian rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengendalian pemanfaatan ruang, serta penyediaan informasi spasial. Pelayanan ini penting untuk menjamin kesesuaian pembangunan dengan arah tata ruang yang legal, aman, dan berkelanjutan.

Seluruh layanan tersebut dijalankan secara terpadu oleh struktur organisasi Dinas PUPR yang terdiri dari sekretariat, enam bidang teknis, dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) wilayah. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto juga melakukan transformasi tata kelola melalui penerapan teknologi informasi, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM), pengembangan inovasi pelayanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Gambaran pelayanan ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR bukan hanya sebagai pelaksana program fisik semata, melainkan juga sebagai penggerak pembangunan wilayah dan fasilitator kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan infrastruktur yang terencana, berkualitas, dan berorientasi jangka panjang.

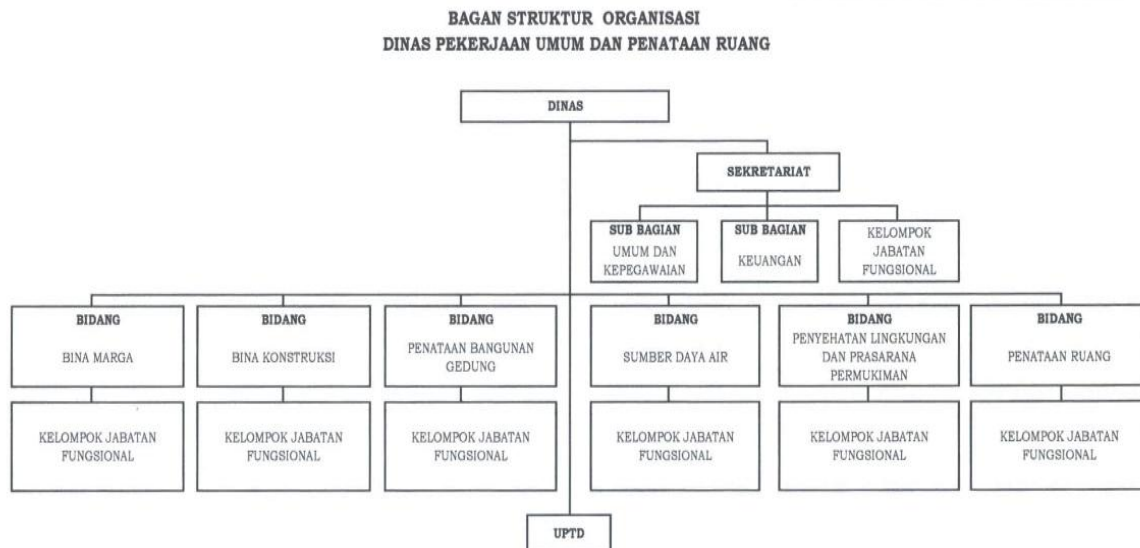
2.1.1 Peran, Tugas, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto (Dinas PUPR) memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor di Kabupaten Mojokerto. Tugas utama Dinas PUPR adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Bina Marga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Bina Konstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Penataan Bangunan Gedung membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terdiri atas :
 - 1. UPTD

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas.

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi Sekretariat :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi :

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;

- e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- d. Menyusun laporan keuangan;
- e. Menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang keuangan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Bina Marga.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan teknis, pengelolaan data jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan serta pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan.

Fungsi Bidang Bina Marga

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Marga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengelola, memperbarui, dan menyimpan data penyelenggaraan jalan.

- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian dalam penyelenggaraan jalan, termasuk penanggulangan dampak bencana alam.
 - c. Melakukan penelitian dan pengkajian terkait tanah, bahan, serta kualitas hasil pekerjaan di bidang penyelenggaraan jalan.
 - d. Melaksanakan analisis pekerjaan di sektor penyelenggaraan jalan.
 - e. Melakukan koordinasi serta kerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
 - f. Merumuskan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, serta pengujian.
 - g. Melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan serta jembatan.
 - h. Melaksanakan evaluasi serta penetapan fungsi, audit keselamatan jalan, dan jembatan.
 - i. Mengawasi dan mengendalikan fungsi jalan, pemanfaatan peruntukan jalan kabupaten, serta prasarana yang menyertainya.
 - j. Melaksanakan pembinaan serta memberikan rekomendasi teknis terkait pemanfaatan jalan kabupaten.
 - k. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan.
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Bina Konstruksi.

Bidang Bina Konstruksi bertugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan sebagian fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, serta pengawasan jasa konstruksi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Konstruksi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan melalui skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.
 - b. Mengembangkan serta meningkatkan tenaga terampil konstruksi.
 - c. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi di tingkat daerah.
 - d. Melaksanakan kebijakan pembinaan serta memberikan rekomendasi teknis izin usaha jasa konstruksi.
 - e. Menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, serta penyuluhan bagi usaha jasa konstruksi.
 - f. Melakukan pengawasan terhadap usaha, penyelenggaraan, dan pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah kabupaten.
 - g. Melaksanakan kebijakan pembinaan serta menyebarluaskan peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi.
 - h. Mengembangkan, membina, serta meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi dan asosiasi di wilayah kabupaten.
 - i. Meningkatkan kemampuan teknologi penggunaan serta nilai tambah jasa produk konstruksi dalam negeri di wilayah kabupaten.
 - j. Mendorong peningkatan pangsa pasar jasa konstruksi dalam negeri di wilayah kabupaten.
 - k. Melakukan evaluasi serta menyusun laporan terkait jasa konstruksi.
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Penataan Bangunan Gedung
- Bidang Penataan Bangunan Gedung bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang meliputi perencanaan dan pembangunan gedung, penataan bangunan gedung, serta pengawasan bangunan gedung.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Bangunan Gedung memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan rencana penataan bangunan gedung.
- b. Melaksanakan teknis pembangunan dan penataan bangunan gedung.
- c. Merumuskan peraturan daerah terkait bangunan gedung sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria nasional.
- d. Melaksanakan penelitian serta pembinaan pembangunan gedung.
- e. Menyelenggarakan infrastruktur di kawasan strategis.
- f. Menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis.
- g. Melaksanakan penataan bangunan di kawasan strategis.
- h. Melaksanakan evaluasi serta menyusun laporan.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang mencakup perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan rencana pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air.
- b. Melaksanakan konstruksi, pengawasan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, serta rehabilitasi sumber daya air.
- c. Melaksanakan pengendalian daya rusak air.
- d. Menyelenggarakan operasional, pemeliharaan, dan penyuluhan sumber daya air.
- e. Mengelola aset sumber daya air.

- f. Melaksanakan pemantauan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan atau penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air.
 - g. Melaksanakan evaluasi serta menyusun laporan.
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman.
- Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tugas ini mencakup pengelolaan serta pengembangan sistem drainase, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, serta pengelolaan dan pengembangan sanitasi.
- Dalam menjalankan tugasnya, bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Merumuskan perencanaan teknis, pembangunan, perbaikan, serta peremajaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman.
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap prasarana dan sarana lingkungan permukiman.
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan, perbaikan, serta peremajaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman.
 - d. Mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung dengan sungai.
 - e. Melaksanakan penataan lingkungan di kawasan strategis.
 - f. Merumuskan rencana, kebijakan, strategi, serta teknik sanitasi dan air minum.
 - g. Mengelola serta mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
 - h. Mengembangkan sistem serta pengelolaan persampahan regional.

- i. Melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, serta rehabilitasi sistem sanitasi dan air minum.
- j. Mengelola serta mengembangkan sistem air limbah domestik.
- k. Melaksanakan evaluasi serta menyusun laporan.
- l. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Bidang Penataan Ruang.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pengaturan dan pembinaan, pelaksanaan penataan ruang serta pengawasan dan pengendalian penataan ruang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- b. Melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang.
- d. Merumuskan dan menetapkan ketentuan arah peraturan zonasi.
- e. Merumuskan dan menetapkan perangkat insentif serta disinsentif, serta melaksanakan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang.
- f. Merumuskan dan menetapkan ketentuan pemberian rekomendasi teknis izin pemanfaatan ruang.
- g. Merumuskan dan menetapkan ketentuan sanksi administratif, serta melaksanakan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang.
- h. Melaksanakan penyidikan dan penerbitan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penerbitan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
 - j. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang.
 - k. Melaksanakan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang.
 - l. Merumuskan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengaturan penataan ruang.
 - m. Merumuskan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang.
 - n. Merumuskan bahan dan melaksanakan pemanfaatan ruang.
 - o. Merumuskan bahan dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang.
 - p. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan.
 - q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
9. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Kelompok jabatan fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahilannya. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dapat dibentuk sub koordinator.

2.1.2 Sumber Daya yang Dimiliki Dinas PUPR

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip - prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparan, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa akan datang. Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto memiliki tenaga kerja yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS), teknis yang berkompeten di bidang pembangunan infrastruktur dan penataan ruang serta Tenaga Non ASN yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Keberadaan SDM yang berkualitas menjadi kunci dalam merancang, melaksanakan, serta mengawasi berbagai proyek pembangunan yang ada. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintahan Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut diatas, jumlah pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Mojokerto berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Tahun 2024 berjumlah 441 orang yang terdiri atas 183 ASN dan 258 Non ASN, dengan penempatan sebagai tabel berikut:

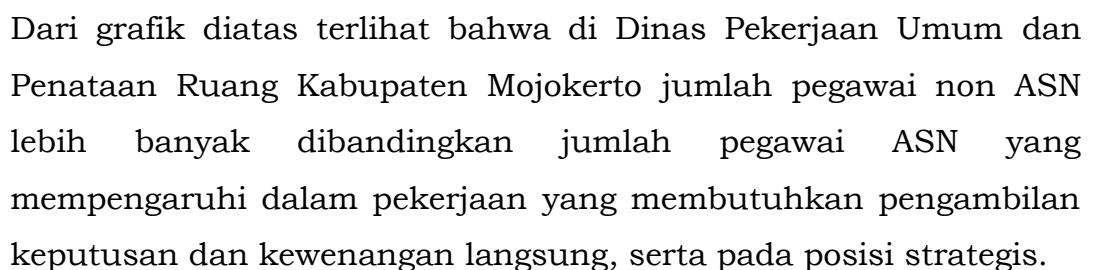
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PNS dan Non ASN

Uraian	PNS				Jumlah	Non PNS	Jumlah Total
	Golongan						
	IV	III	II	I			
Kepala Dinas	1				1		1
Sekretariat	1	6	8		15	48	63
Bidang Bina Marga	1	32	51	1	85	126	211
Bidang Bina Konstruksi	1	4	1		6	1	7
Bidang Penataan Bangunan Gedung	1	10			11	12	23
Bidang Sumber Daya Air		7	5		12	10	22
Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman	1	6	3		10	6	16
Bidang Penataan Ruang	1	4	1		6	5	11
UPTD Pengelolaan Jalan Dan Sumber Daya Air Wilayah Sumengko		3	4		7	10	17
UPTD Pengelolaan Jalan Dan Sumber Daya Air Wilayah Pandan		4	6		10	10	20
UPTD Pengelolaan Jalan Dan Sumber Daya Air Wilayah Gedeg		2	1		3	10	13
UPTD Pengelolaan Jalan Dan Sumber Daya Air Wilayah Pugeran		4	4		8	10	18
UPTD Pengelolaan Jalan Dan Sumber Daya Air Wilayah Bangsal		5	4		9	10	19
Jumlah Sumber Daya Manusia	7	87	88	1	183	258	441

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Dinas PUPR

Kapasitas dan kapabilitas pegawai erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas, tingkat Pendidikan pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum

Grafik Sumber Daya Manusia



Dinas PUPR memiliki berbagai fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas, seperti alat berat, kendaraan dinas, dan fasilitas kantor yang mendukung operasional harian.

Berikut kami sajikan rekapitulasi fasilitas serta peralatan yang dimanfaatkan oleh Dinas PUPR Kab. Mojokerto dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya :

Tabel 1.2 Fasilitas dan Peralatan Dinas PUPR

No	Kode Barang	Nama Barang	Kelompok Barang	Jumlah
1	1.3.2.01.01.03.002	Wheel Excavator + Attachment	ALAT BESAR DARAT/EXCAVATOR	1,00
2	1.3.2.01.01.03.003	Crawler Excavator	ALAT BESAR DARAT/PILE DRIVER	21,00
3	1.3.2.01.01.07.008	Stamper	ALAT BESAR DARAT/COMPACTING EQUIPMENT	4,00
4	1.3.2.01.01.08.010	Concrete Cutter	ALAT BESAR DARAT/AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	1,00
5	1.3.2.01.01.08.012	Concrete Vibrator	ALAT BESAR DARAT/AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	1,00
6	1.3.2.01.01.08.013	Concrete Breaker	ALAT BESAR DARAT/AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	2,00
7	1.3.2.01.01.09.007	Macadam Roller/Three Wheel Roller	ALAT BESAR DARAT/ALAT PENGANGKAT	32,00
8	1.3.2.01.03.05.009	Pompa Bensin/Minyak Transportable	ALAT BANTU/POMPA	4,00
9	1.3.2.01.03.05.010	Pompa Air	ALAT BANTU/POMPA	4,00
10	1.3.2.01.03.05.013	Mesin Grease Pump	ALAT BANTU/POMPA	8,00
11	1.3.2.01.03.16.001	Molen	ALAT BANTU/ALAT BANTU LAINNYA	27,00
12	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR/KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	1,00
13	1.3.2.02.01.02.005	Station Wagon	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR/KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	9,00
14	1.3.2.02.01.03.007	Pick Up	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR/KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	25,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Kelompok Barang	Jumlah
15	1.3.2.02.01.04.006	Sepeda Motor	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR/KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	120,00
16	1.3.2.02.01.06.110	Mobil	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR/KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	10,00
17	1.3.2.03.01.02.001	Mesin Gerinda Tangan	ALAT BENGKEL BERMESIN/PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	4,00
18	1.3.2.03.01.04.009	Lubricating Set (Perkakas Bengkel Service)	ALAT BENGKEL BERMESIN/PERKAKAS BENGKEL SERVICE	2,00
19	1.3.2.03.01.04.013	Dongkrak Mekanik	ALAT BENGKEL BERMESIN/PERKAKAS BENGKEL SERVICE	11,00
20	1.3.2.03.01.06.012	Gergaji Mesin	ALAT BENGKEL BERMESIN/PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	10,00
21	1.3.2.03.01.08.004	Travo Las Mma Inverter 200 A	ALAT BENGKEL BERMESIN/PERKAKAS PABRIK ES	5,00
22	1.3.2.03.02.05.032	Tang Kombinasi	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN/PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	36,00
23	1.3.2.03.02.07.001	Gergaji	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN/PERKAKAS BENGKEL KERJA	4,00
24	1.3.2.03.02.07.003	Mesin Bor	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN/PERKAKAS BENGKEL KERJA	1,00
25	1.3.2.03.02.07.009	Mesin Pemotong Rumput	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN/PERALATAN TUKANG BESI	6,00
26	1.3.2.03.02.11.003	Meteran Dorong	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN/PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	17,00
27	1.3.2.03.03.01.032	Meteran Gelinding	ALAT UKUR/ALAT UKUR UNIVERSAL	4,00
28	1.3.2.03.03.01.072	Gps	ALAT UKUR/ALAT UKUR UNIVERSAL	3,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Kelompok Barang	Jumlah
29	1.3.2.03.03.04.014	Thermogun	ALAT UKUR/ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	1,00
30	1.3.2.03.03.09.018	Global Positioning System	ALAT UKUR/ALAT UKUR LAIN-LAIN	63,00
31	1.3.2.03.03.10.037	Timbangan Digital	ALAT UKUR/ALAT TIMBANGAN/BIARA	1,00
32	1.3.2.04.01.01.003	Pacul	ALAT PENGOLAHAN/ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	70,00
33	1.3.2.04.01.01.013	Gerobak Sorong	ALAT PENGOLAHAN/ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	20,00
34	1.3.2.04.01.02.009	Mesin Pemotong Rumput	ALAT PENGOLAHAN/ALAT PANEN	399,00
35	1.3.2.04.01.09.022	Chain Saw	ALAT PENGOLAHAN/ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	27,00
36	1.3.2.05.01.04.029	Filling Besi/Metal	ALAT KANTOR/ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	13,00
37	1.3.2.05.01.05.002	Cctv - Camera Control Television System	ALAT KANTOR/ALAT KANTOR LAINNYA	1,00
38	1.3.2.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	ALAT KANTOR/ALAT KANTOR LAINNYA	2,00
39	1.3.2.05.01.05.043	Lcd Projector	ALAT KANTOR/ALAT KANTOR LAINNYA	6,00
40	1.3.2.05.01.05.053	Focusing Screen/Layar Lcd Projector	ALAT KANTOR/ALAT KANTOR LAINNYA	2,00
41	1.3.2.05.01.05.088	Tv, Ac, Mesin Fotocopy Dll	ALAT KANTOR/ALAT KANTOR LAINNYA	229,00
42	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Kerja	ALAT RUMAH TANGGA/MEUBELAIR	20,00
43	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Rapat	ALAT RUMAH TANGGA/MEUBELAIR	55,00
44	1.3.2.05.02.01.048	Sofa	ALAT RUMAH TANGGA/MEUBELAIR	1,00
45	1.3.2.05.02.01.050	Rak Kecil	ALAT RUMAH TANGGA/MEUBELAIR	257,00
46	1.3.2.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	ALAT RUMAH TANGGA/ALAT PEBERSIH	46,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Kelompok Barang	Jumlah
47	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	ALAT RUMAH TANGGA/ALAT PENDINGIN	16,00
48	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	ALAT RUMAH TANGGA/ALAT PENDINGIN	4,00
49	1.3.2.05.02.04.015	Kulkas Kecil	ALAT RUMAH TANGGA/ALAT PENDINGIN	3,00
50	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	ALAT RUMAH TANGGA/ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	1,00
51	1.3.2.05.02.06.007	Loudspeaker	ALAT RUMAH TANGGA/ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	3,00
52	1.3.2.05.02.06.014	Microphone	ALAT RUMAH TANGGA/ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	1,00
53	1.3.2.05.02.06.059	Gordyin/ Kray	ALAT RUMAH TANGGA/ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	1,00
54	1.3.2.05.02.06.077	Tool Kit Set	ALAT RUMAH TANGGA/ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	101,00
55	1.3.2.05.02.07.017	Alat Pemadam Kebakaran (Apar)	ALAT RUMAH TANGGA/ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5,00
56	1.3.2.05.03.01.009	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT/MEJA RAPAT PEJABAT	65,00
57	1.3.2.05.03.02.014	Meja Rapat	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT/MEJA RAPAT PEJABAT	7,00
58	1.3.2.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon Ii	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT/KURSI KERJA PEJABAT	1,00
59	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT/KURSI KERJA PEJABAT	2,00
60	1.3.2.05.03.03.009	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT/KURSI RAPAT PEJABAT	41,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Kelompok Barang	Jumlah
61	1.3.2.05.03.04.008	Kursi Rapat	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT/KURSI RAPAT PEJABAT	50,00
62	1.3.2.06.01.01.096	Camera Digital	ALAT STUDIO/PERALATAN STUDIO AUDIO	76,00
63	1.3.2.06.01.02.003	Camera Electronic	ALAT STUDIO/PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	1,00
64	1.3.2.06.01.02.105	Peralatan Studio Visual	ALAT STUDIO/PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	1,00
65	1.3.2.06.01.05.038	Meteran Laser Compact	ALAT STUDIO/PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	2,00
66	1.3.2.06.01.05.047	Kamera Udara (Drone)	ALAT STUDIO/PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	2,00
67	1.3.2.06.01.05.053	Drone	ALAT STUDIO/PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	1,00
68	1.3.2.06.02.01.004	Telephone Mobile	ALAT KOMUNIKASI/ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	2,00
69	1.3.2.06.02.01.022	Intermediate Telephone/Key Telephone	ALAT KOMUNIKASI/ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	14,00
70	1.3.2.06.02.03.005	Handy Talky/Walky Talky (Ht)	ALAT KOMUNIKASI/ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	20,00
71	1.3.2.06.02.05.004	Antene Uhf Transportable	ALAT KOMUNIKASI/ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	1,00
72	1.3.2.06.02.06.007	Facsimile	ALAT KOMUNIKASI/ALAT-ALAT SANDI	3,00
73	1.3.2.08.01.04.001	Alat Laboratorium Model/Hidrolika - Cbr Laboratorium	UNIT ALAT LABORATORIUM/ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	1,00
74	1.3.2.08.01.06.003	Core Drilling Machine	UNIT ALAT LABORATORIUM/ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	2,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Kelompok Barang	Jumlah
75	1.3.2.08.01.06.012	Test Press/Strenght Test	UNIT ALAT LABORATORIUM/ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	1,00
76	1.3.2.08.01.06.038	Mesin Molen	UNIT ALAT LABORATORIUM/ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	3,00
77	1.3.2.08.01.06.089	Kompore Listrik	UNIT ALAT LABORATORIUM/ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	2,00
78	1.3.2.08.01.06.999	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi Lainnya	UNIT ALAT LABORATORIUM/ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	1,00
79	1.3.2.08.01.10.113	Drying Oven	UNIT ALAT LABORATORIUM/ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	1,00
80	1.3.2.08.01.13.122	Timbangan Digital	UNIT ALAT LABORATORIUM/ALAT LABORATORIUM KIMIA	1,00
81	1.3.2.08.01.20.018	Cetakan Beton Kubus	UNIT ALAT LABORATORIUM/ALAT LABORATORIUM FISIKA	12,00
82	1.3.2.08.01.41.412	Genset	UNIT ALAT LABORATORIUM/ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	1,00
83	1.3.2.08.01.56.127	Mata Beton	UNIT ALAT LABORATORIUM/ALAT LABORATORIUM LAIN	94,00
84	1.3.2.09.01.05.004	Teropong	SENJATA API/ANTI LAPIS BAJA	2,00
85	1.3.2.09.02.01.106	Cctv	PERSENJATAAN NON SENJATA API/ALAT KEAMANAN	1,00
86	1.3.2.10.01.02.001	Personal Computer/Pc	KOMPUTER UNIT/PERSONAL KOMPUTER	22,00
87	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	KOMPUTER UNIT/PERSONAL KOMPUTER	22,00
88	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	KOMPUTER UNIT/PERSONAL KOMPUTER	110,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Kelompok Barang	Jumlah
89	1.3.2.10.01.02.010	Komputer	KOMPUTER UNIT/PERSONAL KOMPUTER	55,00
90	1.3.2.10.02.03.002	Monitor	PERALATAN KOMPUTER/PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	1,00
91	1.3.2.10.02.03.003	Peralatan Personal Komputer	PERALATAN KOMPUTER/PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	45,00
92	1.3.2.10.02.03.004	Scaner	PERALATAN KOMPUTER/PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	11,00
93	1.3.2.10.02.03.007	External	PERALATAN KOMPUTER/PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	5,00
94	1.3.2.10.02.03.018	Printer	PERALATAN KOMPUTER/PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	169,00
95	1.3.2.10.02.04.033	Modem	PERALATAN KOMPUTER/PERALATAN JARINGAN	2,00

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

Pada periode Rencana Strategis sebelumnya, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dirumuskan dengan mengacu pada **visi Kepala Daerah**, yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.”**

Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto secara langsung mendukung **Misi Keempat**, yakni:

“Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan.”

Pemerataan dan perluasan infrastruktur di semua sektor menjadi salah satu strategi utama Pemerintah Daerah dalam menciptakan keadilan

pembangunan dan memperkuat konektivitas wilayah. Infrastruktur yang andal bukan hanya mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan perangkat daerah diambil dari sasaran RPJMD atau mengakomodasi sasaran RPJMD untuk mendukung pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dalam dokumen Renstra periode lalu adalah:

“Pemerataan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air minum, dan bangunan gedung,”

dengan **indikator kinerja utama: “Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik.”**

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Dinas PUPR menetapkan 12 sasaran kinerja, yang terdiri atas 10 sasaran utama dengan 10 indikator kinerja utama, dan 2 sasaran tambahan dengan 4 indikator kinerja tambahan sebagai berikut:

Sasaran Utama :

1. Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air dengan indikator kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi;
2. Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan indikator kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten;
3. Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan indikator kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan

- jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten;
4. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan indikator kinerja Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R;
 5. Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik dengan indikator kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;
 6. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan indikator kinerja Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase;
 7. Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung dengan indikator kinerja Rasio kepatuhan IMB;
 8. Meningkatnya kemantapan jalan dengan indikator kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten;
 9. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi dengan indikator kinerja Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi;
 10. Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang dengan indikator kinerja Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang;

Sasaran Tambahan :

11. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator kinerja a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, b. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah, c. Indeks profesionalitas ASN;
12. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator kinerja Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto telah mencatat berbagai capaian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Di antaranya:

1. Pembangunan Infrastruktur Baru

Berbagai proyek pembangunan jalan, jembatan, drainase, jaringan irigasi, dan fasilitas sanitasi telah berhasil dilaksanakan. Hasilnya berdampak positif pada meningkatnya konektivitas antarwilayah, akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal.

2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur

Selain membangun infrastruktur baru, Dinas PUPR juga memprioritaskan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur eksisting guna menjaga keberlanjutan layanan publik dan memastikan bahwa infrastruktur tetap dalam kondisi baik dan fungsional.

Capaian-capaian tersebut menunjukkan peran strategis Dinas PUPR dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Data capaian kinerja pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto atas target-target Renstra periode sebelumnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Pencapaian Kinerja (IKU dan IKK) Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik				✓	71,38 %	71,88 %	72,38 %	72,88 %	73,38 %	71,88 %	74,99 %	80,00 %	80,57 %	100 %	104 %	110 %	110 %
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		✓			100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten		✓			86,37 %	86,00 %	86,87 %	87,52 %	88,82 %	95,95 %	88,95 %	94,19 %	95,48 %	112 %	102 %	108 %	107 %
4	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R					3,68 %	15,26 %	18,00 %	21,29 %	24,58 %	4,68 %	6,58 %	8,88 %	9,54 %	31 %	37 %	42 %	39 %
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan		✓			85,68 %	87,00 %	87,85 %	88,12 %	88,89 %	87,85 %	94,80 %	99,50 %	99,68 %	101 %	108 %	113 %	112 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	pengolahan air limbah domestik																	
6	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase					15,50 %	16,00 %	18,00 %	19,00 %	20,00 %	15,39 %	17,57 %	18,56 %	20,05 %	96 %	98 %	98 %	100 %
7	Rasio kepatuhan IMB		✓			-	-	10,00 %	11,00 %	12,00 %	-	10,00 %	18,81 %	47,77 %	-	100 %	171 %	398 %
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten		✓			75,49	80,00 %	81,20 %	82,20 %	83,20 %	87,23 %	88,24 %	89,74 %	83,18 %	109 %	109 %	109 %	100 %
9	Rasio tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi		✓		✓	-	-	19,08 %	24,81 %	30,53 %	-	18,73 %	30,81 %	51,06 %	-	98 %	124 %	167 %
10	Persentase kesesuaian pembangunan/ peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang				✓	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				✓	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah				✓	-	-	80,00 %	80,00 %	85,00 %	-	84,65 %	84,61 %	88,25 %	-	106 %	106 %	104 %
13	Indeks profesionalitas ASN				✓	-	-	-	80	80	-	-	88,22	83,05	-	-	110 %	104 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
14	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan				✓	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	100%	200%

Hasil evaluasi atas capaian kinerja (IKU dan IKK) pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto periode 2020 – 2024 :

1. Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase Infrastruktur Kondisi Baik				✓	71,38%	71,88%	72,38%	72,88%	73,38%	71,88%	74,99%	80,00%	80,57%	100%	104%	110%	110%

Sumber : Dinas PUPR

Persentase infrastruktur dalam kondisi baik merupakan indikator utama yang mencerminkan kualitas layanan dasar yang diberikan oleh Dinas PUPR, khususnya di bidang bina marga dan infrastruktur jalan. Pada tahun 2021, indikator ini tercatat sebesar 71,88%, kemudian terus mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 80,57% pada tahun 2024. Selama empat tahun terakhir, capaian indikator ini selalu melebihi target Renstra yang ditetapkan, dengan rasio capaian berkisar antara 100% hingga 110%. Peningkatan ini merupakan hasil nyata dari program pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan terencana.

Secara substantif, infrastruktur jalan yang baik memberikan pengaruh besar terhadap konektivitas wilayah, efisiensi logistik, dan aksesibilitas masyarakat ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Capaian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur telah memberikan output yang terukur dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, capaian yang terus meningkat ini juga menjadi indikator bahwa proses perencanaan dan pengendalian kegiatan fisik berjalan efektif, serta dukungan dari pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan semakin membaik. Meskipun demikian, peningkatan capaian perlu disertai

dengan penguatan sistem pemantauan kualitas konstruksi dan keberlanjutan pemeliharaan agar hasil pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga tahan lama dan sesuai standar teknis. Dalam jangka panjang, capaian ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan mobilitas barang dan jasa.

2. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		✓			100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas PUPR

Daerah Irigasi Kabupaten Mojokerto berjumlah 365 dengan luas baku sawah sebesar 17.757 Ha. Indikator ini menunjukkan sejauh mana luas daerah irigasi di bawah kewenangan Kabupaten Mojokerto dapat dilayani secara optimal oleh jaringan irigasi yang tersedia. Selama periode 2021 hingga 2024, capaian indikator ini secara konsisten menunjukkan angka 100%, yang berarti seluruh wilayah irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah terlayani jaringan irigasi secara penuh.

Kinerja sempurna ini mencerminkan keberhasilan Dinas PUPR dalam menjaga dan meningkatkan fungsi infrastruktur irigasi, termasuk saluran primer, sekunder, dan tersier, serta bangunan pelengkap seperti pintu air, bendung, dan bak kontrol. Pencapaian ini sangat krusial dalam menjaga produktivitas lahan pertanian, terutama mengingat Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah dengan basis ekonomi agraris yang cukup kuat. Terjaminnya pasokan air secara merata dan berkelanjutan akan berdampak langsung terhadap peningkatan indeks pertanaman (IP), ketahanan pangan daerah, dan stabilitas pendapatan petani.

Di sisi lain, capaian 100% selama empat tahun berturut-turut juga menandakan adanya sistem perawatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang berjalan baik serta koordinasi yang efektif antara Dinas PUPR dengan para pemangku kepentingan, termasuk kelompok petani pengguna air (P3A). Namun demikian, meskipun target telah tercapai secara kuantitatif, tantangan tetap ada dari sisi kualitas pelayanan. Pemeriksaan rutin terhadap efisiensi distribusi air, potensi kebocoran saluran, sedimentasi, serta perubahan iklim menjadi hal penting untuk dipantau secara terus-menerus agar capaian ini tidak hanya sekadar terpenuhi secara administratif, tetapi juga fungsional secara teknis.

3. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Layak

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten		✓			86,37%	86,00%	86,87%	87,52%	88,82%	95,95%	88,95%	94,19%	95,48%	112%	102%	108%	107%

Sumber : Dinas PUPR

Sampai dengan akhir tahun 2024 Jumlah penduduk di kabupaten Mojokerto 1.156.144 Jiwa. Indikator ini menggambarkan tingkat keterjangkauan layanan air minum yang layak bagi rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, baik melalui sistem perpipaan (SPAM) maupun sumber bukan perpipaan yang terlindungi (seperti sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan yang ditampung dengan benar). Sepanjang periode 2021 hingga 2024, indikator ini mengalami tren kenaikan yang stabil. Dari realisasi awal sebesar 95,95% di tahun 2021, capaian sempat sedikit berfluktuasi namun tetap berada di atas target yang ditetapkan setiap tahunnya, dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 95,48% dari target sebesar 88,82%.

Capaian ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto telah berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak, yang mencakup pembangunan jaringan SPAM baru, rehabilitasi jaringan eksisting, penyediaan sarana air minum di daerah sulit air, serta kerja sama dengan PDAM dan pihak ketiga. Realisasi yang konsisten di atas target menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur air minum tidak hanya merata secara geografis tetapi juga inklusif, menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil.

Secara makro, indikator ini sangat penting dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya target 6.1 yang menjamin akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau. Selain itu, ketersediaan air minum yang layak juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, menurunkan angka penyakit yang ditularkan melalui air, serta mendukung peningkatan produktivitas ekonomi.

Meski capaian sangat tinggi, tantangan ke depan terletak pada peningkatan kualitas layanan, pengurangan kehilangan air (non-revenue water), perbaikan manajemen aset jaringan, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber air. Perlu pula upaya penguatan kelembagaan dan keberlanjutan pembiayaan untuk menjamin sistem distribusi air tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang.

4. Persentase Desa yang Memiliki TPS/TPST/TPS3R

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R					3,68%	15,26%	18,00%	21,29%	24,58%	4,68%	6,58%	8,88%	9,54%	31%	37%	42%	39%

Sumber : Dinas PUPR

Jumlah Desa di kabupaten Mojokerto 299 Desa dan 5 Kelurahan. Indikator ini mengukur sejauh mana desa-desa di Kabupaten Mojokerto telah memiliki fasilitas pengelolaan sampah berupa Tempat Pengumpulan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), atau Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Capaian ini sangat berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan pemenuhan aspek pelayanan dasar di bidang kebersihan.

Dari tahun 2021 hingga 2024, realisasi indikator ini menunjukkan pertumbuhan bertahap, dari 4,68% menjadi 9,54%. Meskipun terdapat tren peningkatan, namun capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, yaitu 24,58% pada tahun 2024. Rasio capaian pada tahun tersebut hanya mencapai 39%, mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam pencapaian target layanan pengelolaan sampah berbasis desa.

Beberapa faktor yang diduga menjadi kendala dalam pencapaian indikator ini antara lain keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur persampahan, rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah desa terhadap pentingnya pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta terbatasnya tenaga teknis dan kelembagaan pengelola sampah di tingkat desa. Selain itu, proses perizinan, pembebasan lahan, dan dukungan sosial masyarakat juga kerap menjadi hambatan dalam pembangunan fasilitas TPS3R.

Namun demikian, capaian yang meningkat dari tahun ke tahun tetap menunjukkan adanya komitmen dan upaya Dinas PUPR dalam membangun kesadaran serta infrastruktur pengelolaan sampah. Pendekatan kolaboratif dengan desa, pendampingan teknis, dan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan fasilitas TPS/TPST/TPS3R harus terus diperkuat. Pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah, edukasi pemilahan sampah, dan integrasi dengan program lingkungan hidup lainnya juga menjadi kunci keberhasilan ke depan.

Keberadaan TPS/TPST/TPS3R yang memadai akan membantu mengurangi beban TPA, mencegah pencemaran lingkungan, serta meningkatkan kualitas sanitasi wilayah desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, indikator ini harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis lintas sektor.

5. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		✓			85,68%	87,00%	87,85%	88,12%	88,89%	87,85%	94,80%	99,50%	99,68%	101%	108%	113%	112%

Sumber : Dinas PUPR

Sampai dengan akhir tahun 2024 Jumlah penduduk di kabupaten Mojokerto 1.156.144 Jiwa. Indikator ini bertujuan untuk menilai cakupan layanan pengolahan air limbah domestik yang diterima oleh rumah tangga di wilayah kabupaten. Pengolahan air limbah yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama dalam menekan pencemaran air tanah dan badan air permukaan.

Target indikator ini menunjukkan peningkatan bertahap dari tahun ke tahun, yaitu 87,00% pada 2021 hingga 88,89% pada 2024. Data realisasi menunjukkan bahwa capaian kinerja perangkat daerah sangat baik bahkan melebihi target di setiap tahun. Pada 2021, realisasi mencapai 87,85% (101% dari target), naik menjadi 94,80% (108%) di 2022, 99,50% (113%) di 2023, dan 99,68% (112%) pada 2024.

Peningkatan signifikan ini mencerminkan efektivitas program pengolahan limbah domestik yang dijalankan, baik dalam bentuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala komunal maupun individual, serta program edukasi dan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai pentingnya sanitasi layak. Capaian di atas 100% menandakan bahwa program ini tidak hanya tepat sasaran, namun juga meluas cakupannya lebih dari yang ditargetkan.

Namun, meski capaian sudah tinggi, perlu dicermati aspek keberlanjutan pengelolaan. Sistem pengolahan air limbah memerlukan perawatan berkala, pelatihan operator lokal, dan partisipasi aktif dari rumah tangga pengguna. Selain itu, perlu dilakukan monitoring kualitas hasil pengolahan untuk memastikan bahwa air limbah yang dibuang sudah memenuhi baku mutu lingkungan.

Pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan perluasan layanan ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau, termasuk kawasan padat penduduk, daerah pesisir, dan wilayah rawan sanitasi. Dukungan anggaran dan regulasi yang mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan program sanitasi di masa depan.

6. Persentase Perkotaan dan Lingkungan yang Dilengkapi Sistem Drainase

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase					15,50%	16,00%	18,00%	19,00%	20,00%	15,39%	17,57%	18,56%	20,05%	96%	98%	98%	100%

Sumber : Dinas PUPR

Panjang saluran drainase yang tersedia sepanjang 1.152,138 km. Indikator ini secara langsung berada dalam lingkup tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), karena menyangkut penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dasar berupa sistem drainase. Fungsi utama drainase adalah untuk mengelola aliran air permukaan agar tidak menimbulkan genangan, banjir, atau degradasi kualitas lingkungan di

kawasan perkotaan dan permukiman. Sistem ini juga berkontribusi terhadap tata ruang yang tertib dan berkelanjutan.

Target capaian indikator ini meningkat dari 16,00% pada 2021 menjadi 20,00% pada 2024. Realisasi yang dicapai adalah 15,39% pada 2021 (96% dari target), 17,57% di 2022 (98%), 18,56% di 2023 (98%), dan hanya sedikit melewati target dengan 20,05% pada 2024 (100%). Kinerja ini secara umum mendekati target, namun menunjukkan bahwa pengembangan sistem drainase masih menghadapi sejumlah tantangan.

Dari perspektif Dinas PUPR, tantangan tersebut dapat berupa keterbatasan anggaran untuk pembangunan jaringan drainase baru, belum optimalnya sinergi antar bidang dalam menyusun rencana tata ruang yang mendukung sistem drainase terpadu, serta kurangnya data spasial dan peta genangan yang akurat untuk perencanaan. Di sisi lain, pertumbuhan kawasan permukiman yang pesat, terutama di daerah urban fringe, sering kali tidak diiringi pembangunan sistem drainase yang memadai.

Kendati demikian, capaian yang terus meningkat menunjukkan adanya upaya progresif dari Dinas PUPR dalam merespons kebutuhan infrastruktur dasar secara bertahap. Penyusunan master plan drainase kota/kabupaten, penerapan prinsip drainase berwawasan lingkungan, serta pemanfaatan sistem informasi geospasial untuk perencanaan drainase dapat menjadi strategi jangka panjang yang perlu dikedepankan.

Untuk meningkatkan capaian indikator ini, Dinas PUPR perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran, serta mengintegrasikan sistem drainase dengan kebijakan penataan ruang agar fungsi ekologis dan teknis drainase berjalan optimal.

7. Rasio Kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK/Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Rasio kepatuhan IMB		✓		.	.	10,00%	11,00%	12,00%	.	10,00%	18,81%	47,77%	.	100%	171%	398%

Sumber : Dinas PUPR

Indikator ini menjadi salah satu aspek penting dalam fungsi pengawasan dan penataan ruang yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Rasio Kepatuhan IMB menggambarkan persentase bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (sekarang disebut PBG – Persetujuan Bangunan Gedung) sesuai dengan ketentuan tata ruang dan teknis bangunan. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga keteraturan ruang, keselamatan bangunan, dan keberlanjutan lingkungan.

Pada tahun 2021 dan 2022, data indikator ini tidak tersedia, yang disebabkan oleh transisi regulasi dari IMB ke PBG sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, mulai 2023 terlihat lonjakan signifikan. Target tahun 2023 adalah 11,00% dan tahun 2024 sebesar 12,00%. Sementara itu, realisasi menunjukkan capaian 18,81% (171%) pada 2023 dan melonjak drastis menjadi 47,77% (398%) pada 2024.

Rekap Permohonan SLF dan PBG Tahun 2024					
Jumlah Permohonan	Belum Tindak Lanjut oleh Dinas	Sudah ditindak lanjut, perlu tindak lanjut kembali	Sudah ditindak lanjut, status di pemohon	Sudah diterbitkan	Ditolak

1064	80	15	558	400	11
------	----	----	-----	-----	----

Sumber : Dinas PUPR

Capaian luar biasa ini menandakan bahwa Dinas PUPR berhasil memperbaiki sistem perizinan dan meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan fisik di wilayahnya. Transformasi digital melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), peningkatan sosialisasi, serta integrasi layanan perizinan online menjadi faktor pendorong utama peningkatan tersebut.

Namun, masih ada pekerjaan rumah. Banyak bangunan eksisting yang belum memiliki izin resmi atau dibangun sebelum sistem pengawasan berjalan optimal. Dinas PUPR perlu mengembangkan pendekatan korektif melalui pendataan ulang bangunan, penegakan aturan berbasis risiko, pembinaan teknis kepada pemilik bangunan, serta kebijakan afirmatif seperti penyederhanaan proses PBG. Upaya ini harus dibarengi dengan penyusunan regulasi turunan dan koordinasi lintas sektor, termasuk Satpol PP, Dinas Perizinan, dan dinas teknis lainnya.

Peningkatan rasio kepatuhan IMB adalah refleksi dari membaiknya kualitas tata ruang dan peran aktif Dinas PUPR dalam pengendalian pembangunan. Konsistensi dalam penegakan aturan dan kemudahan akses layanan akan menjadi kunci untuk mempertahankan capaian ini ke depan.

8. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten		✓			75,49	80,00%	81,20%	82,20%	83,20%	87,23%	88,24%	89,74%	83,18%	109%	109%	109%	100%

Sumber : Dinas PUPR

Panjang Jalan kabupaten 1.166,389 km. Indikator ini mengukur kualitas jalan yang ada di wilayah kabupaten, yang mencakup aspek

kemantapan permukaan jalan dan keberfungsian jalan tersebut dalam mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Jalan yang mantap sangat krusial untuk menunjang perekonomian daerah, mempercepat aksesibilitas, serta mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk.

Target tahunan untuk tingkat kemantapan jalan kabupaten meningkat secara bertahap, dari 80,00% pada 2021 hingga 83,20% pada 2024. Sementara itu, realisasi capaian pada indikator ini menunjukkan hasil yang lebih baik dari yang diperkirakan. Pada 2021, capaian sebesar 87,23% (109% dari target), terus meningkat pada tahun 2022 dengan capaian 88,24% (109%) dan 2023 dengan capaian 89,74% (109%). Capaian tertinggi tercatat pada 2024, dengan 83,18% (100% dari target).

Capaian ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR berhasil mengelola infrastruktur jalan secara efektif, baik melalui peningkatan kualitas jalan yang sudah ada maupun pembangunan jalan baru. Salah satu kunci sukses Dinas PUPR adalah pemeliharaan yang terjadwal dan penggunaan teknologi pemantauan kondisi jalan yang tepat, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara proaktif sebelum kerusakan parah terjadi.

Namun, tantangan yang tetap ada adalah pengelolaan jalan di daerah terpencil dan wilayah dengan topografi yang sulit, di mana biaya perawatan cenderung lebih tinggi dan pencapaian kemantapan jalan menjadi lebih menantang. Oleh karena itu, Dinas PUPR perlu lebih memanfaatkan teknologi seperti pemetaan geospasial dan aplikasi manajemen jalan untuk memastikan penanganan yang lebih efisien. Selain itu, koordinasi yang lebih baik dengan sektor lain seperti Dinas Perhubungan dan Pemerintah Desa dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan proyek jalan secara lebih menyeluruh.

Konsistensi dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas jalan akan sangat bergantung pada pengalokasian anggaran yang tepat serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Ke depannya, Dinas PUPR juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan, seperti penggunaan material ramah lingkungan dan perbaikan sistem drainase jalan, untuk menjaga kualitas jalan yang berkelanjutan.

9. Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		✓		✓	.	.	19,08%	24,81%	30,53%	.	18,73%	30,81%	51,06%	.	98%	124%	167%

Sumber : Dinas PUPR

Indikator ini mengukur persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor PUPR yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikasi ini menunjukkan tingkat keahlian dan profesionalisme tenaga teknis dalam mengelola, merancang, dan memelihara infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Peningkatan rasio tenaga yang bersertifikat kompetensi ini penting, terutama untuk memastikan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR sesuai dengan standar teknis dan regulasi yang berlaku.

Target untuk indikator ini adalah peningkatan rasio tenaga yang tersertifikasi kompetensi, dengan target tahunan yang menunjukkan proyeksi progresif. Pada tahun 2023, target ditetapkan sebesar 30,53%, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 51,06%. Realisasi yang tercatat pada tahun 2023 adalah 30,81%, yang telah melampaui target sebesar 124%, dan pada 2024 capaian mencapai 51,06%, yang juga melampaui target yang ditetapkan dengan rasio 167%.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR secara aktif mendorong pengembangan kompetensi tenaga teknis melalui pelatihan dan sertifikasi. Capaian ini juga mencerminkan komitmen Dinas PUPR dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor infrastruktur, yang

pada gilirannya akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

Namun, meskipun capaian ini sangat positif, tantangan ke depan adalah memperluas jangkauan sertifikasi untuk mencakup lebih banyak tenaga teknis, terutama yang bekerja di daerah-daerah terpencil atau di bidang-bidang tertentu yang belum tercakup oleh pelatihan. Dinas PUPR perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga pelatihan yang berkompeten dan menyusun program pelatihan berbasis kebutuhan lokal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelatihan jarak jauh atau dengan sistem e-learning yang dapat diakses oleh tenaga teknis di seluruh wilayah kabupaten.

Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR sedang bergerak ke arah profesionalisasi yang lebih tinggi di sektor infrastruktur, yang akan memperkuat kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di masa depan.

10. Persentase Kesesuaian Pembangunan/Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang				✓	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas PUPR

Indikator ini mengukur sejauh mana pembangunan atau peningkatan kualitas infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Rencana tata ruang berfungsi untuk mengatur penggunaan lahan yang efisien, berkelanjutan, dan mendukung perkembangan wilayah yang seimbang. Oleh karena itu, kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang adalah

kunci untuk menciptakan lingkungan yang tertata dengan baik, menghindari konflik ruang, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memegang peranan penting dalam memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dilaksanakan, baik yang bersifat pembangunan baru maupun peningkatan kualitas, telah mempertimbangkan dan mematuhi ketentuan rencana tata ruang yang ada. Dari data yang tersedia, target untuk indikator ini adalah 100% kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang, dan pada setiap tahun, capaian mencapai angka 100% (dengan rasio 100%).

Pencapaian yang konsisten ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR telah berhasil menjalankan fungsi pengawasan dan perencanaan infrastruktur dengan sangat baik. Dinas ini mampu memastikan bahwa setiap pembangunan infrastuktur yang dilakukan tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga selaras dengan visi dan misi pembangunan wilayah yang tercantum dalam rencana tata ruang (RTRW). Salah satu upaya Dinas PUPR adalah melakukan kajian dan evaluasi terhadap dampak pembangunan terhadap lingkungan dan keberlanjutan tata ruang.

Namun, meskipun capaian 100% menunjukkan keberhasilan yang sangat baik, tantangan yang tetap perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam dinamika pengembangan wilayah (seperti perubahan fungsi lahan atau perizinan) tetap dapat diakomodasi dengan tepat dalam perencanaan tata ruang. Oleh karena itu, Dinas PUPR harus terus mengembangkan sistem monitoring yang efisien, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan agar setiap keputusan pembangunan tetap berpihak pada keselarasan ruang dan tidak merusak keseimbangan ekologis atau sosial.

Ke depan, penting bagi Dinas PUPR untuk memperkuat kapasitas dalam merumuskan perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat, serta mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.

11. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Perangkat Daerah				✓	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas PUPR

Indikator ini mengukur sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dapat menyusun dan melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan baik. SAKIP adalah instrumen untuk memastikan bahwa anggaran yang dikelola digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penerapan SAKIP yang baik akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja PUPR dalam menjalankan program-programnya.

Dalam hal ini, Dinas PUPR telah berhasil mempertahankan nilai SAKIP yang sangat baik, dengan nilai yang tercatat pada level “A” setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR telah berhasil dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kinerjanya sesuai dengan standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pencapaian nilai “A” ini menandakan bahwa seluruh program yang dijalankan oleh Dinas PUPR memiliki dasar perencanaan yang kuat, pelaksanaan yang efisien, dan hasil yang terukur sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Keberhasilan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan internal yang efektif. Dinas PUPR kemungkinan besar telah mengimplementasikan berbagai reformasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran, seperti penyusunan rencana kerja berbasis kinerja, penetapan indikator kinerja yang jelas, serta monitoring dan evaluasi yang rutin.

Namun, meskipun nilai SAKIP sudah mencapai level yang sangat baik, tantangan ke depan adalah untuk tetap menjaga kualitas perencanaan dan

pelaksanaan program, terutama dalam menghadapi dinamika anggaran yang terbatas atau perubahan kebijakan pemerintah. Selain itu, penting bagi Dinas PUPR untuk terus meningkatkan keterlibatan stakeholder, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam proses perencanaan dan evaluasi, agar kinerja yang terukur tidak hanya mencakup aspek administratif tetapi juga aspek pelayanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pencapaian nilai SAKIP yang konsisten dengan kategori "A" menunjukkan bahwa Dinas PUPR memiliki sistem manajemen kinerja yang matang dan telah menunjukkan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang efektif.

12. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi anggaran perangkat daerah				✓	.	.	80,00%	80,00%	85,00%	.	84,65%	84,61%	88,25%	.	106%	106%	104%

Sumber : Dinas PUPR

Indikator ini mengukur seberapa efektif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di setiap tahunnya. Realisasi anggaran yang optimal mencerminkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, serta tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pencapaian yang baik pada indikator ini menunjukkan adanya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Target untuk indikator ini pada tahun 2021 hingga 2024 berkisar antara 80,00% hingga 85,00%, dengan capaian yang dilaporkan adalah 84,65% pada tahun 2021 (106% dari target), 84,61% pada tahun 2022

(106%), 88,25% pada tahun 2023 (104%), dan akhirnya 100% pada tahun 2024. Realisasi anggaran yang mencapai atau melebihi target menunjukkan pengelolaan keuangan yang sangat baik, di mana Dinas PUPR dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan infrastruktur daerah.

Capaian yang terus meningkat pada tahun 2023 dan 2024 menandakan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran. Dalam hal ini, Dinas PUPR telah mampu mengelola anggaran secara efektif, mengurangi sisa anggaran yang tidak terpakai, dan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang prioritas, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan drainase.

Namun, meskipun capaian tersebut tergolong baik, Dinas PUPR tetap harus menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran di tengah kondisi yang dinamis, seperti fluktuasi harga material bangunan, perubahan regulasi, atau keterlambatan dalam pencairan anggaran. Untuk itu, penting bagi Dinas PUPR untuk terus meningkatkan perencanaan anggaran yang fleksibel dan berbasis pada analisis kebutuhan yang cermat. Selain itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat agar setiap pengeluaran sesuai dengan tujuan dan tidak terjadi pemborosan.

Indikator ini menggambarkan bahwa Dinas PUPR telah berhasil mengelola anggaran dengan cukup baik, dan terus menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Berikut kami sajikan capaian tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas PUPR Kab. Mojokerto Periode 2020 – 2024 bersama dengan rata – rata pertumbuhan anggaran beserta realisasinya :

Tabel 1.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

N O	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Rea lisa si
1	PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPA TEN/KO TA	26.374 .037.4 10	29.567 .549.9 67	27.011 .694.3 44	24.734 .012.5 60	24.920 .757.5 60	21.826 .780.7 72	23.315 .615.0 55	25.648 .520.2 44	23.268 .350.1 18	23.551 .228.5 26	82, 76 %	78, 86 %	94, 95 %	94, 07 %	94, 50 %	- 76, 38 %	- 73, 02 %
2	PROGRA M PENGEL OLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.706. 143.42 0	10.600 .749.0 00	9.618. 550.20 0	14.633 .954.1 23	19.500 .054.9 06	3.418. 538.07 0	8.640. 172.68 2	8.398. 617.39 3	12.645 .006.2 80	16.780 .713.4 07	92, 24 %	81, 51 %	87, 32 %	86, 41 %	86, 05 %	31, 54 %	22, 72 %
3	PROGRA M PENGEL OLAAN DAN PENGEM BANGAN SISTEM PENYEDI AAN AIR MINUM	540.65 6.000	6.752. 430.00 0	5.954. 232.70 0	10.742 .177.0 51	9.666. 312.51 0	449.72 1.500	5.475. 513.24 1	4.644. 007.98 1	8.690. 083.26 1	8.964. 904.75 9	83, 18 %	81, 09 %	78, 00 %	80, 90 %	92, 74 %	346 ,97 %	398 ,36 %

N O	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Rea lisa si
4	PROGRA M PENGEM BANGAN SISTEM DAN PENGEL OLAAN PERSAM PAHAN REGION AL	94.115 .780	1.605. 500.00 0	2.929. 836.50 0	4.685. 000.00 0	1.455. 000.00 0	69.395 .780	1.485. 618.20 5	2.900. 893.34 6	4.669. 567.88 0	1.445. 294.69 2	73, 73 %	92, 53 %	99, 01 %	99, 67 %	99, 33 %	286 ,49 %	420 ,67 %
5	PROGRA M PENGEL OLAAN DAN PENGEM BANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	2.127. 342.00 0	2.664. 947.50 0	3.275. 459.03 6	7.144. 390.55 3	-	2.081. 831.71 6	2.620. 203.50 0	3.250. 670.45 0	7.099. 783.83 5	0,0 0%	97, 86 %	98, 32 %	99, 24 %	99, 38 %	11, 95 %	13, 68 %
6	PROGRA M PENGEL OLAAN DAN PENGEM BANGAN SISTEM DRAINAS E	-	32.462 .000.0 00	6.459. 392.65 0	3.864. 963.06 5	11.646 .524.6 75	-	20.953 .737.0 71	4.983. 742.35 0	3.224. 853.78 0	10.678 .177.2 21	0,0 0%	64, 55 %	77, 15 %	83, 44 %	91, 69 %	- 88, 04 %	- 83, 01 %
7	PROGRA M PENATA AN	4.031. 382.00 0	12.711 .000.0 00	9.519. 000.00 0	10.852 .281.6 07	11.239 .546.6 46	2.221. 031.75 0	7.964. 271.55 7	6.841. 170.62 3	9.342. 408.48 3	8.338. 088.24 1	55, 09 %	62, 66 %	71, 87 %	86, 09 %	74, 19 %	- 30, 30 %	- 6,1 5%

N O	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Rea lisa si
	BANGUNAN GEDUNG																	
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-	575.00 0.000	335.00 0.000	-	-	-	417.69 1.609	293.13 6.805	0,0 0%	0,0 0%	0,0 0%	72, 64 %	87, 50 %	- 41, 74 %	- 29, 82 %
9	PROGRAM PENYELANGGARAAN JALAN	127.11 1.409. 526	143.85 6.159. 997	167.02 1.029. 772	182.27 6.878. 267	334.19 3.526. 127	102.58 5.045. 396	123.60 0.791. 421	139.70 5.797. 058	150.70 0.346. 655	293.37 3.258. 928	80, 70 %	85, 92 %	83, 65 %	82, 68 %	87, 79 %	- 34, 27 %	- 28, 50 %
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	487.00 0.000	525.00 0.000	880.00 0.000	866.50 0.000	-	361.31 5.542	474.82 8.850	841.82 3.370	843.29 3.650	0,0 0%	74, 19 %	90, 44 %	95, 66 %	97, 32 %	- 55, 52 %	- 22, 20 %
11	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENATAAN RUANG	535.80 2.650	1.384. 000.00 0	2.225. 000.00 0	1.170. 000.00 0	1.451. 785.50 0	355.16 3.500	1.110. 779.52 4	1.795. 701.14 4	986.26 7.103	1.425. 363.62 9	66, 29 %	80, 26 %	80, 71 %	84, 30 %	98, 18 %	- 32, 26 %	0,3 3%

N O	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Rea lisa si
1 2	PROGRA M PENYEL ENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUT AN JALAN (LLAJ)	-	2.735. 000.00 0	-	-	-	-	2.183. 862.59 9	-	-	-	0,0 0%	79, 85 %	0,0 0%	0,0 0%	0,0 0%	0,0 0%	0,0 0%
	Jumlah	162.39 3.546. 786	244.28 8.730. 964	233.92 8.683. 666	257.68 9.725. 709	422.41 9.398. 477	130.92 5.676. 768	197.17 3.508. 613	198.01 3.482. 489	218.03 7.068. 989	372.79 3.243. 693	80, 62 %	80, 71 %	84, 65 %	84, 61 %	88, 25 %	26, 54 %	51, 09 %

13. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indeks profesionalitas ASN				✓	.	.	.	80	80	.	.	88,22	83,05	.	.	110%	104%

Sumber : Dinas PUPR

Indikator ini mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Profesionalitas ASN sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dan kelancaran program pembangunan infrastruktur. ASN yang profesional akan memiliki kompetensi, etika, dan kinerja yang tinggi, yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Target untuk indeks profesionalitas ASN pada tahun 2021 dan 2022 adalah 80, dengan angka yang mencerminkan tingkat kompetensi dan kinerja ASN di lingkungan Dinas PUPR. Realisasi pada 2022 tercatat sebesar 88,22 (110% dari target), yang menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas profesionalisme ASN. Pada 2023, nilai indeks turun menjadi 83,05 (104% dari target), yang meskipun sedikit menurun, tetap menunjukkan bahwa profesionalisme ASN masih berada pada tingkat yang memadai dan mencerminkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas PUPR.

Pencapaian yang lebih tinggi dari target ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR telah berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Hal ini dapat tercermin dalam program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas PUPR, baik secara teknis maupun manajerial, guna meningkatkan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan infrastruktur. Di samping itu, indikator ini juga

menggambarkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya etika dan pelayanan publik dalam tugas-tugas yang diemban oleh ASN di Dinas PUPR.

Namun, tantangan yang tetap perlu dihadapi adalah menjaga keberlanjutan pencapaian ini, terutama dengan adanya dinamika dalam lingkungan kerja dan perubahan kebijakan. Dinas PUPR harus terus meningkatkan kualitas pelatihan dan sertifikasi untuk ASN, serta mendorong penguatan budaya kerja yang berfokus pada inovasi dan perbaikan kualitas pelayanan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi kinerja ASN secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa setiap individu tetap berada pada jalur yang sesuai dengan standar profesionalitas yang diharapkan.

Indikator ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur yang lebih baik di masa depan.

14. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan				✓	.	.	.	1	1	.	.	1	2	.	.	100%	200%

Sumber : Dinas PUPR

Indikator ini mengukur sejauh mana inovasi yang dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dapat diinternalisasi dalam sistem kerja, disosialisasikan kepada pihak terkait, dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Inovasi yang terinternalisasi mencakup penerapan solusi baru dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan infrastruktur, yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR.

Pada tahun 2021 dan 2022, Dinas PUPR berhasil mencatatkan 1 inovasi yang berhasil terinternalisasi dan tersosialisasi kepada pihak terkait. Pada tahun 2023, capaian ini meningkat menjadi 2 inovasi yang diterapkan, yang mencerminkan peningkatan kualitas dalam pengelolaan dan pengembangan inovasi di Dinas PUPR. Hasil ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR tidak hanya fokus pada pencapaian target infrastruktur, tetapi juga berupaya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide baru yang dapat meningkatkan proses kerja dan hasil yang dicapai.

Inovasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR bisa mencakup berbagai bidang, seperti penggunaan teknologi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan material ramah lingkungan, penerapan sistem manajemen berbasis data dalam pemantauan infrastruktur, atau pengembangan metode pemeliharaan yang lebih efisien. Penerapan inovasi tersebut, jika berhasil diinternalisasi, akan menciptakan budaya kerja yang lebih responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Namun, tantangan terbesar dalam hal ini adalah memastikan bahwa inovasi yang dilakukan dapat tetap berkelanjutan. Dinas PUPR perlu memastikan bahwa inovasi yang telah diimplementasikan terus diperbaharui dan ditingkatkan, agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan daerah. Selain itu, perlu ada strategi untuk mengintegrasikan inovasi dalam kebijakan dan prosedur operasional, serta menyosialisasikan inovasi tersebut kepada seluruh jajaran di Dinas PUPR serta pihak-pihak terkait lainnya, agar semua pihak dapat berpartisipasi dalam menjalankan inovasi dengan baik.

Pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR telah berhasil mengembangkan dan melaksanakan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur daerah. Ke depannya, penting bagi Dinas PUPR untuk terus mengedepankan riset dan pengembangan dalam rangka menghadirkan solusi-solusi baru yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Analisis Pencapaian Kinerja Renstra Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Tahun 2020–2024

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis dalam pembangunan infrastruktur dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto telah menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020–2024. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan permukiman, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Analisis terhadap tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan bahwa sebagian besar indikator mengalami tren positif dari sisi realisasi, dengan tingkat capaian yang umumnya melampaui target Renstra tahunan. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Dinas PUPR dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program prioritas serta efektivitas dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Beberapa indikator bahkan menunjukkan performa sangat tinggi, seperti pemenuhan jaringan irigasi, akses air minum melalui SPAM, serta nilai SAKIP perangkat daerah yang konsisten meraih predikat “A”.

Namun demikian, terdapat pula sejumlah tantangan yang masih perlu mendapatkan perhatian serius. Indikator seperti tingkat kemantapan jalan kabupaten, persentase desa yang memiliki TPS/TPST/TPS3R, dan rasio tenaga teknis bersertifikat menunjukkan ketidakkonsistenan capaian antar tahun. Fluktuasi capaian ini menjadi cerminan adanya hambatan struktural dan teknis, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun pengawasan program. *Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan analitis dan korektif yang lebih sistematis melalui analisis deskriptif dan diagnostik sebagaimana disajikan pada bagian berikut.*

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh terhadap keberhasilan dan tantangan dalam implementasi Renstra Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto selama periode 2020–2024, serta menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan pada periode perencanaan selanjutnya.

I. Analisis Deskriptif

1. Capaian Indikator Infrastruktur dan Layanan Dasar

- Persentase Infrastruktur Kondisi Baik menunjukkan peningkatan dari 71,88% pada 2021 menjadi 80,57% pada 2023, lalu stabil di 80,57% pada 2024. Rasio capaian terus meningkat hingga 110% pada 2023 dan 2024.
- Rasio Luas Daerah Irigasi yang Dilayani Jaringan konsisten di angka 100%, menunjukkan pemenuhan target secara penuh dari 2020 hingga 2024.
- Akses Air Minum melalui SPAM menunjukkan peningkatan dari 86,37% pada 2020 menjadi 95,48% pada 2023, meskipun sedikit menurun ke 94,18% di 2024. Capaian ini tetap tinggi, dengan rasio >100% tiap tahun.

2. Indikator Pelayanan Lingkungan dan Permukiman

- Persentase Desa dengan TPS/TPST/TPS3R naik dari 3,68% (2020) ke 9,54% (2023), namun menurun ke 4,68% (2024). Capaian tertinggi terjadi di 2023 (42%), namun capaian 2024 menunjukkan penurunan efektivitas.
- Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik meningkat pesat, dari 85,68% (2020) ke 99,56% (2023), meskipun sedikit turun di 2024. Rasio capaian konsisten tinggi, mencapai 112%.
- Perkotaan dengan Drainase meningkat signifikan, dari 15,36% (2020) ke 20,05% (2024), meskipun rasio capaian tidak selalu optimal.

3. Indikator Tertinggal dan Bermasalah

- Tingkat Kematapan Jalan Kabupaten hanya naik sedikit dari 75,49% (2020) ke 87,74% (2024), tetapi capaian tahun 2023 anjlok (47,77%). Terdapat fluktuasi besar, dengan rasio capaian yang turun drastis pada 2023 (171%) lalu sangat tinggi di 2024 (398%), menunjukkan adanya intervensi masif atau koreksi target.
- Rasio Tenaga yang Kompeten meningkat konsisten dari 18,93% ke 51,06%, tetapi masih jauh dari ideal. Rasio capaian tahun 2024 mencapai 167%, menunjukkan percepatan kompetensi SDM di tahun akhir Renstra.

4. Indikator Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

- Nilai SAKIP stabil di nilai A selama 2021–2024, dengan konsistensi capaian.
- Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan tren meningkat: 80 (2021), 82 (2022), 83 (2023), dan 85 (2024), mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara bertahap.
- Jumlah Inovasi Daerah meningkat dari 1 (2022) menjadi 3 (2024), menandakan adanya upaya serius mendorong inovasi perangkat daerah.

II. Analisis Diagnostik

A. Identifikasi Permasalahan

- Fluktuasi pada indikator tertentu seperti kemantapan jalan dan persentase desa dengan TPS/TPST menunjukkan ketidakkonsistenan dalam implementasi program dan kemungkinan permasalahan dalam perencanaan anggaran atau intervensi fisik di lapangan.
- Rendahnya capaian awal tenaga teknis bersertifikat mengindikasikan kurangnya pelatihan atau insentif dalam pengembangan SDM di awal periode. Peningkatan pesat di akhir masa Renstra bisa jadi hasil intervensi percepatan atau program pelatihan massal.

- Target terlalu konservatif pada beberapa indikator seperti IMB atau irigasi (yang selalu 100%), membuat rasio capaian tidak mencerminkan inovasi atau peningkatan signifikan meski capaian konsisten.

B. Akar Masalah Potensial

- Perencanaan dan penganggaran yang kurang adaptif terhadap dinamika capaian tahunan, seperti terlihat pada indikator jalan yang sempat anjlok.
- Kendala teknis dan kelembagaan seperti keterbatasan SDM, lemahnya pengawasan fisik proyek, dan kurangnya kolaborasi lintas perangkat daerah.
- Minimnya sinergi program infrastruktur dengan pengelolaan lingkungan, terlihat dari capaian rendah TPS/TPST yang tidak berbanding lurus dengan capaian sanitasi domestik.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten telah menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur daerah. Setiap indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk mengukur capaian teknis, tetapi juga memperhatikan keterkaitan langsung dengan kelompok sasaran layanan yang merasakan manfaat maupun memiliki peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

1. Infrastruktur Umum dan Pengguna Layanan Publik

Indikator seperti **persentase infrastruktur dalam kondisi baik, tingkat kemantapan jalan kabupaten**, serta **persentase wilayah perkotaan yang memiliki sistem drainase**, menyangar **masyarakat umum** sebagai pengguna

utama infrastruktur publik. Jalan, jembatan, dan sistem drainase yang memadai tidak hanya mempermudah aktivitas harian masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas sosial. Kelompok sasaran ini mencakup pengguna transportasi, pelaku usaha, dan komunitas lokal yang menggantungkan sebagian besar aktivitasnya pada ketersediaan infrastruktur yang aman dan berfungsi dengan baik.

Selain masyarakat, indikator-indikator ini juga secara tidak langsung menasar **pemerintah daerah, kontraktor, dan penyedia jasa konstruksi**, yang bertanggung jawab dalam menjaga kualitas, keamanan, serta keberlanjutan infrastruktur. Perencanaan dan pengawasan teknis yang dilakukan sangat menentukan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Infrastruktur yang tidak terpelihara dengan baik dapat meningkatkan risiko kecelakaan, kerugian ekonomi, dan menurunnya kualitas hidup penduduk.

2. Pelayanan Sumber Daya Air dan Sanitasi

Kelompok indikator yang berkaitan dengan **pengelolaan air bersih dan sanitasi** memainkan peran penting dalam mendukung aspek kesehatan masyarakat dan ketahanan lingkungan. Indikator seperti **rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi, persentase rumah tangga yang memperoleh akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan, serta persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**, menasar **rumah tangga di wilayah kabupaten**, khususnya di kawasan perdesaan dan perkotaan pada umumnya.

Kelompok sasaran utama dalam indikator irigasi adalah **petani**, yang mengandalkan jaringan irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian mereka. Ketersediaan air yang cukup dan berkelanjutan sangat menentukan keberhasilan panen dan produktivitas lahan. Dengan demikian, selain petani, **Dinas pertanian** dan **pemerintah kabupaten** turut menjadi

kelompok sasaran yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jaringan irigasi secara efisien.

Pada indikator akses air minum dan pengolahan air limbah, kelompok sasarannya meluas ke seluruh **rumah tangga**, terutama mereka yang belum memiliki akses terhadap layanan dasar ini. Akses terhadap air minum yang layak sangat terkait dengan peningkatan kualitas sanitasi, kesehatan, serta pengurangan beban biaya kesehatan keluarga. Selain rumah tangga, **instansi kesehatan, lingkungan hidup, serta penyedia layanan air minum dan sanitasi** merupakan bagian dari kelompok sasaran karena memiliki peran pengawasan, pengelolaan, serta penyediaan infrastruktur.

3. Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Permukiman

Indikator **persentase desa yang memiliki TPS, TPST, atau TPS3R** bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat desa dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Kelompok sasaran layanan dari indikator ini mencakup **warga desa sebagai pengguna langsung fasilitas pengelolaan sampah**, serta **instansi lingkungan hidup** yang bertugas melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Keberadaan fasilitas pengelolaan sampah ini mendorong terbentuknya pola perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan perdesaan. Selain itu, **kelompok masyarakat (seperti bank sampah atau komunitas peduli lingkungan)** juga menjadi sasaran layanan karena mereka seringkali terlibat langsung dalam pengelolaan, pemilahan, dan pengangkutan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

4. Regulasi Pembangunan dan Tata Ruang

Dua indikator yang berfokus pada penataan pembangunan, yakni **rasio kepatuhan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** dan **persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang**, memiliki kelompok sasaran yang spesifik. Di antaranya adalah **pemilik bangunan, pengembang**

properti, dan pelaku usaha konstruksi. Tujuan utama dari indikator ini adalah memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tata ruang yang telah direncanakan.

Pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR dan perencana tata ruang, menjadi kelompok kunci dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ini. Masyarakat umum juga menjadi pihak yang diuntungkan, karena kepatuhan terhadap IMB dan tata ruang menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan tidak menimbulkan konflik ruang atau risiko bencana.

5. Profesionalitas dan Kapasitas SDM

Dinas PUPR juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan kapasitas internal melalui indikator seperti **rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi, indeks profesionalitas ASN,** serta **nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).** Kelompok sasaran utama dari indikator-indikator ini adalah **aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga teknis di lingkungan Dinas PUPR,** yang memegang peranan penting dalam penyusunan perencanaan teknis, pengawasan, serta pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, **lembaga sertifikasi profesi, lembaga pelatihan, dan instansi pengawas internal** juga termasuk dalam kelompok sasaran karena mendukung pengembangan kompetensi dan akuntabilitas kerja. Profesionalitas ASN yang tinggi akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, efisiensi program, dan transparansi penggunaan anggaran.

6. Inovasi dan Realisasi Anggaran

Indikator **jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan** serta **persentase realisasi anggaran perangkat daerah** menunjukkan keterlibatan berbagai pihak dalam menciptakan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Inovasi yang diterapkan tidak hanya bertujuan mempercepat pelaksanaan proyek, tetapi

juga meningkatkan kualitas hasil pembangunan dengan pendekatan berbasis teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Kelompok sasaran layanan untuk indikator ini mencakup **masyarakat umum sebagai penerima manfaat, pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan**, serta **penyedia teknologi, mitra swasta, dan lembaga litbang** yang terlibat dalam perencanaan dan penerapan inovasi. Sementara indikator realisasi anggaran menyoroti **instansi perencana, pengelola anggaran, serta lembaga pengawas dan audit**, yang bertanggung jawab dalam menjamin akuntabilitas dan efisiensi pemanfaatan dana publik.

2.1.5 Mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Mojokerto dalam Pemberian Pelayanan

Mitra perangkat daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam pencapaian kinerja dan pelayanan publik yang optimal. Dalam konteks Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), mitra ini mencakup berbagai pihak eksternal yang mendukung dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Salah satu mitra utama yang terlibat dalam proyek-proyek PUPR adalah **konsultan teknis** dan **kontraktor**. Konsultan teknis memiliki tanggung jawab dalam merancang dan merencanakan proyek dengan mengacu pada standar dan regulasi yang berlaku, sementara kontraktor bertugas dalam pelaksanaan proyek. Kerjasama dengan mitra ini memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan oleh perangkat daerah memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menyimpang dari rencana awal yang telah disusun.

Pada aspek pengelolaan infrastruktur, seperti **jalan, jembatan, drainase**, dan **pemeliharaan fasilitas publik lainnya**, mitra lain yang sangat penting adalah **pihak ketiga**, baik dari sektor swasta maupun **organisasi masyarakat** yang berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai contoh, pada indikator yang terkait dengan **pengelolaan air limbah** dan **pembuangan sampah**, kerjasama dengan **lembaga swadaya**

masyarakat (LSM) atau **organisasi non-pemerintah** yang memiliki keahlian dalam pengelolaan lingkungan sangat penting. Masyarakat sebagai penerima manfaat harus dilibatkan dalam program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan air limbah domestik, agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan merata. Kerjasama dengan pihak-pihak ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan proyek saja, tetapi juga pada pemeliharaan jangka panjang dan keberlanjutan layanan yang diberikan.

Selain itu, mitra lain yang sangat penting adalah **lembaga sertifikasi profesi** yang memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja yang terlibat dalam sektor konstruksi. PUPR berkolaborasi dengan lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa teknisi, operator, dan analis yang bekerja dalam proyek infrastruktur memiliki sertifikasi dan keterampilan yang relevan. Hal ini mengurangi risiko kesalahan teknis yang bisa berdampak pada kualitas infrastruktur yang dibangun. Keberadaan lembaga ini mendukung pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya secara profesional, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan negara.

Pemerintah desa juga menjadi mitra penting dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Pengelolaan infrastruktur sering kali melibatkan berbagai lapisan pemerintahan, termasuk pemerintah desa, yang bertugas mengelola proyek infrastruktur di tingkat lokal. Kerjasama antara perangkat daerah dan pemerintah desa dalam hal pemeliharaan fasilitas publik seperti jalan, drainase, dan penyediaan air bersih sangat penting untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut tetap berfungsi dengan baik dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Kerjasama dengan sektor swasta juga terjalin dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah melalui **penyediaan teknologi baru** yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, pada sektor **pengelolaan sampah**, teknologi yang digunakan dalam pengolahan sampah dan limbah semakin berkembang. Teknologi-teknologi

baru ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberlanjutan proyek-proyek pengelolaan sampah dan air limbah. Oleh karena itu, kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan teknologi tinggi di bidang ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan efisien.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) memainkan peran yang sangat vital dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, terutama dalam bidang penyediaan layanan dasar seperti air minum. Pada indikator yang berkaitan dengan **akses terhadap air bersih**, misalnya, BUMD Perumdam Mojopahit yang bergerak di bidang **pengelolaan air** memiliki peran penting dalam menyediakan dan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Mereka juga membantu dalam **pemeliharaan** dan **pengelolaan jaringan perpipaan** yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa seluruh warga kabupaten atau kota mendapatkan akses terhadap air bersih yang layak.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur daerah yang efektif dan berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto telah menjalin berbagai bentuk kerjasama strategis dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup antar daerah, antar instansi pemerintahan, maupun dengan sektor swasta. Kerjasama ini diwujudkan melalui koordinasi lintas wilayah, pelaksanaan proyek bersama, serta sinergi program yang saling melengkapi untuk mencapai sasaran pembangunan secara optimal.

Dalam bidang pengelolaan sumber daya air, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan **Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas** dalam pengelolaan irigasi, pengendalian banjir, serta normalisasi sungai-sungai besar seperti Sungai Brantas dan Sungai Sadar. Kerjasama ini

mencakup pelaksanaan kegiatan teknis, survei lapangan, serta penanganan tanggap darurat ketika terjadi bencana banjir, yang melibatkan koordinasi cepat antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu wujud nyata dari kerjasama ini adalah pelaksanaan proyek rehabilitasi saluran irigasi yang melintasi lebih dari satu kecamatan dan berbatasan dengan kabupaten lain.

Di sektor tata ruang, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto juga telah melakukan **koordinasi lintas wilayah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur** dalam penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto. Proses ini melibatkan konsultasi publik, sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, serta penyesuaian terhadap Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang mencakup sebagian wilayah Kabupaten Mojokerto. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan wilayah dilakukan secara legal, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas ruang.

Di bidang air minum dan sanitasi, Dinas PUPR menjalin kerjasama dengan **PDAM Mojopahit** dan Dinas Kesehatan dalam memperluas jaringan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) ke wilayah-wilayah yang belum terlayani. Program ini juga disinergikan dengan program hibah air minum dari pemerintah pusat, yang memungkinkan rumah tangga berpenghasilan rendah mendapatkan sambungan air bersih secara gratis atau dengan biaya terjangkau.

Selain itu, Dinas PUPR juga bekerjasama dengan **lembaga pelatihan teknis** dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga operator dan teknisi konstruksi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja bersertifikat, sejalan dengan indikator kinerja yang ditetapkan pemerintah pusat mengenai profesionalisme sumber daya manusia bidang PUPR.

Kerjasama lainnya melibatkan **Bappeda dan Inspektorat Daerah**, khususnya dalam penguatan perencanaan, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Hal ini ditunjukkan melalui perbaikan dalam sistem pelaporan kinerja berbasis SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

yang terintegrasi lintas perangkat daerah, termasuk dalam hal realisasi anggaran dan evaluasi capaian indikator pembangunan.

Kerjasama yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto tidak hanya bekerja secara internal, tetapi juga secara aktif membangun sinergi dan kemitraan lintas sektor demi keberhasilan pembangunan daerah. Pendekatan kolaboratif ini menjadi kunci dalam menyelesaikan tantangan pembangunan yang kompleks serta memastikan bahwa manfaat infrastruktur dapat dirasakan secara luas dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar serta urusan pilihan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah yang adil, merata, dan berkelanjutan. Tugas dan fungsi tersebut dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas konektivitas antarwilayah.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR masih menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang bersifat struktural, teknis, maupun kelembagaan. Permasalahan yang muncul tidak hanya bersumber dari keterbatasan sumber daya, kapasitas pelaksanaan, dan dinamika kebijakan, tetapi juga dari tekanan lingkungan strategis, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, serta transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Di sisi lain, kebijakan nasional dan regional juga mempengaruhi arah pembangunan infrastruktur daerah. Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur menjadi keharusan dalam menyusun strategi pelayanan. Oleh karena itu, penting bagi Dinas PUPR untuk mengidentifikasi permasalahan nyata dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

sekaligus merumuskan isu-isu strategis yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra lima tahun ke depan. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah ini diidentifikasi melalui pendekatan partisipatif, berbasis data kinerja, telaah dokumen perencanaan, serta analisis kontekstual terhadap kondisi layanan dan tantangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto. Identifikasi ini juga merujuk pada evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya, kondisi eksisting tahun terakhir, serta dinamika lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja sektor pekerjaan umum dan penataan ruang. Selanjutnya, pada subbab berikut akan dipaparkan secara lebih rinci permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis yang harus direspon melalui arah kebijakan dan strategi Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto pada periode 2025–2029.

2.2.1 Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto menghadapi serangkaian permasalahan strategis yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Tantangan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga terkait dengan sistem pengelolaan yang ada. Permasalahan yang dihadapi mencakup sektor-sektor vital seperti irigasi, jalan, jembatan, air minum, sanitasi, drainase, bangunan gedung, pengelolaan sampah, jasa konstruksi, penataan ruang, hingga pelayanan perizinan. Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan koordinasi antara berbagai pihak terkait.

a. Pengelolaan Irigasi yang Belum Optimal

Salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto adalah pengelolaan jaringan irigasi yang belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh sistem perawatan dan rehabilitasi yang belum terprogram dengan baik. Infrastruktur irigasi yang tidak terpelihara dengan baik mengakibatkan kerusakan yang dapat mengganggu distribusi air untuk

pertanian. Selain itu, tata kelola sumber daya air yang terfragmentasi menjadi masalah yang lebih besar, di mana kebijakan sektoral berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga dan wilayah. Kurangnya investasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi menyebabkan infrastruktur irigasi rusak, meningkatkan potensi konflik antar pengguna air, serta menambah dampak buruk berupa polusi dan banjir.

b. Kondisi Jalan Kabupaten yang Belum Mantap

Permasalahan berikutnya adalah kondisi jalan kabupaten yang belum sepenuhnya berada dalam kondisi mantap. Ketidakmampuan untuk menyediakan pembiayaan alternatif, khususnya melalui skema keterlibatan pihak swasta, memperburuk situasi ini. Dengan ketergantungan yang tinggi pada dana APBD, perbaikan dan pemeliharaan jalan menjadi sangat terbatas. Selain itu, perencanaan kapasitas infrastruktur jalan yang kurang matang turut memperburuk kualitas jalan yang ada. Desain jalan yang belum sepenuhnya memperhitungkan peningkatan beban kendaraan dan intensitas lalu lintas, terutama pada koridor-koridor jalan strategis yang berfungsi sebagai penghubung antarwilayah dan pusat aktivitas, menyebabkan kerusakan jalan terjadi lebih cepat. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh pengaruh perubahan iklim yang ditandai dengan curah hujan ekstrem, sehingga mempercepat penurunan kualitas perkerasan dan berdampak pada menurunnya tingkat pelayanan transportasi secara keseluruhan.

c. Kondisi Jembatan yang kurang lebar

Kondisi jembatan yang belum optimal juga menjadi masalah besar yang menghambat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Mojokerto. Beberapa jembatan yang ada dalam kondisi rusak dan tidak terawat dengan baik menyebabkan gangguan terhadap mobilitas masyarakat dan barang. Ketiadaan sistem inspeksi berkala dan keterbatasan anggaran untuk program rehabilitasi jembatan memperburuk situasi ini. Tanpa perencanaan

teknis yang berkelanjutan, jembatan yang rusak dapat membahayakan keselamatan penggunaannya dan merusak infrastruktur transportasi yang ada.

d. Akses Air Minum Aman yang Terbatas

Akses terhadap air minum yang aman dan layak di Kabupaten Mojokerto masih menjadi permasalahan penting. Meski jaringan distribusi air sudah tersedia dan kapasitasnya cukup, pemanfaatan sumber daya ini masih sangat rendah, dengan tingkat sambungan PDAM atau non-PDAM yang tidak mencapai 30%. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam skema sambungan air minum yang tidak efektif. Meskipun kapasitas distribusi tersedia, banyak wilayah masih menghadapi masalah kekurangan air bersih, yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan penyambungan air untuk memastikan akses air minum yang merata dan terjangkau.

e. Akses Sanitasi Aman yang Masih Rendah

Akses terhadap sanitasi yang aman di Kabupaten Mojokerto masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kebijakan dan pendanaan yang ada, seperti belum adanya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang memadai. Selain itu, regulasi mengenai sanitasi juga masih lemah, dan pembiayaan untuk sistem sanitasi komunal sangat bergantung pada APBN atau APBD. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang sehat juga masih rendah, sehingga berpengaruh pada partisipasi mereka dalam program sanitasi berbasis masyarakat. Tanpa adanya perubahan signifikan dalam kebijakan dan penyuluhan kepada masyarakat, masalah sanitasi ini akan terus menghambat kualitas hidup masyarakat.

f. Pengelolaan Drainase yang Belum Terintegrasi

Sistem drainase yang ada di Kabupaten Mojokerto juga belum berfungsi optimal. Masalah utama terletak pada perencanaan dan pemeliharaan drainase yang lemah. Sebagian besar sistem drainase tidak terintegrasi

dengan perencanaan tata ruang yang ada, sehingga banyak saluran yang tersumbat oleh sampah dan bangunan liar. Selain itu, data aset drainase yang usang dan keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan memperburuk kondisi ini. Kurangnya kebijakan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah juga turut berkontribusi pada terjadinya genangan dan banjir yang merugikan.

g. Pengelolaan Bangunan Gedung yang Kurang Optimal

Pengelolaan bangunan gedung, terutama yang dimiliki oleh pemerintah, juga belum berjalan dengan baik. Banyak bangunan gedung pemerintah yang kondisinya tidak representatif akibat lemahnya sistem manajemen aset. Tidak adanya koordinasi yang baik antar sektor dalam penataan bangunan gedung menyebabkan banyak gedung yang tidak memiliki dokumen Standar Laik Fungsi (SLF) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya izin bangunan semakin memperburuk situasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan gedung pemerintah perlu lebih diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

h. Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS3R) yang Terbatas

Penyediaan tempat pengolahan sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) masih sangat terbatas, yang mengakibatkan pengelolaan sampah yang kurang efisien. Meskipun beberapa TPS3R atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) telah dibangun, namun banyak di antaranya yang belum dapat beroperasi secara maksimal karena kekurangan dana operasional dan lemahnya manajemen pengelolaan sampah di tingkat desa. Minimnya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta kurangnya pembinaan terhadap pengelola TPS3R di tingkat desa menjadi kendala besar dalam pengelolaan sampah yang lebih baik.

i. Kualitas Jasa Konstruksi yang Belum Memadai

Kualitas jasa konstruksi yang belum sesuai dengan standar juga menjadi salah satu masalah yang harus segera diselesaikan. Banyak pelaku jasa konstruksi yang masih belum memiliki kapasitas yang memadai, dan pengawasan terhadap mutu pekerjaan konstruksi juga masih lemah. Regulasi daerah yang terbatas, serta kurangnya tenaga ahli di bidang konstruksi, menyebabkan banyak proyek konstruksi yang tidak memenuhi standar yang diharapkan. Selain itu, pembinaan terhadap proyek swasta juga masih kurang optimal, sehingga mutu pekerjaan konstruksi tetap menjadi masalah yang harus diatasi.

j. Penataan Ruang yang Tidak Terkoordinasi

Dalam hal penataan ruang, terdapat pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Hal ini mencerminkan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang serta penegakan regulasi yang ada. Proses perencanaan tata ruang yang panjang dan birokratis, seperti revisi RTRW atau RDTR yang sering terlambat, menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan praktik pemanfaatan lahan. Tidak adanya mekanisme umpan balik yang efektif juga memperburuk kondisi ini, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang menjadi semakin sulit dilakukan.

k. Pelayanan Perizinan IMB (PBG) yang Tidak Efektif

Terakhir, pelayanan perizinan IMB atau PBG di Kabupaten Mojokerto masih menghadapi tantangan besar. Banyak bangunan yang dibangun tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Hal ini tidak terlepas dari prosedur pelayanan yang dianggap rumit dan kurang efisien. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya izin bangunan dan keselamatan bangunan semakin memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, reformasi dalam prosedur pelayanan dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

2.2.2 Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

Dalam rangka merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025–2029, identifikasi isu strategis menjadi langkah penting dalam proses perencanaan. Isu strategis merupakan kondisi, tantangan, atau peluang yang memerlukan perhatian dan respon kebijakan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto karena berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

Isu-isu strategis Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto tidak hanya berasal dari hasil evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya, tetapi juga mencerminkan dinamika permasalahan yang sedang dan akan dihadapi selama lima tahun ke depan, baik dari sisi teknis infrastruktur, tata kelola, hingga adaptasi terhadap perubahan kebijakan nasional dan global, seperti perubahan iklim, transformasi digital, serta dorongan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Perumusan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui proses identifikasi mendalam terhadap potensi kewenangan perangkat daerah, permasalahan aktual yang dihadapi, serta tantangan dan dinamika pembangunan ke depan. Isu strategis merupakan simpul penting yang menjadi dasar penetapan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah, khususnya dalam sektor pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tahapan perumusan diawali dengan mengidentifikasi potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas PUPR, seperti ketersediaan jaringan irigasi teknis, panjang jalan kabupaten, jembatan penghubung desa, jaringan drainase, sumber air baku, serta aset lahan dan bangunan pemerintah. Potensi tersebut kemudian dianalisis terhadap berbagai permasalahan utama yang muncul, baik dari aspek teknis (seperti kerusakan infrastruktur, backlog pemeliharaan), aspek kelembagaan (seperti lemahnya pengawasan dan koordinasi), maupun aspek pendanaan dan regulasi.

Setiap permasalahan tersebut dikaitkan dengan isu yang relevan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), antara lain terkait keberlanjutan pengelolaan sumber daya air, adaptasi terhadap perubahan iklim, mitigasi bencana, hingga konservasi tata ruang. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan.

Lebih lanjut, perumusan isu strategis mempertimbangkan pula konteks global, seperti peningkatan frekuensi cuaca ekstrem, tekanan terhadap air bersih, degradasi infrastruktur akibat perubahan iklim, serta target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 6 (akses air dan sanitasi) dan SDG 11 (kota yang berkelanjutan).

Selain itu, isu nasional yang tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RKP, RPJMN, serta kebijakan sektoral turut menjadi acuan penting, termasuk program revitalisasi irigasi, pembangunan jalan daerah, mitigasi banjir, dan pelayanan air minum dan sanitasi dasar. Isu regional juga diperhatikan, seperti tekanan pembangunan di DAS Brantas, koridor logistik di Jawa Timur, dan ketentuan RTRW provinsi.

Seluruh rangkaian analisis tersebut telah disarikan dan dijelaskan secara sistematis dalam tabel perumusan isu strategis yang memuat kolom: potensi daerah, permasalahan, isu KLHS, isu global, isu nasional, isu regional, dan isu strategis perangkat daerah. Tabel ini tidak hanya menggambarkan kondisi eksisting dan tantangan aktual, tetapi juga menyajikan arah respons strategis yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan lima tahunan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.

Dengan pendekatan ini, Dinas PUPR memastikan bahwa isu strategis yang dirumuskan bersifat relevan, kontekstual, dan mampu menjembatani antara tantangan lapangan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan dalam skala lokal, nasional, hingga global. Berikut adalah tabel perumusan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto :

**Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto**

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global yang Relevan dengan PD	Isu Nasional yang Relevan dengan PD	Isu Regional yang Relevan dengan PD	Isu Strategis PD
1	Jaringan irigasi teknis seluas ribuan ha, dengan saluran induk berkapasitas besar	Sistem perawatan dan rehabilitasi irigasi tidak terprogram yang mengakibatkan banyak saluran jebol, suplai air tak merata	Pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim	pola hujan ekstrem & kekeringan semakin sering	program revitalisasi irigasi (Perpres MP3EI)	tekanan alih fungsi lahan hulu DAS Brantas	Revitalisasi & rehabilitasi sistem irigasi berbasis partisipasi petani, teknologi pasang-surut otomatis
2	Panjang jalan kabupaten 1.166,389 km, penghubung antar-kecamatan dan pusat-pusat ekonomi lokal	Kemantapan jalan belum 100%, backlog pemeliharaan besar, kerusakan cepat akibat beban lalu lintas dan cuaca ekstrem	Infrastruktur transportasi rendah karbon dan tahan iklim ekstrem	suhu & curah naik yang mempercepat degradasi aspal	Program Peningkatan Jalan Kabupaten (RKP)	Koridor Logistik Jawa Timur	Pemeliharaan rutin terjadwal; penggunaan material tahan cuaca; skema pembiayaan swasta untuk road fund
3	650 jembatan kecil-menengah yang menghubungkan desa-desa di seluruh kecamatan	Inspeksi tidak rutin sehingga banyak jembatan retak atau amblas, mengganggu konektivitas	Keselamatan infrastruktur tahan bencana, mitigasi risiko banjir	intensitas banjir dan arus deras meningkat	program mitigasi banjir & TPJN	peningkatan debit banjir DAS Brantas	Bangun sistem inspeksi digital berkala; prioritas rehabilitasi jembatan rawan
4	Jaringan drainase primer & sekunder di kawasan permukiman dan pusat kota Mojokerto	Sering terjadi genangan air di titik-titik kritis, drainase sempit & tersumbat sampah	Pengelolaan air limpasan urban (urban runoff)	hujan lebat lebih sering yang mengakibatkan limpasan tinggi	Kebijakan Ketahanan Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim	titik banjir DAS Brantas	Desain & bangun drainase terpadu dan green infrastructure; jadwal rutin pembersihan

N o	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Global yang Relevan dengan PD	Isu Nasional yang Relevan dengan PD	Isu Regional yang Relevan dengan PD	Isu Strategis PD
							han & pemantauan tertib
5	Sumber mata air lereng Gunung Penanggungan & potensi sumur bor di zona rural	Cakupan layanan air minum aman rendah (< 30 %), banyak wilayah “white spot” tanpa akses PDAM	Akses air minum dan sanitasi layak (SDG 6)	target SDG 6 untuk air bersih & sanitasi	program 100-0-100 (air-sanitasi-limbah)	SPAM Regional Brantas	Perluas SPAM terpadu, subsidi sambungan rumah tangga, konservasi dan recharge area sumber mata air
6	Luas lahan siap pakai untuk pemukiman, industri & zona konservasi, plus koleksi aset bangunan pemerintah	Banyak perubahan fungsi lahan ilegal & bangunan tanpa izin; RDTR/RT RW molor; pengawasan pengelolaan aset lemah	Tata ruang berkelanjutan & konservasi ekosistem	urbanisasi tekan habitat alami	RTRWN & OSS perizinan online	RTRW Jatim & zona ekonomi khusus	Percepat revisi RDTR/RT RW, digitalisasi PBG (IMB), sosialisasi & penegakan aturan tata ruang dan bangunan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto menetapkan enam isu strategis utama, yang tercantum dalam *Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto* yaitu :

1. Revitalisasi & Rehabilitasi Sistem Irigasi Berbasis Partisipasi Petani

Pengelolaan sistem irigasi teknis memerlukan pembaruan menyeluruh seiring dengan tantangan perubahan iklim, degradasi jaringan, serta meningkatnya kebutuhan produktivitas pertanian. Dinas PUPR perlu mendorong revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang mencakup

penerapan teknologi modern, seperti sistem pasang-surut otomatis, dan penguatan partisipasi kelompok tani dalam operasi dan pemeliharaan. Pendekatan berbasis partisipasi menjamin keberlanjutan sistem serta efektivitas distribusi air untuk pertanian.

2. Pemeliharaan Jalan Kabupaten dengan Skema Berkelanjutan

Jaringan jalan kabupaten sepanjang lebih dari seribu kilometer merupakan tulang punggung konektivitas lokal dan regional. Dalam konteks tersebut, pengelolaan jaringan jalan perlu dipandang sebagai satu kesatuan sistem berbasis koridor strategis, yang menghubungkan pusat pertumbuhan, kawasan permukiman, serta simpul-simpul kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Diperlukan pemeliharaan rutin berbasis jadwal yang tertib, penggunaan material yang adaptif terhadap karakteristik iklim tropis (tahan panas dan hujan ekstrem), serta optimalisasi skema pembiayaan alternatif, seperti kemitraan dengan sektor swasta melalui road fund atau pembiayaan berbasis kinerja (*performance-based maintenance*). Selain itu, Dinas PUPR perlu memperkuat unit monitoring teknis jalan serta pemetaan prioritas penanganan berbasis fungsi dan peran koridor jalan guna menjamin keberlanjutan pelayanan infrastruktur, mendukung mobilitas masyarakat, dan memperlancar distribusi logistik daerah. Sebagai bagian dari penguatan perencanaan jaringan jalan, Dinas PUPR telah melakukan penajaman arah kebijakan melalui proses pembahasan dan kesepakatan internal lintas unit kerja terkait penetapan koridor jalan strategis. Proses tersebut menjadi dasar dalam memetakan peran dan fungsi jalan dalam satu kesatuan jaringan, sehingga isu konektivitas wilayah dan kemantapan jalan dapat ditangani secara lebih terarah dan konsisten dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

3. Sistem Inspeksi Digital untuk Jembatan dan Prioritas Rehabilitasi

Dengan jumlah jembatan kecil hingga menengah yang mencapai ratusan unit, sistem pemantauan dan inspeksi berkala berbasis teknologi informasi menjadi keharusan. Penerapan sistem inspeksi digital memungkinkan

pendeteksian dini terhadap kerusakan struktural serta penjadwalan perawatan preventif. Dinas PUPR juga perlu menetapkan prioritas rehabilitasi jembatan berdasarkan klasifikasi risiko dan intensitas lalu lintas guna mencegah potensi kegagalan infrastruktur dan menjamin keselamatan transportasi.

4. Drainase Terpadu dan Infrastruktur Hijau (Green Infrastructure)

Peningkatan kejadian banjir lokal menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pengelolaan drainase. Dinas PUPR didorong untuk mendesain dan membangun sistem drainase terpadu yang menggabungkan solusi teknis (saluran primer–sekunder) dan solusi alami (infrastruktur hijau seperti biopori, sumur resapan, taman hujan). Jadwal pembersihan rutin, pemantauan partisipatif, dan penegakan tertib fungsi saluran juga perlu dijalankan untuk menjaga efektivitas sistem dan mengurangi beban limpasan air hujan.

5. Perluasan SPAM Terpadu dan Konservasi Sumber Air

Akses air minum yang layak merupakan target prioritas yang sejalan dengan SDG 6. Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR harus memperluas cakupan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terpadu, mendorong pemberian subsidi sambungan rumah tangga tidak mampu, serta memperkuat program konservasi mata air dan zona *recharge* air tanah, khususnya di wilayah lereng dan perdesaan. Sinergi dengan PDAM, masyarakat, dan mitra pembangunan menjadi kunci keberhasilan program ini.

6. Revisi RDTR/RTRW dan Penyederhanaan Perizinan Bangunan

Dinamisnya pertumbuhan kawasan permukiman dan industri membutuhkan penyesuaian tata ruang yang cepat dan adaptif. Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan RTRW perlu dipercepat agar sejalan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Penyederhanaan perizinan bangunan (PBG/IMB), penyebaran informasi tata ruang secara luas, dan penguatan penegakan aturan menjadi langkah strategis untuk mengarahkan

pembangunan sesuai daya dukung lingkungan dan menghindari konflik pemanfaatan ruang.

BAB III

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto merupakan tahapan penting dalam rangkaian proses perencanaan strategis perangkat daerah. Bab ini memuat arah pembangunan jangka menengah Dinas PUPR yang dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi capaian periode sebelumnya, permasalahan dan isu strategis daerah, serta mengacu pada arah pembangunan jangka menengah daerah dan nasional.

Penetapan Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto didasarkan pada amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang mengarahkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Renstra secara terintegrasi dengan dokumen RPJMD, memperhatikan sinergi pencapaian visi-misi kepala daerah, serta mendukung prioritas pembangunan nasional dan agenda global seperti Nawacita, Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJPN, Asta Cita, dan Catur Abhyasa.

Dalam konteks tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto memiliki tanggung jawab strategis untuk mendukung Misi Kepala Daerah, khususnya pada Misi 4, yaitu "Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan". Misi ini menjadi landasan utama dalam penentuan tujuan dan sasaran jangka menengah yang berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar, penguatan sistem jaringan jalan, peningkatan layanan air minum dan sanitasi, serta perwujudan tata ruang yang berkelanjutan.

Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan yang disusun dalam bab ini menjadi panduan teknokratis Dinas PUPR dalam merespons tantangan pembangunan daerah, sekaligus sebagai landasan operasional dalam

penyusunan program, kegiatan, dan anggaran secara lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

VISI KEPALA DAERAH

DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 2025 - 2029

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur”

Penjabaran Visi

Visi tersebut merupakan cerminan dari tekad dan komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mewujudkan transformasi Kabupaten Mojokerto ke arah yang lebih baik pada periode lima tahun ke depan. **Kata kunci “LEBIH”** dalam visi mengandung semangat perubahan progresif, bukan sekadar keberlanjutan dari kepemimpinan sebelumnya, melainkan akselerasi pembangunan dengan pendekatan kolaboratif dan kerja nyata.

Melalui semangat “AYO BARENG GUS BARRA DAN dr. RIZAL”, seluruh elemen masyarakat didorong untuk bersatu padu dalam proses pembangunan, menyumbangkan daya, upaya, dan pemikiran untuk menghadirkan Mojokerto yang lebih maju secara ekonomi, lebih adil dalam distribusi pembangunan, serta lebih makmur dalam kesejahteraan masyarakat.

Makna “Lebih Maju”

“Lebih Maju” mengandung arti peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Mojokerto, baik secara makro maupun mikro. Kemajuan ini diukur dari meningkatnya daya saing daerah, penguatan potensi lokal, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi tantangan global.

Makna “Lebih Adil”

“Lebih Adil” menekankan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Pembangunan diarahkan agar memberikan kesempatan setara bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam hal peran serta (sebagai pelaku pembangunan) maupun akses terhadap manfaat pembangunan. Pemerataan ini mencakup wilayah pedesaan maupun perkotaan, serta kelompok masyarakat rentan.

Makna “Lebih Makmur”

“Lebih Makmur” dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, serta pelayanan publik. Pemerintah daerah berkomitmen menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kualitas hidup masyarakat, menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Misi

Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai **"Catur Abhipraya Mubarak"**. Branding misi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Mojokerto di periode 2025-2029.

"Catur Abhipraya Mubarak" berasal dari gabungan tiga kata yang sarat makna:

- Catur berarti "empat", merujuk pada empat pilar misi pembangunan.
- Abhipraya bermakna "harapan dan cita-cita mulia", yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif.
- Mubarak diambil dari akronim nama pemimpin Kabupaten Mojokerto, yang juga berarti "berkah", menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam **"Catur Abhipraya Mubarak"** sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketenteraman Masyarakat;
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Misi yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto adalah **Misi 4**

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan”

Penjelasan Umum

Pembangunan infrastruktur merupakan pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat pelayanan publik, serta menjamin konektivitas antarwilayah. Dalam Misi keempat ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai kebijakan strategis yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh sektor—baik fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual dan kemampuan fiskal daerah, serta membuka peluang kerja sama pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah, termasuk dengan sektor swasta. Infrastruktur yang dimaksud meliputi jalan dan jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, pusat layanan umum, hingga infrastruktur digital dan mitigasi bencana.

Tujuan Misi 4:

- Mewujudkan **pemerataan dan perluasan pembangunan** infrastruktur berkelanjutan disemua sektor.

Sasaran Misi 4:

- Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas **Infrastruktur Dasar**.
- Terwujudnya **lingkungan hidup** yang berkualitas.
- Meningkatnya **Ketahanan Daerah** Terhadap Bencana.

Program Strategis Pendukung Misi 4:

1. **Pembangunan dan Perbaikan Jalan**, serta konstruksi **jembatan penghubung** antar wilayah strategis.
2. **Pengembangan sistem air bersih dan sanitasi**, terutama untuk wilayah pedesaan dan daerah rawan air.
3. **Pembangunan infrastruktur layanan publik** seperti sekolah, puskesmas, dan fasilitas pemerintahan.
4. **Pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan**, guna memperkuat ketahanan pangan daerah.
5. **Pengelolaan dan pelestarian lingkungan**, termasuk konservasi daerah aliran sungai dan kawasan rawan bencana.
6. **Pengembangan infrastruktur digital**, untuk mendukung layanan pemerintahan dan ekonomi digital berbasis desa.
7. **Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata**, termasuk akses dan fasilitas pendukung destinasi wisata.
8. **Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana** dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana.

Program Prioritas Daerah:

1. **Pembangunan Sport Center berskala nasional** sebagai pusat olahraga dan kegiatan masyarakat.
2. **Pembangunan waduk (embung) di wilayah utara sungai**, untuk kebutuhan irigasi dan konservasi air.

3. **Penyediaan sumur dalam (sumur pantek)** guna mengantisipasi kekeringan dan menjaga ketahanan air bersih.
4. **Pembangunan Fly Over Simpang Lima Kenanten**, sebagai solusi kemacetan kawasan padat lalu lintas (bersifat kolaboratif).
5. **Pengembangan wilayah perbatasan**, untuk memperkuat integrasi kawasan Mojokerto dengan daerah sekitarnya.
6. **Pembangunan Jalan Tol Gempol-Mojokerto**, dalam rangka mendukung pelaksanaan **Perpres Nomor 80 Tahun 2019** tentang percepatan pembangunan kawasan strategis nasional (GERBANGKERTOSUSILO, Bromo-Tengger-Semeru, Selingkar Wilis, dan Lintas Selatan).
7. **Program Bedah Rumah**, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui hunian yang layak.
8. **Pindah lokasi pusat pemerintahan** dari wilayah Kota Mojokerto ke wilayah Kabupaten Mojokerto.

Dalam kerangka mewujudkan visi “Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur”, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto memiliki peran vital dalam penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, konektivitas wilayah, serta ketahanan lingkungan. Sejalan dengan Misi Keempat Kepala Daerah yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor” serta dalam kerangka tujuan “Mewujudkan **pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur** di seluruh sektor kehidupan masyarakat”, dan Sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas **Infrastruktur Dasar**”, maka Dinas PUPR menetapkan **Tujuan : Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik.**

Tujuan ini lahir dari berbagai dinamika, potensi, dan tantangan pembangunan daerah. Potensi infrastruktur Kabupaten Mojokerto sangat luas meliputi ribuan kilometer jalan kabupaten, ratusan jembatan strategis, jaringan irigasi teknis yang melayani ribuan hektare lahan pertanian, drainase kawasan perkotaan dan pedesaan, hingga aset infrastruktur air minum dan sanitasi dasar. Di sisi lain, berbagai isu global seperti perubahan

iklim, pola hujan ekstrem, serta tantangan nasional seperti revitalisasi irigasi dan konektivitas antarwilayah, menuntut agar infrastruktur yang ada tidak hanya tersedia, tetapi juga berfungsi optimal dan dalam kondisi baik.

Dinas PUPR memandang bahwa kondisi baik infrastruktur merupakan indikator keberhasilan utama pembangunan. Hal ini mencerminkan kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus ketahanan fisik terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Infrastruktur yang dalam kondisi baik akan mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang, meningkatkan keselamatan pengguna, dan mempercepat mobilitas ekonomi.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, Dinas PUPR menetapkan indikator kinerja yaitu:

Persentase infrastruktur dalam kondisi baik,

yang mencakup jalan kabupaten, jembatan, jaringan irigasi, sistem drainase, TPS3R, dan infrastruktur air minum dan sanitasi dasar serta Bangunan Gedung Pemerintah yang dinyatakan berfungsi sesuai standar teknis.

Definisi : proporsi infrastruktur daerah yang berada dalam kondisi baik dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kontribusi relatif dari tiap jenis infrastruktur.

Formulasi : Persentase Infrastruktur Kondisi Baik (Ik) = $(G1 \times W1) + (G2 \times W2) + \dots + (Gn \times Wn)$

Keterangan :

- Gi : besaran infrastruktur kondisi baik/layak (sesuai standar tiap komponen).
- Wi : bobot komponen i (desimal), Jumlah $Wi=1$
 - **Bobot Komponen :** Jalan 0,25, Jembatan 0,10, Irigasi 0,10, Air Minum 0,15, Air Limbah Domestik 0,10, Drainase 0,10, TPS3R 0,05, Gedung Pemda 0,10, dan Utilitas Umum/PSU 0,05.
- N : jumlah jenis infrastruktur yang dinilai

Sumber : Survei dan laporan teknis kondisi infrastruktur

Melalui strategi pemeliharaan rutin terjadwal, rehabilitasi berbasis teknologi, pengawasan berkala, serta pembangunan baru yang adaptif terhadap iklim dan bencana, Dinas PUPR menargetkan peningkatan proporsi infrastruktur yang memenuhi kategori “baik” setiap tahunnya. Kolaborasi dengan perangkat daerah lain, dunia usaha, serta peran masyarakat juga menjadi kunci percepatan pencapaian tujuan ini.

Dengan fokus tersebut, Dinas PUPR tidak hanya memperkuat fondasi fisik pembangunan daerah, tetapi juga mewujudkan pelayanan infrastruktur yang adil, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Untuk memastikan pencapaian tujuan strategis “*meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik*”, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto menetapkan **11 sasaran** yang diperkuat oleh indikator kinerja terukur. Setiap sasaran dirancang untuk menjawab tantangan spesifik sektor infrastruktur, sekaligus mendukung indikator utama berupa **persentase infrastruktur dalam kondisi baik**, yang mencakup aspek jalan, jembatan, irigasi, drainase, air minum, dan sanitasi.

Berikut adalah rincian sasaran dan indikatornya:

1. **Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air**

- **Indikator: Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi**

Fokus pada pemenuhan layanan irigasi teknis untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan lahan pertanian.

Definisi: Luas area irigasi yang berfungsi dibandingkan total luas daerah irigasi kewenangan kabupaten.

Formulasi : $(\text{Luas irigasi berfungsi} \div \text{total luas irigasi}) \times 100\%$

Sumber: Dinas PUPR (Data Irigasi)

2. **Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)**

- **Indikator: Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (SPAM)**

Mendorong peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat.

Definisi: Rumah tangga yang menikmati layanan SPAM standar layak.

Formulasi: $(\text{Jumlah rumah tangga dengan akses SPAM} \div \text{total rumah tangga}) \times 100\%$

Sumber: Dinas PUPR (Data SPAM)

3. **Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan**

- **Indikator: Persentase desa dengan TPS/TPST/TPS3R**

Mendukung pengurangan pencemaran dan tata kelola sampah yang berkelanjutan.

Definisi: Desa yang memiliki minimal satu fasilitas TPS/TPST/TPS3R aktif.

Formulasi: $(\text{Jumlah desa dengan TPS/TPST/TPS3R} \div \text{total desa}) \times 100\%$

Sumber: Dinas PUPR (Data Pembangunan sarana pengelolaan sampah)

4. **Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik**

- **Indikator: Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**

Menjawab kebutuhan sanitasi dasar demi kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Definisi: Rumah tangga yang terhubung ke sistem pengolahan limbah domestik (IPLT/SPALD).

Formulasi: $(\text{Jumlah rumah tangga terlayani pengolahan limbah} \div \text{total rumah tangga}) \times 100\%$

Sumber: Dinas PUPR (Data Air Limbah)

5. **Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir di perkotaan dan lingkungan**

- **Indikator: Persentase kawasan yang memiliki sistem drainase dalam kondisi baik**

Meningkatkan ketahanan kawasan terhadap genangan dan banjir lokal.

Definisi: Lingkungan perkotaan dengan sistem drainase berfungsi optimal.

Formulasi: $(\text{Jumlah lingkungan dengan drainase baik} \div \text{total lingkungan perkotaan}) \times 100\%$

Sumber: Dinas PUPR (Survey Drainase)

6. **Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung**

- **Indikator: Rasio bangunan gedung dalam kondisi baik dan laik fungsi**

Menjamin keselamatan, efisiensi energi, dan estetika bangunan publik dan privat.

Definisi: Bangunan gedung pemerintah dengan status laik fungsi aktif.

Formulasi: $(\text{Jumlah bangunan laik fungsi} \div \text{total bangunan pemerintah}) \times 100\%$

Sumber: Dinas PUPR (Data Teknis Bangunan Gedung)

7. **Meningkatnya kemantapan jalan**

- **Indikator: Tingkat kemantapan jalan kabupaten**

Menjadi salah satu indikator utama kelancaran konektivitas dan ekonomi lokal.

Definisi: Jalan kabupaten dengan kondisi mantap (baik & sedang).

Formulasi: $(\text{Panjang jalan kondisi mantap} \div \text{total panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$

Sumber: Dinas PUPR (Survey Kondisi Jalan)

8. **Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi**

- **Indikator: Rasio tenaga operator/teknisi/analisis bersertifikat kompetensi**

Memastikan pembangunan dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten.

Definisi: Tenaga kerja jasa konstruksi bersertifikat kompetensi.

Formula: $(\text{Jumlah tenaga kerja bersertifikat} \div \text{total tenaga kerja terdaftar}) \times 100\%$

Sumber: LPJK, Dinas PUPR (Bidang Jasa Konstruksi)

9. **Meningkatnya kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang**

- **Indikator:**

- **Persentase pembangunan yang selaras dengan RTRW**

Mewujudkan pembangunan yang tertib, efisien lahan, dan berkelanjutan.

Definisi: Kegiatan pembangunan yang sesuai RTRW.

Formulasi: $(\text{Jumlah kegiatan pembangunan sesuai RTRW} \div \text{total kegiatan pembangunan}) \times 100\%$

Sumber: Dinas PUPR (Pengendalian Tata Ruang)

- **Persentase kecamatan dengan RDTR yang lengkap**

Mewujudkan pembangunan yang tertib, efisien lahan, dan berkelanjutan.

Definisi: Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR dibandingkan total kecamatan.

Formulasi: $(\text{Jumlah kecamatan dengan RDTR} \div \text{total kecamatan}) \times 100\%$

Sumber: Dinas PUPR (Data Penataan Ruang)

10. **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

- **Indikator:**

- **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Menguatkan pondasi tata kelola lembaga agar responsif dan berbasis kinerja.

Definisi : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang mencerminkan tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.

Formulasi : Skor/nilai SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PANRB berdasarkan hasil evaluasi atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Sumber : Hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat Daerah (laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).

Dengan kerangka sasaran dan indikator ini, Dinas PUPR menegaskan pendekatannya yang **terukur, terarah, dan berbasis data** untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya tersedia, tetapi juga **berfungsi optimal, adaptif, dan berdaya guna jangka panjang**. Berikut kami sajikan Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR Tahun 2025-2029 :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto

NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik		Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	70,58 %	71,03 %	71,67 %	72,16 %	72,65 %	73,29 %	73,78%

N O	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1 Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air	1 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			2 Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)	2 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (SPAM)	95,50 %	97,00 %	97,50 %	98,00 %	99,50 %	100,00 %	100,00 %
			3 Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan	3 Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10,00 %	11,00 %	12,00 %	13,00 %	14,00 %	15,00 %	15,00 %

N O	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4 Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	4 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			5 Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir di perkotaan dan lingkungan	5 Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase dengan kondisi baik	21,00 %	22,00 %	23,00 %	24,00 %	25,00 %	26,00 %	26,00 %
			6 Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	6 Rasio Bangunan Gedung kondisi baik dan laik fungsi	11,00 %	12,00 %	13,00 %	14,00 %	15,00 %	16,00 %	16,00 %

N O	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7 Meningkatkan kemantapan jalan	7 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	84,00 %	85,00 %	86,00 %	87,00 %	88,00 %	89,00 %	89,00%
			8 Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	8 Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	52,00 %	53,00 %	54,00 %	55,00 %	56,00 %	57,00 %	57,00%
			9 Meningkatkan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang	09.01 Persentase pembangunan daerah yang selaras dengan RTRW	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

N O	NSPK/SASA RAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDI SI AKHIR PERIO DE RENT RA PD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09.0 2 Persentase wilayah kecamatan yang telah dilengkapi dengan RDTR	5,56%	11,11%	16,67%	22,22%	27,78%	33,33%	33,33%
			10.0 1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	10.0 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,50	82,80	83,10	83,40	83,70	84,00	84,00

3.2 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk menjawab berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur yang andal, berfungsi optimal, dan tahan terhadap perubahan iklim maupun dinamika wilayah, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto merumuskan **11 strategi utama**. Strategi-strategi ini disusun agar sejalan dengan prinsip efektivitas perencanaan, efisiensi sumber daya, serta berorientasi pada hasil yang terukur dan berkelanjutan.

1. **Penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan jaringan irigasi**

Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan layanan irigasi secara teknis dan terintegrasi. Melalui sistem perencanaan yang berbasis data dan pengelolaan partisipatif, kualitas dan kontinuitas pasokan air irigasi dapat dijaga, mendukung produktivitas pertanian, serta mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan atau kelebihan air.

2. **Penyediaan infrastruktur SPAM berbasis kawasan**

Fokus strategi ini adalah memperluas akses air bersih melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terencana secara spasial dan sesuai kebutuhan lokal. Pendekatan berbasis kawasan memastikan efisiensi investasi, penyebaran layanan yang merata, dan pengurangan beban pada sumber air eksisting.

3. **Peningkatan pembangunan dan pengoperasian TPS3R/TPST**

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola sampah dari hulu ke hilir dengan membangun dan mengoperasikan tempat pengolahan sampah yang sesuai standar. Sistem TPS3R dan TPST tidak hanya mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi sirkular di masyarakat.

4. **Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik**

Strategi ini mendukung penguatan infrastruktur sanitasi dengan membangun IPAL komunal, tangki septik kedap, dan sistem pengolahan air limbah lainnya. Dengan pendekatan teknologi tepat

guna dan kolaboratif, strategi ini bertujuan menjaga lingkungan permukiman yang sehat dan aman.

5. **Revitalisasi dan pengembangan sistem drainase perkotaan dan lingkungan**

Strategi ini fokus pada penataan dan rehabilitasi sistem drainase untuk mengurangi genangan dan banjir di wilayah perkotaan maupun permukiman padat. Pendekatan berbasis kawasan, disertai pemeliharaan rutin dan adaptasi terhadap curah hujan ekstrem, menjadi prioritas utama.

6. **Penguatan pengawasan dan penerbitan SLF dan PBG**

Strategi ini mendukung penataan bangunan gedung melalui peningkatan kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan administratif, seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pengawasan yang efektif akan menjamin keselamatan, fungsi, dan estetika bangunan di wilayah kabupaten.

7. **Optimalisasi pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan**

Melalui strategi ini, Dinas PUPR berupaya memastikan kemantapan jalan kabupaten melalui kombinasi pembangunan jalan baru, rehabilitasi jalan rusak, dan pemeliharaan rutin berbasis data kondisi jalan, dengan pendekatan pengelolaan jaringan jalan berbasis koridor strategis yang telah disepakati secara internal sebagai arah prioritas penanganan. Pendekatan ini diarahkan untuk menjaga kesinambungan fungsi jalan sebagai penghubung antarwilayah, pusat pertumbuhan, kawasan permukiman, serta simpul kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Dengan demikian, strategi ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran, serta mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

8. **Peningkatan kompetensi SDM jasa konstruksi**

Strategi ini diarahkan untuk mencetak tenaga konstruksi lokal yang profesional dan tersertifikasi. Pelatihan teknis, uji kompetensi, dan peningkatan mutu tenaga kerja menjadi kunci dalam menjamin kualitas infrastruktur yang dibangun.

9. **Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang**

Dinas PUPR mendorong strategi ini untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur sesuai dengan RTRW dan RDTR yang berlaku. Pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat akan meminimalisasi konflik tata ruang, memperkuat ketahanan kawasan, dan mendukung pertumbuhan yang terencana.

10. **Optimalisasi implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi**

Strategi ini mencerminkan komitmen kelembagaan dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas birokrasi. Melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi, Dinas PUPR membangun tata kelola organisasi yang adaptif dan berorientasi hasil. Selain daripada SAKIP, **Pengembangan inovasi pelayanan publik di bidang PUPR** yang berfokus pada penciptaan dan penguatan inovasi, baik dalam sistem layanan, metode kerja, maupun penggunaan teknologi. Inovasi yang bernilai tambah dan berdampak langsung bagi masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik dan mempercepat transformasi pelayanan infrastruktur.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut secara konsisten, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto akan mampu mempercepat peningkatan infrastruktur yang **berkualitas, fungsional, dan tahan terhadap tantangan masa depan**, serta secara langsung mendukung terwujudnya *Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur*.

Strategi Renstra PD Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan komprehensif yang memuat langkah-langkah operasional, pengelolaan sumber daya, serta penentuan fokus program dan kegiatan untuk menjawab tantangan pembangunan yang dinamis. Strategi ini berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas PUPR, melalui pelaksanaan program secara bertahap, sinergis, dan adaptif.

Penahapan pembangunan adalah bentuk konkret dari pendekatan strategis tersebut. Tahapan ini menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang

disusun secara bertingkat, mulai dari pemulihan kondisi dasar infrastruktur, penguatan sistem layanan, hingga konsolidasi dan inovasi pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya penahapan ini, program dan kegiatan PUPR akan berjalan lebih fokus, terukur, dan berdampak nyata terhadap pelayanan publik serta pembangunan daerah.

Berikut ini adalah Tabel Penahapan Renstra PD Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto:

**Tabel 3.4 Penahapan Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Konsolidasi data dan baseline kondisi infrastruktur. Pemetaan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan teknis, serta percepatan penyusunan dokumen perencanaan (RTRW, RDTR, DED, masterplan drainase, irigasi, SPAM, dsb).	Peningkatan layanan dasar infrastruktur melalui pelaksanaan pembangunan irigasi, jalan, SPAM, TPS3R, dan drainase. Fokus pada intervensi wilayah rentan dan backlog layanan.	Rehabilitasi dan revitalisasi infrastruktur eksisting. Penguatan pengawasan teknis, efisiensi sistem operasional, dan perluasan cakupan wilayah layanan (akses air minum, sanitasi, kemantapan jalan, dll).	Integrasi antar sektor dan inovasi pembangunan. Penerapan standar teknis berbasis perubahan iklim, digitalisasi layanan teknis, serta penguatan kolaborasi multipihak (masyarakat, swasta, pemerintah desa).	Konsolidasi capaian, penyempurnaan sistem monitoring-evaluasi, serta replikasi praktik baik. Meningkatkan kesinambungan infrastruktur melalui sistem pemeliharaan yang cerdas, pendanaan alternatif, dan manajemen risiko jangka panjang.

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan panduan teknis dan operasional yang akan dijalankan secara konsisten oleh Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan **kebutuhan masyarakat, kebijakan nasional, serta visi daerah yang lebih maju, adil, dan makmur.** Berikut kami sajikan tabel Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Dinas PUPR Tahun 2025-2029 :

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penyusunan program peningkatan, rehabilitasi irigasi dan pemeliharaan jaringan rutin	Mendukung pencapaian target pelayanan dasar pertanian dan ketahanan pangan
		Pengembangan SPAM skala kecil dan optimalisasi idle capacity	Mendukung target akses aman air minum nasional
		Penyediaan sarana dan prasarana TPS3R berbasis desa/kelurahan	Mendukung target pengurangan sampah rumah tangga dan lingkungan bersih

Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
		Pembangunan IPLT dan promosi SPAL komunal berbasis masyarakat	Mendukung target akses sanitasi layak dan pengendalian pencemaran lingkungan
	Memperkuat Ketahanan melalui Penguatan usaha Pemeliharaan dan Pelestarian Sosial, budaya, dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan wilayah	Pemetaan kawasan rawan genangan dan pembangunan drainase baru	Mendukung pengurangan risiko bencana banjir
	Hilirisasi SDA melalui penyediaan Infrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan per kapita	Pemeliharaan berkala dan pembangunan jalan strategis kabupaten	Mendukung akses ekonomi wilayah dan mobilitas masyarakat
		Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan pembinaan jasa konstruksi lokal	Mendukung kualitas pembangunan infrastruktur yang sesuai standar
	Penyediaan keamanan, ketertiban, dan stabilitas serta supremasi hukum sebagai landasan	Penyusunan dan percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR	Mendukung kepastian hukum pemanfaatan ruang

Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
	transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan berpengaruh bagi kedamaian ketenteraman Wilayah		
		Penyusunan regulasi teknis bangunan gedung dan simplifikasi perizinan	Mendukung kepastian hukum dan iklim investasi
	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	Peningkatan kinerja perangkat daerah berbasis kinerja dan akuntabilitas	Mendukung efektivitas pencapaian target pembangunan
		Penciptaan, sosialisasi, dan replikasi inovasi berbasis kebutuhan masyarakat	Mendukung transformasi birokrasi dan pelayanan publik digital

Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto menetapkan **sebelas arah kebijakan utama**. Kebijakan-kebijakan ini menjadi turunan langsung dari strategi pembangunan dan dijalankan melalui program, kegiatan, serta regulasi teknis yang berbasis kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

1. **Penyusunan program peningkatan, rehabilitasi irigasi, dan pemeliharaan jaringan rutin**

Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga keberfungsian sistem irigasi teknis secara berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis data dan siklus pemeliharaan teratur. Rehabilitasi jaringan irigasi yang

rusak dan peningkatan saluran pendukung akan memperkuat ketahanan pangan dan menjaga produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Mojokerto.

2. **Pengembangan SPAM skala kecil dan optimalisasi idle capacity**

Fokus kebijakan ini adalah memperluas akses air minum layak melalui pengembangan SPAM berbasis kawasan kecil (komunal atau desa), serta mengoptimalkan sistem SPAM eksisting yang belum dimanfaatkan secara maksimal (idle capacity). Kebijakan ini menargetkan efisiensi investasi dan peningkatan cakupan layanan air minum hingga ke pelosok.

3. **Penyediaan sarana dan prasarana TPS3R berbasis desa/kelurahan**

Dengan memperkuat pengelolaan sampah dari level terbawah, kebijakan ini mendorong pembangunan fasilitas TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang berbasis partisipasi masyarakat. Sarana ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menumbuhkan kesadaran lingkungan dan peluang ekonomi lokal.

4. **Pembangunan IPLT dan promosi SPAL komunal berbasis masyarakat**

Arah kebijakan ini berfokus pada pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan memperluas sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL) komunal. Pendekatan berbasis masyarakat mendorong keberlanjutan pengelolaan limbah secara murah, efisien, dan higienis.

5. **Pemetaan kawasan rawan genangan dan pembangunan drainase baru**

Untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan urbanisasi, kebijakan ini mengarahkan pada identifikasi kawasan rentan banjir/genangan serta pembangunan sistem drainase baru yang adaptif. Integrasi antara perencanaan teknis dan mitigasi risiko bencana menjadi elemen penting dalam kebijakan ini.

6. **Penyusunan regulasi teknis bangunan gedung dan simplifikasi perizinan**

Kebijakan ini memperkuat aspek pengaturan dan pengendalian

pembangunan gedung melalui regulasi teknis terbaru serta penyederhanaan perizinan (SLF dan PBG). Hal ini bertujuan meningkatkan keselamatan bangunan, efisiensi layanan perizinan, dan kepastian hukum dalam pembangunan.

7. **Pemeliharaan berkala dan pembangunan jalan strategis kabupaten**

Pemeliharaan jalan secara berkala dan pembangunan jalan strategis menjadi fokus dalam menjaga tingkat kemantapan jalan kabupaten, dengan pendekatan perencanaan dan penanganan jaringan jalan berbasis koridor strategis. *Strategi pembangunan dan pemeliharaan jalan dalam Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan hasil penajaman internal perangkat daerah terkait penetapan koridor jalan strategis sebagai arah prioritas penanganan.* Pendekatan tersebut menjadi landasan dalam perumusan strategi berbasis fungsi jaringan, guna menjamin keterpaduan antara kebijakan teknis, keterbatasan fiskal, dan tujuan pembangunan wilayah. Kebijakan ini memperhatikan skala prioritas berdasarkan fungsi jalan dalam satu kesatuan jaringan, peran koridor dalam mendukung konektivitas antarwilayah, serta kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, sehingga penanganan jalan dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

8. **Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan pembinaan jasa konstruksi lokal**

Arah kebijakan ini mendorong peningkatan kualitas SDM konstruksi melalui pelatihan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi. Dukungan bagi pelaku jasa konstruksi lokal juga ditekankan, agar pelaksanaan proyek infrastruktur lebih mandiri, efisien, dan memberdayakan ekonomi lokal.

9. **Penyusunan dan percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR**

Penyelesaian RTRW dan percepatan penyusunan RDTR merupakan langkah fundamental untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang tertib dan sesuai rencana. Kebijakan ini juga menjadi dasar penting dalam integrasi perencanaan ruang, pengendalian pembangunan, dan percepatan investasi.

10. **Peningkatan kinerja perangkat daerah berbasis kinerja dan akuntabilitas**

Melalui optimalisasi implementasi SAKIP dan penguatan manajemen kinerja, kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien, dan transparan. Hal ini mendukung akuntabilitas penggunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik.

11. **Penciptaan, sosialisasi, dan replikasi inovasi berbasis kebutuhan masyarakat**

Inovasi menjadi motor perubahan dalam kebijakan ini. Dinas PUPR mendorong penciptaan solusi baru, baik dari internal organisasi maupun aspirasi masyarakat. Inovasi yang relevan akan disosialisasikan secara luas dan direplikasi untuk memberikan dampak nyata secara berkelanjutan.

Agar lebih mudah dalam membaca sasaran, strategi, arah kebijakan dan penahapan pelaksanaan tiap indikator kinerja, kami sajikan tabel berikut :

Tabel 3.6

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Penahapan Dinas PUPR 2025 - 2029

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penahapan	Indikator
1	Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan jaringan irigasi	Peningkatan, rehabilitasi & pemeliharaan jaringan irigasi	Tahap I – II	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan
2	Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)	Penyediaan infrastruktur SPAM berbasis kawasan	Pengembangan SPAM skala kecil & idle capacity	Tahap I – III	% rumah tangga akses SPAM
3	Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah sesuai ketentuan	Pembangunan & pengoperasian TPS3R/TPST	Penyediaan sarpras TPS3R berbasis desa/kelurahan	Tahap II – IV	% desa tersedia TPS/TPST/TPS3R
4	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik	Pembangunan IPLT & promosi SPAL komunal	Tahap II – IV	% rumah tangga memperoleh layanan pengolahan limbah

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penahapan	Indikator
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir	Revitalisasi & pengembangan drainase	Pemetaan kawasan genangan & pembangunan drainase	Tahap I – III	% kawasan perkotaan dengan drainase kondisi baik
6	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Pengawasan & penerbitan SLF dan PBG	Regulasi teknis & simplifikasi perizinan	Tahap I – III	Rasio bangunan gedung baik & laik fungsi
7	Meningkatnya kemantapan jalan	Rehabilitasi & pemeliharaan jalan	Pembangunan jalan strategis kabupaten	Tahap I – IV	Tingkat kemantapan jalan kabupaten
8	Meningkatnya kapasitas jasa konstruksi	Peningkatan kompetensi SDM konstruksi	Sertifikasi & pembinaan tenaga kerja lokal	Tahap II – V	Rasio tenaga bersertifikat
9	Meningkatnya kesesuaian infrastruktur dg tata ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang	Penyusunan RTRW & RDTR	Tahap I – III	% pembangunan selaras RTRW & % wilayah punya RDTR
10	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif & akuntabel	Implementasi SAKIP & reformasi birokrasi	Peningkatan kinerja berbasis akuntabilitas	Tahap I – V	Nilai SAKIP, realisasi anggaran, Indeks ASN
11	Optimalisasi inovasi pelayanan PUPR	Pengembangan inovasi pelayanan publik	Sosialisasi & replikasi inovasi masyarakat	Tahap II – V	Jumlah inovasi terinternalisasi & berkelanjutan

BAB IV

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab III. Penyusunan program dan kegiatan mengacu pada hasil identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Penjabaran program, kegiatan, dan sub kegiatan ini disusun secara sistematis dan logis berdasarkan kerangka kerja cascading dari tujuan dan sasaran daerah, dengan memperhatikan integrasi terhadap dokumen RPJMD dan dokumen perencanaan baik provinsi maupun nasional. Keterkaitan antar dokumen tersebut menjadi penting untuk memastikan konsistensi perencanaan dan sinergi antar tingkat pemerintahan.

Struktur program dan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto pada periode 2025–2029 dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur daerah, seperti kemantapan jaringan jalan dan jembatan, penguatan sistem irigasi, peningkatan cakupan air minum dan sanitasi, pengelolaan air limbah domestik, penataan ruang yang berkelanjutan, serta penguatan kualitas bangunan gedung dan jasa konstruksi.

Setiap program dirinci ke dalam kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemuatannya. Seluruh sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan, target tahunan, dan penanggung jawab pelaksana, guna memastikan akuntabilitas dan pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan.

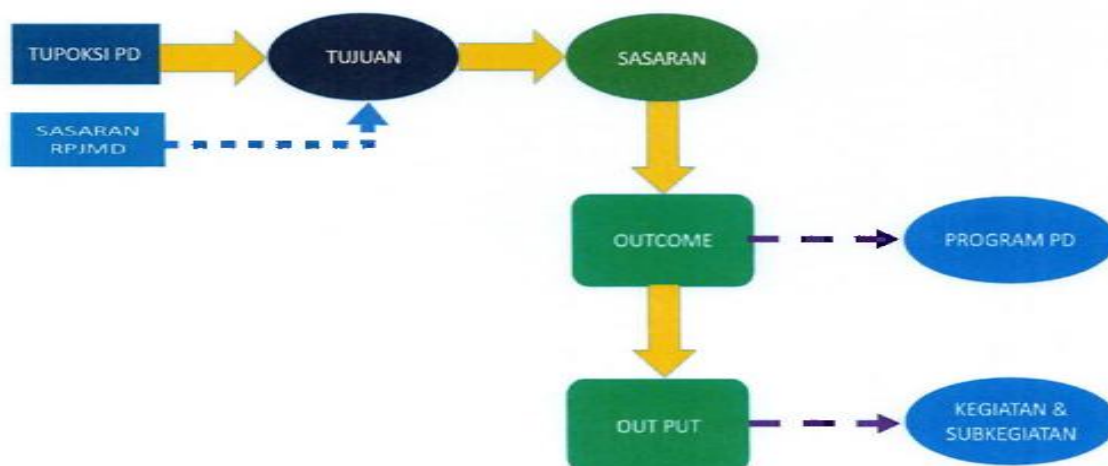
Dengan demikian, Bab IV menjadi landasan teknis bagi perumusan rencana kerja tahunan, penganggaran berbasis kinerja, serta pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara berkesinambungan.

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto menetapkan Tujuan **“Meningkatnya Infrastruktur dalam Kondisi Baik”**. Tujuan ini menjadi dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan dasar, serta mendukung pengelolaan ruang yang tertib dan terencana.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas PUPR menyusun dan melaksanakan berbagai program prioritas, yang dijabarkan ke dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan. Setiap program disusun berdasarkan isu sektoral yang dihadapi daerah serta mengacu pada arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Program-program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kapasitas teknis, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sumber : Inmendagri 2/2025

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dilakukan dengan mengacu pada **tiga prinsip utama perencanaan perangkat daerah**, yaitu:

a. Cascading dari Sasaran dan Indikator Kinerja

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil *cascading* langsung dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR tahun 2025–2030. Dengan pendekatan ini, keterkaitan logis antara sasaran, program, kegiatan, hingga output dan outcome dapat terbangun secara sistemik dan berorientasi hasil.

b. Mengacu pada Nomenklatur Nasional

Program, kegiatan, dan subkegiatan merujuk pada nomenklatur resmi sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**, termasuk seluruh pemutakhirannya. Hal ini memastikan bahwa seluruh perencanaan Dinas PUPR dapat terintegrasi dengan sistem penganggaran nasional (SIPD-RI), serta selaras dengan kebijakan pembangunan pusat dan provinsi.

c. Menjaga Kesenambungan Perencanaan Tahun ke Tahun

Program dan kegiatan Dinas PUPR disusun untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2030 secara berkesinambungan. Penyusunan program pada tahun 2030 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan arah kebijakan dan pembangunan daerah. Program tahun 2030 juga menjadi **pijakan awal penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun tersebut**, serta menjamin transisi yang mulus menuju RPJMD periode selanjutnya.

Berikut kami sajikan **tabel program perangkat daerah sesuai RPJMD Kab. Mojokerto Tahun 2025 -2029** serta **tabel teknik merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD** :

Tabel 4.1

Program Perangkat Daerah sesuai RPJMD Kab. Mojokerto 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	BASELIN E 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					231.823.617.91 0		353.320.473.44 5		338.303.214.53 4		342.298.629.73 1		376.962.486.44 8	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.235.062.560		26.553.062.560		27.459.062.560		28.060.062.560		29.390.062.560	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	88,3	88,3	89	26.235.062.560	90	26.553.062.560	90,5	27.459.062.560	91	28.060.062.560	91,5	29.390.062.560	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariat an (%)	86	86,3	86,5		87		87,2		87,5		87,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					28.162.545.350		28.178.799.885		28.186.679.874		28.505.347.861		28.755.882.647	
Meningkatnya ketersediaan dan kontinuitas suplai air irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi (%)	65,33	65,3 3	68	28.162.545.350	69	28.178.799.885	70	28.186.679.874	71	28.505.347.861	72	28.755.882.647	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					9.726.010.000		9.788.611.000		9.857.472.100		9.933.219.310		10.016.541.241	
Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum masyarakat	Persentase rumah tangga memperoleh	94,5	94,5	96,5	9.726.010.000	97,5	9.788.611.000	98	9.857.472.100	99,5	9.933.219.310	100	10.016.541.241	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	BASELIN E 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	akses air minum (%)													Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					3.300.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000	
Lingkungan bersih dan berkelanjutan	Persentase Desa di Wilayah Kabupaten Tersedia TPS / TPST / TPS3R (Persentase)	18	18	18	3.300.000.000	18	3.300.000.000	18	3.300.000.000	18	3.300.000.000	18	3.300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.800.000.000		25.900.000.000		9.900.000.000		12.900.000.000		15.900.000.000	
Terjaganya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan SPAL yang layak (%)	99	99	100	4.800.000.000	100	25.900.000.000	100	9.900.000.000	100	12.900.000.000	100	15.900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					29.000.000.000		29.000.000.000		29.000.000.000		29.000.000.000		29.000.000.000	
Berkurangnya genangan dan banjir di kawasan permukiman	Persentase kawasan dengan sistem drainase yang berfungsi baik (%)	20	20	22	29.000.000.000	23	29.000.000.000	24	29.000.000.000	25	29.000.000.000	26	29.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN														
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Peningkatan Kualitas PSU (Persentase)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	BASELIN E 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					20.700.000.000		120.700.000.00 0		120.700.000.00 0		120.700.000.00 0		150.700.000.00 0	
Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya	Rasio Bangunan Gedung Instansi Pemerintah yang Laik Fungsi (Persentase)	90	90	90	20.700.000.000	90	120.700.000.00 0	90	120.700.000.00 0	90	120.700.000.00 0	90	150.700.000.00 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya	Penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan (%)	99	99	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN					105.400.000.00 0		105.400.000.00 0		105.400.000.00 0		105.400.000.00 0		105.400.000.00 0	
Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik (Persentase)	61	61	61	105.400.000.00 0	61	105.400.000.00 0	61	105.400.000.00 0	61	105.400.000.00 0	61	105.400.000.00 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000	
Meningkatnya profesionalitas SDM jasa konstruksi	Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi bersertifikat (%)	51	51	53	1.700.000.000	54	1.700.000.000	55	1.700.000.000	56	1.700.000.000	57	1.700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG					2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	BASELIN E 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan pembangunan terhadap tata ruang	Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW dan RDTR (%)	100	100	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
TOTAL KESELURUHAN					231823617910.00		353320473445.00		338303214534.00		342298629731.00		376962486448.00	

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar				Persentase Infrastruktur Kondisi Baik		
		Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		
			Meningkatnya ketersediaan dan kontinuitas suplai air irigasi		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Terbangunnya infrastruktur irigasi yang fungsional	Jumlah kegiatan pengelolaan SDA yang terlaksana	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
					Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
				Terbangunnya dan berfungsinya jaringan irigasi permukaan dan tanah	Jumlah kegiatan pengelolaan irigasi yang terlaksana	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
						dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sumur irigasi dibangun	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Peningkatan Bendung Irigasi	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Bendung Irigasi	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah dokumen teknis dan lingkungan disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (SPAM)		
			Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum masyarakat		Persentase rumah tangga memperoleh akses air minum aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Tersedianya infrastruktur SPAM yang fungsional dan merata	Jumlah sistem SPAM yang dikembangkan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan			Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R		
			Lingkungan bersih dan berkelanjutan		Persentase desa yang memiliki sarana pengelolaan sampah sesuai standar	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Terbangunnya sarana TPS3R dan TPST	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah yang dibangun dan dikelola	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	
		Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terjaganya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat		Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan SPAL yang layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya layanan SPAL	Jumlah unit layanan pengolahan air limbah domestik yang dibangun dan beroperasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah unit pengolahan setempat yang dibangun	Penyediaan Unit pengolahan setempat	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir di perkotaan dan lingkungan			Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase dengan kondisi baik		
			Berkurangnya genangan dan banjir di		Persentase kawasan dengan sistem drainase yang berfungsi baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
			kawasan permukiman				
				Terbangunnya dan terpeliharanya sistem drainase kawasan	Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung			Rasio Bangunan Gedung kondisi baik dan laik fungsi		
			Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya		Persentase bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Terselenggaranya pembangunan gedung dan Terpenuhinya PBG dan SLF bangunan	Jumlah bangunan yang memperoleh IMB dan SLF	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung			Rasio Bangunan Gedung kondisi baik dan laik fungsi		
			Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya		Penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Penataan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	
		Meningkatnya kemantapan jalan			Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		Persentase peningkatan jalan mantap terhadap total jalan kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Jalan kabupaten dalam kondisi mantap meningkat	Panjang jalan/jembatan yang ditangani sesuai standar	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Pengelolaan Leger Jalan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang jembatan yang dilebarkan	Pelebaran Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jembatan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Rekonstruksi Jalan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar	
					Panjang jembatan yang dibangun	Pembangunan Jembatan	
		Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi			Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		
			Meningkatnya profesionalitas SDM jasa konstruksi		Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi bersertifikat	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi	Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
				tenaga kerja konstruksi			
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
			Meningkatnya ketersediaan informasi dan layanan jasa konstruksi		Persentase peningkatan layanan dan sistem informasi jasa konstruksi yang tersedia	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
			Meningkatnya kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi		Persentase lembaga dan pelaku jasa konstruksi yang patuh terhadap regulasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Terselenggaranya pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi	Jumlah kegiatan pengawasan dan evaluasi jasa konstruksi yang dilaksanakan	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
		Meningkatnya kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang			Persentase pembangunan daerah yang selaras dengan RTRW		
			Meningkatnya kepatuhan pembangunan terhadap tata ruang		Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW dan RDTR	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Terselenggaranya pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
				Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Persentase KKPR yang diberikan sesuai ketentuan waktu	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
		Meningkatnya kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang			Persentase wilayah kecamatan yang telah dilengkapi dengan RDTR		
			Terwujudnya kepastian hukum dan arah pembangunan sesuai tata ruang		Persentase wilayah kecamatan yang memiliki RDTR yang telah ditetapkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbitnya dokumen RDTR di wilayah prioritas	Jumlah dokumen RTRW/RDTR yang ditetapkan atau difasilitasi	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Jumlah koordinasi perencanaan tata ruang yang dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah data SHP Peta Dasar	Penyusunan Peta Dasar	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan		1. Nilai IKM PD/Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Jumlah Hasil Reviu RKA/DPA-SKPD yang ditindaklanjuti	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Administrasi Kepegawaian		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Bangunan Kantor yang Disediakan		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Penyediaan Bahan/Material	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Lapangan yang Disediakan		
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Lainnya yang Disediakan		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

Rincian Program, Kegiatan beserta sasarnya

Berikut adalah daftar program dan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto yang dirancang untuk tahun 2025–2030, lengkap dengan sasarnya:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Sasaran Strategis: Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air.

Sasaran Program: Terwujudnya infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang andal dan berkelanjutan.

Kegiatan:

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya bangunan penampung air dalam kondisi baik.
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sasaran Kegiatan : Meningkatnya fungsi jaringan irigasi dalam mendukung produktivitas pertanian.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Sasaran Strategis: Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)

Sasaran Program: Meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas air minum bagi masyarakat.

Kegiatan:

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani oleh SPAM.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Sasaran Strategis: Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan.

Sasaran Program: Terwujudnya sistem pengelolaan persampahan yang sesuai ketentuan.

Kegiatan:

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- Tersedianya sarana pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan.

4. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Sasaran Strategis: Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik.

Sasaran Program: Terciptanya sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak.

Kegiatan:

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sasaran Kegiatan : Meningkatnya cakupan layanan air limbah domestik di kawasan permukiman.

5. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir di perkotaan dan lingkungan.

Sasaran Program: Terbangunnya sistem drainase kawasan permukiman yang fungsional dan terintegrasi.

Kegiatan:

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sasaran Kegiatan: Berkurangnya titik genangan di kawasan padat penduduk dan pusat kegiatan ekonomi.

7. **Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung.

Sasaran Program: Terjaminnya kualitas dan keselamatan bangunan gedung sesuai ketentuan teknis dan fungsional.

Kegiatan:

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi bangunan melalui penerbitan SLF dan PBG.
- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi bangunan melalui penerbitan SLF dan PBG.

8. **Program Penyelenggaraan Jalan**

Sasaran Strategis: Meningkatnya kemantapan jalan

Sasaran Program: Meningkatnya kemantapan jalan kabupaten.

Kegiatan:

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sasaran Kegiatan: Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap.

8. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi

Sasaran Program: Meningkatnya daya saing dan kompetensi sektor jasa konstruksi lokal.

Kegiatan:

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sasaran Kegiatan: Tersedianya data pelaku dan proyek jasa konstruksi secara digital dan akurat.
- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - Sasaran Kegiatan: Terciptanya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi jasa konstruksi.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sasaran Strategis: Meningkatnya kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang

Sasaran Program: Terwujudnya penataan ruang yang fungsional, legal, dan berkelanjutan.

Kegiatan:

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - Sasaran Kegiatan: Tersusunnya dokumen tata ruang yang sinkron dengan sistem perizinan OSS.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Sasaran Kegiatan: Terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan pembangunan sektoral.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Sasaran Kegiatan: Menurunnya pelanggaran terhadap rencana tata ruang dan perizinan.

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan.

Kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan.

- Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah.
 - Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah.
 - Sasaran Kegiatan 2 :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah.

Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas PUPR. **Perencanaan subkegiatan berbasis pada data teknis, kebutuhan wilayah, serta kesesuaian dengan indikator kinerja daerah.** Dengan pengelolaan yang terarah dan prinsip perencanaan yang metodologis, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto berkomitmen mewujudkan

pembangunan infrastruktur yang terarah, berdampak nyata, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun rincian subkegiatan yang telah dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan program prioritas daerah kabupaten Mojokerto tersebut, disajikan dalam tabel berikut sebagai acuan pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan infrastruktur ke depan :

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				231.823.617 .910		353.320.473 .445		338.303.214 .534		342.298.629 .731		376.962.486 .448		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				26.235.062. 560		26.553.062. 560		27.459.062. 560		28.060.062. 560		29.390.062. 560		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	88,3	89	26.235.062. 560	90	26.553.062. 560	90,5	27.459.062. 560	91	28.060.062. 560	91,5	29.390.062. 560	1.03.2.15.0.00.01 .0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Keseekretariatan (%)	86	86,5		87		87,2		87,5		87,7			
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				380.000.000		408.000.000		408.000.000		408.000.000		408.000.000		
Jumlah Hasil Reviu RKA/DPA-SKPD yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000		
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0		2		2		2		2			
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000		
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000		
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000		
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000		
Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	4	380.000.000	4	396.000.000	4	396.000.000	4	396.000.000	4	396.000.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1							
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	4		4		4							
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	0	0		1		1		1					

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)													
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0		30		30		30		30			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000		
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
1.03.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	0	30	6.000.000	30	6.000.000	30	6.000.000	30	6.000.000		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.660.000. 000		21.620.000. 000		21.649.000. 000		21.799.000. 000		21.649.000. 000		
Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	21.660.000. 000	1	21.620.000. 000	1	21.649.000. 000	1	21.799.000. 000	1	21.649.000. 000		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	0	0		18		18		18		18			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	201	441		441		441		441		441			
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				21.660.000. 000		21.587.000. 000		21.609.000. 000		21.759.000. 000		21.609.000. 000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	201	441	21.660.000. 000	441	21.587.000. 000	441	21.609.000. 000	441	21.759.000. 000	441	21.609.000. 000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		
1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	0	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000		
1.03.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	0	0	0	18	7.000.000	18	7.000.000	18	7.000.000	18	7.000.000		

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD														
1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	0	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000		87.000.000		87.000.000		87.000.000		87.000.000		
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	50.000.000	12	87.000.000	12	87.000.000	12	87.000.000	12	87.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	11	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		
1.03.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	11	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
1.03.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		
1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
1.03.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		105.000.000		255.000.000		105.000.000		255.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Indeks Profesionalitas ASN PD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0	1	105.000.000	1	255.000.000	1	105.000.000	1	255.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0			8		8		8		8			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		0		1		0		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	0		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		150.000.000		0		150.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	1	150.000.000		
1.03.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.03.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Informasi Kepegawaian (Dokumen)													
1.03.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0		0	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000		
1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.010.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		1.080.000.000		
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	350.000.000	1	380.000.000	1	380.000.000	1	380.000.000	1	380.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	179	250	660.000.000	250	700.000.000	250	700.000.000	250	700.000.000	250	700.000.000		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1				1		1					
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1				1		1					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1				1		1					
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0				12		12		12			

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
1.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000		
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	179	250	200.000.000	250	200.000.000	250	200.000.000	250	200.000.000	250	200.000.000		
1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		615.000.000		845.000.000		1.615.000.000		2.945.000.000		
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	615.000.000	0	845.000.000	1	1.615.000.000	0	2.945.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		4		4		4			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		10		10		10			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	0		2		0		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0		1		0		0		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		1			

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		2		0		2			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0		0		5		0		5			
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2			
1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		500.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000		
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		500.000.000		0		0		500.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	1	500.000.000		
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0		0		0		1.000.000.000		0		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0		
1.03.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		100.000.000		0		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	0	0	2	100.000.000	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000		
1.03.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		300.000.000		0		300.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	2	300.000.000	0	0	2	300.000.000		
1.03.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		30.000.000		0		30.000.000		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	5	30.000.000	0	0	5	30.000.000		
1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		1.000.000.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000		
1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000		
1.03.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.799.562.560		1.302.562.560		1.799.562.560		1.630.562.560		1.630.562.560		
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	11	12	1.794.562.5 60	12	1.297.562.5 60	12	1.794.562.5 60	12	1.625.562.5 60	12	1.625.562.5 60		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	11	12		12		12		12		12			
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	11	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.494.562.5 60		997.562.560		1.494.562.5 60		1.325.562.5 60		1.325.562.5 60		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	11	12	1.494.562.5 60	12	997.562.560	12	1.494.562.5 60	12	1.325.562.5 60	12	1.325.562.5 60		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.335.500.0 00		1.335.500.0 00		1.335.500.0 00		1.335.500.0 00		1.335.500.0 00		
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	7	1.335.500.0 00	8	1.335.500.0 00	9	1.335.500.0 00	10	1.335.500.0 00	11	1.335.500.0 00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	7		7		7		7		7			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	8		8		8		8		8			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9	11		12		13		14		15			

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		3		4		5		6			
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	16	18		19		20		21		22			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3		4		5		6		7			
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				299.500.000		299.500.000		299.500.000		299.500.000		299.500.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	7	299.500.000	8	299.500.000	9	299.500.000	10	299.500.000	11	299.500.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	16	18	500.000.000	19	500.000.000	20	500.000.000	21	500.000.000	22	500.000.000		
1.03.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000		
1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	8	6.000.000	8	6.000.000	8	6.000.000	8	6.000.000	8	6.000.000		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9	11	100.000.000	12	100.000.000	13	100.000.000	14	100.000.000	15	100.000.000		
1.03.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3	175.000.000	4	175.000.000	5	175.000.000	6	175.000.000	7	175.000.000		
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	150.000.000	3	150.000.000	4	150.000.000	5	150.000.000	6	150.000.000		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				28.162.545. 350		28.178.799. 885		28.186.679. 874		28.505.347. 861		28.755.882. 647		
Meningkatnya ketersediaan dan kontinuitas suplai air irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi (%)	65,33	68	28.162.545. 350	69	28.178.799. 885	70	28.186.679. 874	71	28.505.347. 861	72	28.755.882. 647	1.03.2.15.0.00.01 .0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.159.382.5 00		2.175.637.0 35		2.183.517.0 24		2.502.185.0 11		2.752.719.7 97		
Jumlah kegiatan pengelolaan SDA yang terlaksana	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	1	3	2.159.382.5 00	3	2.175.637.0 35	3	2.183.517.0 24	3	2.502.185.0 11	3	2.752.719.7 97		
	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2	4		4		4		4		4			

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				1.398.122.0 00		1.414.376.5 35		1.422.256.5 24		1.740.924.5 11		1.991.459.2 97		
Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	1	3	1.398.122.0 00	3	1.414.376.5 35	3	1.422.256.5 24	3	1.740.924.5 11	3	1.991.459.2 97		
1.03.02.2.01.0072 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota				164.730.500		164.730.500		164.730.500		164.730.500		164.730.500		
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	164.730.500	2	164.730.500	2	164.730.500	2	164.730.500	2	164.730.500		
1.03.02.2.01.0089 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				466.070.000		466.070.000		466.070.000		466.070.000		466.070.000		
Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2	4	466.070.000	4	466.070.000	4	466.070.000	4	466.070.000	4	466.070.000		
1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				130.460.000		130.460.000		130.460.000		130.460.000		130.460.000		
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1	2	130.460.000	2	130.460.000	2	130.460.000	2	130.460.000	2	130.460.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				26.003.162. 850		26.003.162. 850		26.003.162. 850		26.003.162. 850		26.003.162. 850		
Jumlah kegiatan pengelolaan irigasi yang terlaksana	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	1	3	26.003.162. 850	4	26.003.162. 850	5	26.003.162. 850	6	26.003.162. 850	7	26.003.162. 850		
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1	1,3		1,3		1,3		1,3					
	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1	2		3		3		3					
	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	2	4		4		4		4					
	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun (UNIT)	0	0		0		0		0					
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0,8	2,8		2,8		2,8		2,8					
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1	1,3		1,3		1,3		1,3					
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				4.620.915.0 00		4.620.915.0 00		4.620.915.0 00		4.620.915.0 00		4.620.915.0 00		
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1	1,3	4.620.915.0 00	1,3	4.620.915.0 00	1,3	4.620.915.0 00	1,3	4.620.915.0 00	1,3	4.620.915.0 00		
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				4.163.228.0 90		4.163.228.0 90		4.163.228.0 90		4.163.228.0 90		4.163.228.0 90		
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1	1,3	4.163.228.0 90	1,3	4.163.228.0 90	1,3	4.163.228.0 90	1,3	4.163.228.0 90	1,3	4.163.228.0 90		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				5.614.456.7 60		5.614.456.7 60		5.614.456.7 60		5.614.456.7 60		5.614.456.7 60		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0,8	2,8	5.614.456.760	2,8	5.614.456.760	2,8	5.614.456.760	2,8	5.614.456.760	2,8	5.614.456.760		
1.03.02.2.02.0042 - Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah				0		0		0		0		0		
Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun (UNIT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.03.02.2.02.0048 - Peningkatan Bendung Irigasi				7.230.080.000		7.230.080.000		7.230.080.000		7.230.080.000		7.230.080.000		
Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan (UNIT)	1	3	7.230.080.000	4	7.230.080.000	5	7.230.080.000	6	7.230.080.000	7	7.230.080.000		
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				507.078.000		507.078.000		507.078.000		507.078.000		507.078.000		
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	2	4	507.078.000	4	507.078.000	4	507.078.000	4	507.078.000	4	507.078.000		
1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi				3.867.405.000		3.867.405.000		3.867.405.000		3.867.405.000		3.867.405.000		
Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1	2	3.867.405.000	3	3.867.405.000	3	3.867.405.000	3	3.867.405.000	3	3.867.405.000		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				9.726.010.000		9.788.611.000		9.857.472.100		9.933.219.310		10.016.541.241		
Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum masyarakat	Persentase rumah tangga memperoleh akses air minum (%)	94,5	96,5	9.726.010.000	97,5	9.788.611.000	98	9.857.472.100	99,5	9.933.219.310	100	10.016.541.241	1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				9.726.010.000		9.788.611.000		9.857.472.100		9.933.219.310		10.016.541.241		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah sistem SPAM yang dikembangkan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	9	350	9.726.010.000	350	9.788.611.000	350	9.857.472.100	350	9.933.219.310	350	10.016.541.241		
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	0	20		20		20		20					
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	4	6		6		7		8					
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	0	90		88		86		84		82			
1.03.03.2.01.0024 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	0	90	100.000.000	88	100.000.000	86	100.000.000	84	100.000.000	82	100.000.000		
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				626.010.000		688.611.000		757.472.100		833.219.310		916.541.241		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	4	6	626.010.000	6	688.611.000	7	757.472.100	8	833.219.310	8	916.541.241		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				4.000.000.0 00		4.000.000.0 00		4.000.000.0 00		4.000.000.0 00		4.000.000.0 00		
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	0	20	4.000.000.0 00	20	4.000.000.0 00	20	4.000.000.0 00	20	4.000.000.0 00	20	4.000.000.0 00		
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				5.000.000.0 00		5.000.000.0 00		5.000.000.0 00		5.000.000.0 00		5.000.000.0 00		
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	9	350	5.000.000.0 00	350	5.000.000.0 00	350	5.000.000.0 00	350	5.000.000.0 00	350	5.000.000.0 00		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				3.300.000.0 00		3.300.000.0 00		3.300.000.0 00		3.300.000.0 00		3.300.000.0 00		
Lingkungan bersih dan berkelanjutan	Persentase Desa di Wilayah Kabupaten Tersedia TPS / TPST / TPS3R (Persentase)	18	18	3.300.000.0 00	18	3.300.000.0 00	18	3.300.000.0 00	18	3.300.000.0 00	18	3.300.000.0 00	1.03.2.15.0.00.01 .0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				3.300.000.0 00		3.300.000.0 00		3.300.000.0 00		3.300.000.0 00		3.300.000.0 00		
Jumlah fasilitas pengelolaan sampah yang dibangun dan dikelola	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1	1,5	3.300.000.0 00	1,5	3.300.000.0 00	1,5	3.300.000.0 00	1,5	3.300.000.0 00	1,5	3.300.000.0 00		
	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	1	30		30		30		30		30			
1.03.04.2.01.0012 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan														
Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	1	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000		
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1	1,5	3.000.000.000	1,5	3.000.000.000	1,5	3.000.000.000	1,5	3.000.000.000	1,5	3.000.000.000		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				4.800.000.000		25.900.000.000		9.900.000.000		12.900.000.000		15.900.000.000		
Terjaganya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan SPAL yang layak (%)	99	100	4.800.000.000	100	25.900.000.000	100	9.900.000.000	100	12.900.000.000	100	15.900.000.000	1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				4.800.000.000		25.900.000.000		9.900.000.000		12.900.000.000		15.900.000.000		
Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan SPAL yang layak	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	49	100	4.800.000.000	100	25.900.000.000	100	9.900.000.000	100	12.900.000.000	100	15.900.000.000		
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari)	39	30		160		75		90		112			

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	0	20		20		20		20		20			
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				4.000.000.000		25.000.000.000		9.000.000.000		12.000.000.000		15.000.000.000		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari)	39	30	4.000.000.000	160	25.000.000.000	75	9.000.000.000	90	12.000.000.000	112	15.000.000.000		
1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	49	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000		
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				500.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan	0	20	500.000.000	20	600.000.000	20	600.000.000	20	600.000.000	20	600.000.000		

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)													
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				29.000.000.000		29.000.000.000		29.000.000.000		29.000.000.000		29.000.000.000		
Berkurangnya genangan dan banjir di kawasan permukiman	Persentase kawasan dengan sistem drainase yang berfungsi baik (%)	20	22	29.000.000.000	23	29.000.000.000	24	29.000.000.000	25	29.000.000.000	26	29.000.000.000	1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				29.000.000.000		29.000.000.000		29.000.000.000		29.000.000.000		29.000.000.000		
Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1	5	29.000.000.000	5	29.000.000.000	5	29.000.000.000	5	29.000.000.000	5	29.000.000.000		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	5	15				15				15			
	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	1	3				3				3			
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1	2				2				2			
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1	4				4				4			

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	699	701		702		703		704		705			
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	299	301		302		303		304		305			
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	699	701	4.000.000.000	702	4.000.000.000	703	4.000.000.000	704	4.000.000.000	705	4.000.000.000		
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	299	301	2.000.000.000	302	2.000.000.000	303	2.000.000.000	304	2.000.000.000	305	2.000.000.000		
1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan				5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		
Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	1	3	5.000.000.000	3	5.000.000.000	3	5.000.000.000	3	5.000.000.000	3	5.000.000.000		
1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	5	15	3.000.000.000	15	3.000.000.000	15	3.000.000.000	15	3.000.000.000	15	3.000.000.000		
1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan				4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1	4	4.000.000.000	4	4.000.000.000	4	4.000.000.000	4	4.000.000.000	4	4.000.000.000		
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000				
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000				
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1	5	8.000.000.000	5	8.000.000.000	5	8.000.000.000	5	8.000.000.000	5	8.000.000.000				
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				0		0		0		0		0				
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman				0		0		0		0		0	1.03.2.15.0.00.01 .0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Persentase Peningkatan Kualitas PSU (Persentase)		100				100				100				100	
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				20.700.000.000		120.700.000.000		120.700.000.000		120.700.000.000		150.700.000.000				
Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya	Rasio Bangunan Gedung Instansi Pemerintah yang Laik Fungsi (Persentase)	90	90	20.700.000.000	90	120.700.000.000	90	120.700.000.000	90	120.700.000.000	90	150.700.000.000	1.03.2.15.0.00.01 .0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				20.700.000.000		120.700.000.000		120.700.000.000		120.700.000.000		150.700.000.000				

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah bangunan yang memperoleh IMB dan SLF	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	199	300	20.700.000. 000	300	120.700.000 .000	300	120.700.000 .000	300	120.700.000 .000	300	150.700.000 .000		
	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	89	100		100		100		100					
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	6		10		10		15					
	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis)	2	4		4		4		4					
1.03.08.2.01.0020 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis	2	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis)													
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				19.700.000. 000		119.700.000 .000		119.700.000 .000		119.700.000 .000		149.700.000 .000		
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	6	19.700.000. 000	10	119.700.000 .000	10	119.700.000 .000	10	119.700.000 .000	15	149.700.000 .000		
1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	89	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	199	300	500.000.000	300	500.000.000	300	500.000.000	300	500.000.000	300	500.000.000		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya	Penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan (%)	99	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	1.03.2.15.0.00.01 .0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	49	51	300.000.000	52	300.000.000	53	300.000.000	54	300.000.000	55	300.000.000		
1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	49	51	300.000.000	52	300.000.000	53	300.000.000	54	300.000.000	55	300.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				105.400.000 .000		105.400.000 .000		105.400.000 .000		105.400.000 .000		105.400.000 .000		
Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik (Persentase)	61	61	105.400.000 .000	61	105.400.000 .000	61	105.400.000 .000	61	105.400.000 .000	61	105.400.000 .000	1.03.2.15.0.00.01 .0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				105.400.000 .000		105.400.000 .000		105.400.000 .000		105.400.000 .000		105.400.000 .000		
Panjang jalan/jembatan yang ditangani sesuai standar	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	4,09	2,5	105.400.000 .000	2,5	105.400.000 .000	2,5	105.400.000 .000	2,5	105.400.000 .000	2,5	105.400.000 .000		
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1	10		10		10		10		10			
	Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	1	18		18		18		18		18			
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	10	14		14		14		14		14			
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1	1,75		3		3		3		3			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	19	21		22		23		24		25			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	20,88	3		3		3		3		3			
	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	7,89	5		5		5		5		5			
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.136,389	1.136,3 89		1.136,3 89		1.136,3 89		1.136,3 89		1.136,3 89			
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	6	8		8		8		8		8			
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	16	18	19	20	21	22								

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1	3		3		3		3		3			
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000		
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	16	18	3.000.000.000	19	3.000.000.000	20	3.000.000.000	21	3.000.000.000	22	3.000.000.000		
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.136,389	1.136,389	200.000.000	1.136,389	200.000.000	1.136,389	200.000.000	1.136,389	200.000.000	1.136,389	200.000.000		
1.03.10.2.01.0049 - Pelebaran Jembatan				8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		
Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	1	18	8.000.000.000	18	8.000.000.000	18	8.000.000.000	18	8.000.000.000	18	8.000.000.000		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	19	21	20.000.000.000	22	20.000.000.000	23	20.000.000.000	24	20.000.000.000	25	20.000.000.000		
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1	1,75	10.000.000.000	3	10.000.000.000	3	10.000.000.000	3	10.000.000.000	3	10.000.000.000		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	20,88	3	10.000.000.000	3	10.000.000.000	3	10.000.000.000	3	10.000.000.000	3	10.000.000.000		
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1	10	6.000.000.000	10	6.000.000.000	10	6.000.000.000	10	6.000.000.000	10	6.000.000.000		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	4,09	2,5	11.000.000.000	2,5	11.000.000.000	2,5	11.000.000.000	2,5	11.000.000.000	2,5	11.000.000.000		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	6	8	3.000.000.000	8	3.000.000.000	8	3.000.000.000	8	3.000.000.000	8	3.000.000.000		
1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar				24.000.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000		
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	7,89	5	24.000.000.000	5	24.000.000.000	5	24.000.000.000	5	24.000.000.000	5	24.000.000.000		
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	10	14	10.000.000.000	14	10.000.000.000	14	10.000.000.000	14	10.000.000.000	14	10.000.000.000		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		
Meningkatnya profesionalitas SDM jasa konstruksi	Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi bersertifikat (%)	51	53	1.700.000.000	54	1.700.000.000	55	1.700.000.000	56	1.700.000.000	57	1.700.000.000	1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi yang dilaksanakan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	49	55	800.000.000	55	800.000.000	55	800.000.000	55	800.000.000	55	800.000.000		
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	4	6		6		6		6		6			

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)													
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	49	55		55		55		55		55			
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	49	55	300.000.000	55	300.000.000	55	300.000.000	55	300.000.000	55	300.000.000		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	4	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000		
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	49	55	300.000.000	55	300.000.000	55	300.000.000	55	300.000.000	55	300.000.000		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang diselenggarakan	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000		
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		
Jumlah kegiatan pengawasan dan evaluasi jasa konstruksi yang dilaksanakan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	49	50	550.000.000	50	550.000.000	50	550.000.000	50	550.000.000	50	550.000.000		
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	79	80		80		80		80					
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	79	80	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000		
1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	49	50	350.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		
Meningkatnya kepatuhan pembangunan terhadap tata ruang	Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW dan RDTR (%)	100	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	1.03.2.15.0.00.01 .0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		
Jumlah dokumen RTRW/RDTR yang ditetapkan atau difasilitasi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	3	1.400.000.000	3	1.400.000.000	3	1.400.000.000	3	1.400.000.000	3	1.400.000.000		
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	17	19		19		19		19		19			

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000		
1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)	1	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000		
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000		
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	17	19	150.000.000	19	150.000.000	19	150.000.000	19	150.000.000	19	150.000.000		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		
Jumlah koordinasi perencanaan tata ruang yang dilaksanakan	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	550.000.000	2	550.000.000	2	550.000.000	2	550.000.000	2	550.000.000		
	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1	2		2		2		2		2			
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000		
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Persentase KKPR yang diberikan sesuai ketentuan waktu	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	49	51	150.000.000	52	150.000.000	53	150.000.000	54	150.000.000	55	150.000.000		
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	49	51	150.000.000	52	150.000.000	53	150.000.000	54	150.000.000	55	150.000.000		

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
waktu yang berlaku yaitu 20 hari														
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	29	31	400.000.000		400.000.000	33	400.000.000	34	400.000.000	35	400.000.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	0	12				12				12			
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	49	51				52				53			
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	49	51	150.000.000	52	150.000.000	53	150.000.000	54	150.000.000	55	150.000.000		
1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	29	31	150.000.000	32	150.000.000	33	150.000.000	34	150.000.000	35	150.000.000		
1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	0	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		

4.2 Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Daerah Kabupaten Mojokerto

Subbab ini memuat hubungan antara tujuh **Program Prioritas Daerah Kabupaten Mojokerto** dengan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029. Tiap program prioritas dikaji keterkaitannya dengan misi kepala daerah, indikator kinerja yang relevan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas PUPR yang mendukung pencapaiannya. Tujuannya adalah memastikan sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan teknis oleh Dinas PUPR, sehingga prioritas pembangunan dapat terlaksana secara terukur dan berkelanjutan. Berikut kami sajikan Daftar Subkegiatan Prioritas Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	Pembangunan Sport Center berskala nasional sebagai pusat olahraga dan kegiatan masyarakat.	Tersedianya sarana olahraga berstandar nasional dan pusat aktivitas masyarakat.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung,	Meningkatkan kualitas hidup dan indeks kebugaran masyarakat
			Subkegiatan: Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
2	Pembangunan waduk (embung) di wilayah utara sungai, untuk kebutuhan irigasi dan konservasi air.	Terpenuhinya kebutuhan air irigasi dan konservasi DAS.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota-	Mendukung ketahanan air & pertanian

N o	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			Subkegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
3	Penyediaan sumur dalam (sumur pantek) guna mengantisipasi kekeringan dan menjaga ketahanan air bersih.	Meningkatnya akses air bersih pada wilayah rawan air.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota-	Strategi SPAM skala kecil
			Subkegiatan: Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
4	Pembangunan Fly Over Simpang Lima Kenanten , sebagai solusi kemacetan kawasan padat lalu lintas (bersifat kolaboratif).	Terwujudnya kelancaran lalu lintas di simpul kepadatan wilayah.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota-	Proyek kolaboratif dengan pemerintah pusat/provinsi; termasuk dalam jaringan jalan strategis kabupaten.
			Subkegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			Pembangunan Flyover	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : :Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
5	Pengembangan wilayah perbatasan, untuk memperkuat integrasi kawasan Mojokerto dengan daerah sekitarnya.	Meningkatnya integrasi dan aksesibilitas wilayah perbatasan.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Mendukung rencana pembangunan kawasan strategis baru dan pengendalian tata ruang.
			Subkegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			Rekonstruksi Jalan	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			Rehabilitasi Jalan	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	

N o	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			Subkegiatan: Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
			Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
6	Pembangunan Jalan Tol Gempol-Mojokerto , dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan kawasan strategis nasional (GERBANGKERTOSUSILO, Bromo-Tengger-Semeru, Selingkar Wilis, dan Lintas Selatan).	Terhubungnya Mojokerto dalam jaringan jalan strategis nasional.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Peran PUPR dalam konektivitas lokal & pengendalian pemanfaatan ruang sekitar tol.
			Subkegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			Rekonstruksi Jalan	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			Rehabilitasi Jalan	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
7	Program Bedah Rumah , untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui hunian yang layak.	Meningkatnya hunian layak bagi masyarakat miskin.	-	Termasuk dalam program bidang perumahan dan permukiman berbasis kebutuhan sosial.
8	Pindah lokasi pusat pemerintahan dari wilayah Kota Mojokerto ke wilayah Kabupaten Mojokerto.	Terbangunnya pusat pemerintahan yang representatif dan strategis di wilayah kabupaten.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung,	Simbol identitas otonomi daerah dan penguatan pelayanan publik yang efisien.
			Subkegiatan: Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

N o	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			Rekonstruksi Jalan	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			Rehabilitasi Jalan	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota-	
			Subkegiatan: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	

Catatan Tambahan: Seluruh program di atas mendapat dukungan dari Dinas PUPR baik dalam bentuk teknis, fisik, maupun regulasi tata ruang. Indikator kinerja pada Renstra secara keseluruhan mendukung pelaksanaan Program Prioritas Daerah sebagai implementasi langsung dari visi, misi, dan arah pembangunan Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029.

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 merupakan dokumen penting yang memuat arah kebijakan dan program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas menjadi salah satu prioritas utama dalam rangka mendukung kemajuan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki kualitas hidup warga Kabupaten Mojokerto.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto telah menetapkan berbagai **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang digunakan untuk mengukur pencapaian dan keberhasilan setiap kegiatan yang telah direncanakan. IKU ini tidak hanya mencakup aspek teknis pembangunan, namun juga berfokus pada efektivitas dan keberlanjutan infrastruktur, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penyusunan dan pencapaian target melalui IKU yang telah ditentukan menjadi sangat krusial, karena indikator-indikator tersebut mencerminkan kondisi yang diharapkan pada setiap sektor pembangunan yang ada. Oleh karena itu, Dinas PUPR berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilakukan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien dan efektif. Pencapaian sasaran-sasaran ini juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih spesifik dan berkelanjutan, serta sebagai acuan evaluasi kinerja sepanjang periode Renstra.

Pada tahun 2025-2029, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto akan memprioritaskan berbagai aspek pembangunan infrastruktur yang mencakup beberapa bidang penting seperti peningkatan kualitas jalan, pengelolaan air bersih dan air limbah, penataan ruang, serta pengelolaan sampah. Tidak hanya itu, peningkatan kualitas bangunan gedung

pemerintah dan sistem drainase perkotaan juga menjadi salah satu fokus dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam menyusun target-target yang terukur, Dinas PUPR telah mengidentifikasi sejumlah **indikator kinerja** yang relevan dengan visi pembangunan daerah. Target pencapaian setiap indikator ditetapkan dengan mempertimbangkan baseline tahun 2024 serta proyeksi kebutuhan dan potensi pengembangan di tahun-tahun mendatang. Setiap indikator kinerja ini juga didukung oleh data yang valid dan terukur, yang menjadi acuan bagi perencanaan dan evaluasi program pembangunan.

Indikator-indikator tersebut mencakup **persentase infrastruktur yang dalam kondisi baik, rasio daerah irigasi yang berfungsi, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum, fasilitas pengelolaan sampah berbasis desa, hingga rasio jumlah kecamatan yang telah dilengkapi dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)**. Selain itu, sektor-sektor seperti pengelolaan air limbah domestik, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor konstruksi, serta peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintah juga tercakup dalam sasaran pencapaian yang akan diukur.

Untuk memastikan bahwa pencapaian tersebut dapat terwujud, Dinas PUPR akan melakukan berbagai langkah strategis dan operasional, antara lain melalui **pemetaan kebutuhan infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana baru, serta pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang sudah ada**. Selain itu, Dinas PUPR juga akan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan, guna memastikan bahwa kebutuhan mereka dapat dipenuhi dan diprioritaskan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Berikut adalah tabel yang menyajikan **Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	Definisi : proporsi infrastruktur daerah yang berada dalam kondisi baik dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kontribusi relatif dari tiap jenis infrastruktur. Formulasi : Persentase Infrastruktur Kondisi Baik (Ik) = $(G1 \times W1) + (G2 \times W2) + \dots + (Gn \times Wn)$ Keterangan : • Gi : besaran infrastruktur kondisi baik/layak (sesuai standar tiap komponen). • Wi : bobot komponen i (desimal), Jumlah $Wi=1$ - Bobot Komponen : Jalan 0,25, Jembatan 0,10, Irigasi 0,10, Air	67,43%	67,87%	68,52%	69,01%	69,51%	70,16%	70,66%	Meningkatkan kondisi infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik dan perekonomian.

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Minum 0,15, Air Limbah Domestik 0,10, Drainase 0,10, TPS3R 0,05, Gedung Pemda 0,10, dan Utilitas Umum/PSU 0,05. • N : jumlah jenis infrastruktur yang dinilai (Sumber : Survei teknis kondisi infrastruktur)								
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	Definisi: Luas area irigasi yang berfungsi dibandingkan total luas daerah irigasi kewenangan kabupaten. Formula: $(\text{Luas irigasi berfungsi} \div \text{total luas irigasi}) \times 100\%$ Sumber: Dinas PUPR (Data Irigasi)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Memastikan seluruh daerah irigasi kabupaten berfungsi optimal sepanjang tahun.
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (SPAM)	%	Definisi: Rumah tangga yang menikmati layanan SPAM standar layak. Formula: $(\text{Jumlah rumah tangga dengan akses SPAM})$	95,48%	95,50%	97,00%	97,50%	98,00%	99,50%	100,00 %	Menuju 100% cakupan pelayanan air minum yang aman dan layak.

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			÷ total rumah tangga) × 100% Sumber: Dinas PUPR (Data SPAM)								
4	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	%	Definisi: Desa yang memiliki minimal satu fasilitas TPS/TPST/TPS3R aktif. Formula: (Jumlah desa dengan TPS/TPST/TPS3R ÷ total desa) × 100% Sumber: Dinas PUPR (Data Pembangunan sarana pengelolaan sampah)	9,54%	10,00%	11,00%	12,00%	13,00%	14,00%	15,00%	Memperluas fasilitas pengelolaan sampah berbasis desa untuk mendukung lingkungan bersih.
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	Definisi: Rumah tangga yang terhubung ke sistem pengolahan limbah domestik (IPLT/SPALD). Formula: (Jumlah rumah tangga terlayani pengolahan limbah ÷ total rumah tangga) × 100% Sumber: Dinas PUPR (Data Air Limbah)	99,68%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Menjamin pengelolaan limbah domestik untuk mencegah pencemaran lingkungan.

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase dengan kondisi baik	%	Definisi: Lingkungan perkotaan dengan sistem drainase berfungsi optimal. Formula: $(\text{Jumlah lingkungan dengan drainase baik} \div \text{total lingkungan perkotaan}) \times 100\%$ Sumber: Dinas PUPR (Survey Drainase)	20,05%	21,00%	22,00%	23,00%	24,00%	25,00%	26,00%	Mengurangi banjir lokal dan genangan di kawasan perkotaan.
7	Rasio Bangunan Gedung kondisi baik dan laik fungsi	%	Definisi: Bangunan gedung pemerintah dengan status laik fungsi aktif. Formula: $(\text{Jumlah bangunan laik fungsi} \div \text{total bangunan pemerintah}) \times 100\%$ Sumber: Dinas PUPR (Data Teknis Bangunan Gedung)	10,00%	11,00%	12,00%	13,00%	14,00%	15,00%	16,00%	Peningkatan kualitas dan keamanan bangunan pemerintah untuk pelayanan masyarakat.
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	Definisi: Jalan kabupaten dengan kondisi mantap (baik & sedang). Formula: $(\text{Panjang jalan kondisi mantap} \div \text{total panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$ Sumber: Dinas PUPR (Survey Kondisi Jalan)	83,18%	84,00%	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	Memperbaiki konektivitas dan mendukung mobilitas ekonomi lokal.

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Definisi: Tenaga kerja jasa konstruksi bersertifikat kompetensi. Formula: $(\text{Jumlah tenaga kerja bersertifikat} \div \text{total tenaga kerja terdaftar}) \times 100\%$ Sumber: LPJK, Dinas PUPR (Bidang Jasa Konstruksi)	51,06%	52,00%	53,00%	54,00%	55,00%	56,00%	57,00%	Meningkatkan kualitas SDM konstruksi untuk mutu pembangunan infrastruktur.
10	Persentase pembangunan daerah yang selaras dengan RTRW	%	Definisi: Kegiatan pembangunan yang sesuai RTRW. Formula: $(\text{Jumlah kegiatan pembangunan sesuai RTRW} \div \text{total kegiatan pembangunan}) \times 100\%$ Sumber: Dinas PUPR (Pengendalian Tata Ruang)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Menjamin pembangunan sesuai rencana tata ruang, menjaga kelestarian ruang.
11	Persentase wilayah kecamatan yang telah dilengkapi dengan RDTR	%	Definisi: Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR dibandingkan total kecamatan. Formula: $(\text{Jumlah kecamatan dengan RDTR} \div \text{total})$	5,56%	5,56%	11,11%	16,67%	22,22%	27,78%	33,33%	Meningkatkan jumlah kecamatan yang memiliki dokumen RDTR

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			kecamatan) × 100% Sumber: Dinas PUPR (Data Penataan Ruang)								
12	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah oleh Inspektorat. Referensi: Laporan Sekretariat	81,50	82,50	82,80	83,10	83,40	83,70	84,00	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara menyeluruh dan menunjukkan efektivitas pengelolaan program Dinas PUPR.

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dengan pendekatan berbasis kinerja. Salah satu instrumen penting dalam pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan Renstra ini adalah melalui penetapan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** yang secara langsung mencerminkan capaian terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

IKK berfungsi sebagai alat ukur utama untuk memantau seberapa jauh tujuan dan sasaran strategis telah direalisasikan oleh perangkat daerah, serta sebagai dasar dalam menilai kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam konteks Dinas PUPR, indikator-indikator ini mencakup beragam aspek yang menyentuh sektor strategis, seperti pengelolaan sumber daya air, sistem sanitasi, akses air minum, pembangunan infrastruktur jalan, kepatuhan bangunan gedung, serta pengawasan jasa konstruksi dan pemanfaatan ruang.

Target kinerja yang ditetapkan melalui IKK disusun secara sistematis, terukur, dan realistis berdasarkan **baseline tahun 2024**, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, kebutuhan masyarakat, kondisi eksisting infrastruktur, serta potensi pengembangan di masing-masing wilayah. Seluruh target ini dirancang untuk dicapai secara bertahap hingga tahun 2029, dan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, regional, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam dokumen ini, target IKK juga menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan permukiman yang aman, layak huni, dan berkelanjutan. Beberapa indikator penting mencakup:

- **Perlindungan kawasan permukiman rawan banjir**, sebagai upaya pengurangan risiko bencana berbasis infrastruktur,
- **Cakupan layanan dan kondisi irigasi multikomoditas**, yang mendukung ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian,
- **Akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman**, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan,
- **Kemantapan jalan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi**, sebagai bagian dari peningkatan konektivitas wilayah dan mutu infrastruktur,
- **Kepatuhan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)**, yang berperan penting dalam pengendalian pembangunan dan keselamatan bangunan,
- **Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dan penegakan aturan pemanfaatan ruang**, untuk menjaga ketertiban dan keberlanjutan pembangunan wilayah,
- **Lama waktu layanan penerbitan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)**, sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas pelayanan perizinan.

Pencapaian target IKK ini akan menjadi landasan evaluasi tahunan terhadap kinerja Dinas PUPR serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyesuaian program dan kegiatan pada siklus perencanaan berikutnya. Selain itu, keterbukaan informasi terhadap target ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan mendorong partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan daerah.

Berikut ini disajikan **Tabel Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)** Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, yang memuat definisi operasional, satuan ukur, baseline, serta proyeksi target hingga tahun 2030.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	komulatif	%	95,48	95,5	97	97,5	98	99,5	100	
3.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	positif	%	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	komulatif	%	99,68	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	komulatif	%	38,71	52	53	54	55	56	57	
9.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	komulatif	%	83,18	84	85	86	87	88	89	
10.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	positif	%	0	0	0	0	0	0	0	

BAB V

Penutup

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 merupakan instrumen perencanaan menengah yang bersifat strategis dan operasional, yang disusun untuk memberikan arah dan panduan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Renstra ini mencerminkan visi pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan percepatan pelayanan publik.

Seluruh tujuan dan sasaran dalam dokumen ini dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai tantangan pembangunan daerah, seperti keterbatasan daya dukung infrastruktur, potensi bencana, pertumbuhan kawasan, hingga dinamika kebutuhan dasar masyarakat. Penyusunan Renstra ini mengedepankan pendekatan partisipatif, berbasis data, dan selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, baik RPJMD Kabupaten Mojokerto, RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maupun kebijakan strategis nasional seperti RPJMN.

Secara substansial, Renstra Dinas PUPR tidak hanya memuat arahan kebijakan, namun juga memformulasikan indikator-indikator kinerja yang konkret melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian hasil pembangunan pada setiap aspek urusan. Dengan indikator ini, pencapaian pembangunan akan terukur secara obyektif, mulai dari kualitas jalan dan jembatan, luas layanan irigasi, cakupan air minum dan sanitasi, hingga kepatuhan tata ruang dan bangunan gedung. Setiap indikator disertai dengan baseline dan target tahunan sebagai acuan monitoring dan evaluasi kinerja secara konsisten.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra ini diarahkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang PUPR yang efisien, efektif, dan akuntabel. Kaidah pelaksanaan pembangunan dirumuskan sebagai prinsip kerja utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan penekanan pada hal-hal berikut:

1. **Integrasi Horizontal dan Vertikal:** Seluruh pelaksanaan program akan dikaitkan secara horizontal antar-bidang dalam Dinas, dan secara vertikal dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta perangkat daerah lainnya guna menjamin keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
2. **Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM):** Kaidah pelaksanaan mengacu pada target-target pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah, khususnya pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
3. **Efisiensi dan Optimalisasi Sumber Daya:** Pelaksanaan kegiatan memperhitungkan kapasitas anggaran daerah, sumber daya manusia, dan teknologi yang tersedia. Pengutamaan kegiatan berprioritas tinggi, berdampak luas, dan memiliki kesinambungan antartahun menjadi strategi penting.
4. **Kepatuhan terhadap Regulasi dan Norma Teknis:** Seluruh kegiatan konstruksi dan penataan ruang akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengedepankan prinsip keselamatan, keberlanjutan lingkungan, dan pemanfaatan ruang yang tertib.
5. **Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi Informasi:** Percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan perizinan, pengawasan, perencanaan teknis, serta pelaporan kinerja menjadi bagian penting dari strategi pelaksanaan, untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi Renstra Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto menjadi aspek krusial dalam menjamin bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai arah perencanaan dan capaian target. Proses ini dilakukan secara sistematis, berbasis data, dan melibatkan mekanisme pelaporan kinerja yang terintegrasi dalam sistem manajemen kinerja perangkat daerah.

1. **Monitoring Berkala:** Setiap program dan kegiatan dipantau secara periodik melalui indikator yang telah ditentukan. Pemantauan dilakukan oleh masing-masing bidang teknis, didukung oleh sistem pelaporan yang berbasis aplikasi seperti SIPD dan e-SAKIP.
2. **Evaluasi Kinerja Tahunan dan Tengah Periode:** Evaluasi dilakukan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan terhadap rencana, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta tingkat pencapaian sasaran strategis. Evaluasi tengah periode (midterm review) akan menjadi instrumen korektif bagi pelaksanaan tahun-tahun berikutnya.
3. **Feedback Berkelanjutan:** Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan perbaikan dan penyesuaian rencana. Feedback ini penting untuk menjamin fleksibilitas dan adaptivitas pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam merespon kondisi eksternal yang berubah, seperti bencana alam, pandemi, atau tekanan ekonomi.
4. **Audit Kinerja dan Keterbukaan Informasi:** Pengendalian juga mencakup audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat maupun lembaga eksternal. Transparansi dalam penyampaian hasil capaian kinerja kepada publik menjadi prinsip akuntabilitas yang dijaga sepanjang periode perencanaan.

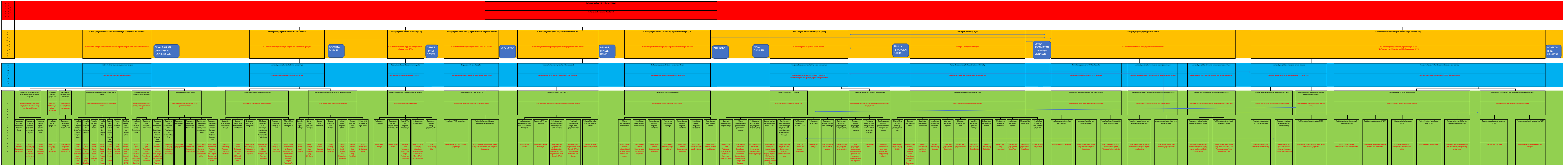
Dengan pendekatan pengendalian dan evaluasi yang menyeluruh tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto berharap pelaksanaan Renstra 2025–2029 akan berlangsung secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi landasan kuat bagi peningkatan kualitas infrastruktur,

pemanfaatan ruang yang tertib, serta pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

LAMPIRAN

1. POHON KINERJA DPUPR KAB. MOJOKERTO

POHON KINERJA



2. CASCADING KINERJA DPUPR KAB. MOJOKERTO

CASCADING KINERJA DINAS PUPR

Kepala PD						Kabid (eselon III)					kasi / JF Penyataan					F pelaksana (staff)				
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Target Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Target Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Target Pokin	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD	Target SIPD
Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	81%	1. Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	Meningkatnya ketersediaan dan kontinuitas suplai air irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	69,00	Terbangunnya infrastruktur irigasi yang fungsional	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan SDA yang terlaksana	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	4,00	Saluran dan bangunan irigasi terpelihara dan berfungsi	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3
																Dokumen evaluasi teknis dan rekomendasi pemanfaatan air	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	2
																Embung dan penampung air berfungsi baik	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	4
																Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten yang mendapatkan Pembinaan dan	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten yang Dibina dan Diberdayakan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	
																Terlaksananya Revitalisasi Penampung Air Alami	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya	Jumlah Penampung Air Alami yang Direvitalisasi	Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	
																Dokumen teknis dan UKL/UPL pembangunan air	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen teknis UKL/UPL yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2
											Terbangunnya dan berfungsi jaringan irigasi permukaan dan tanah	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan irigasi yang terlaksana	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam	11,00	Sumur dan saluran irigasi berfungsi	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah sumur irigasi dibangun	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	
																Jaringan irigasi permukaan meningkat	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,30
																Bendung irigasi ditingkatkan	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	3,00
																Bendung irigasi yang rusak diperbaiki	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	2,00

Kepala PD						Kabid (eselon III)					kasi / JF Penyataaraan					F pelaksana (staff)				
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Target Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Target Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Target Pokin	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD	Target SIPD
			2. Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (SPAM)	97,00%	Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga memperoleh akses air minum	Persentase rumah tangga me	96,50	Tersedianya infrastruktur SPAM yang fungsional dan merata	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem SPAM yang dikembangkan	Jumlah sistem SPAM yang dikembangkan	3,00	Jaringan irigasi beroperasi optimal	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2,80
																Jaringan irigasi yang rusak diperbaiki	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3,00
																Dokumen teknis dan lingkungan irigasi tersedia	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen teknis dan lingkungan disusun	Jumlah Dokumen Rencana Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	
			3. Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	11,00%	Lingkungan bersih dan berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase desa yang memiliki sarana pengelolaan sampah sesuai standar	Persentase desa yang memiliki sarana pengelolaan sampah sesuai standar	11,00	Terbangunnya sarana TPS3R dan TPST	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah yang dibangun dan dikelola	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah yang dibangun dan dikelola	2,00	Terbangunnya SPAM Baru	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	
																Tersusunnya rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	6,00
																Sistem SPAM yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	50,00
																Sambungan rumah yang baru terlayani	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum	100,00
																Tersedianya TPS3R dan fasilitasnya	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPS3R yang dibangun	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1,50
																Peningkatan kompetensi dan peran kelembagaan	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah pelaksana Sistem Pengelolaan Persampahan yang	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang	30,00
			4. Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100,00%	Terjaganya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan SPAL yang layak	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan SPAL yang layak	100,00	Tersedianya layanan SPAL dan IPLT	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit layanan pengolahan air limbah domestik yang dibangun dan beroperasi	Jumlah unit layanan pengolahan air limbah domestik yang dibangun dan beroperasi	3002,00	Tersedianya rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAL Domestik dan Terpusat	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah dokumen tersusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	
																Tersedianya IPLT dan Fasilitasnya		IPLT dibangun beserta fasilitasnya		
																Kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SPAL meningkat	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah	100,00
																Tangki septik individu/komunal, jaringan limbah, pengolahan limbah	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah yang dibangun	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	41,00
																Unit pengolahan limbah individu dan komunal tersedia	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah unit pengolahan setempat dan komunal yang dibangun	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan	20,00

Kepala PD						Kabid (eselon III)					kasi / JF Penyataan					F pelaksana (staff)							
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Target Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Target Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Target Pokin	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD	Target SIPD			
			5. Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir di perkotaan dan lingkungan	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase denan	22,00%	Berkurangnya genangan dan banjir di kawasan permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan dengan sistem drainase yang berfungsi baik	Persentase kawasan dengan sistem drainase yang berfungsi baik	22,00	Terbangunnya sistem drainase kawasan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	3002,00	Dokumen perencanaan teknis drainase tersedia	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Sistem Drainase yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	7,00			
																	Sistem drainase lingkungan dalam kondisi terpelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	301,00		
																	Saluran drainase lingkungan ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	3,00		
																	Terbangunnya sistem drainase lingkungan	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah sistem drainase lingkungan yang dibangun	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	701,00		
																	Masyarakat mendapatkan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan			
																	Sistem Drainase perkotaan rusak yang diperbaiki	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	2,00		
																	Sistem drainase perkotaan ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2,00		
																	Sistem drainase baru di kawasan perkotaan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2,00		
			6. Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio Bangunan Gedung kondisi baik dan laik fungsi	12%	Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1. Persentase bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF	1. Persentase bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF	12,00	Terpenuhiya PBG dan SLF bangunan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah bangunan yang memperoleh IMB dan SLF	Jumlah bangunan yang memperoleh IMB dan SLF	Jumlah bangunan yang memperoleh IMB dan SLF	Jumlah bangunan yang memperoleh IMB dan SLF	300,00	Dokumen perencanaan teknis bangunan strategis	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Rencana Teknis Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	
																		Dokumen pelaksanaan teknis pembangunan dan pembongkaran	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis		
																		Bantuan Teknis pembangunan bangunan gedung daerah	Jumlah laporan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung daerah	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis		
																		Terlaksananya pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya		
																		Dokumen legalisasi dan data bangunan melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim	Jumlah Penerbitan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim		
																		Terlaksananya pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah		Jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah deret yang telah dilakukan pemeriksaan kelaikan			
																		Terlaksananya pelayanan SLF, PBG, dan TABG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan	Jumlah Tim Terbentuk dan tercurupi operasionalnya	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan		
															Terbangunnya gedung daerah	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Gedung terbangun	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah					

Kepala PD						Kabid (eselon III)					kasi / JF Penyataan					F pelaksana (staff)				
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Target Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Target Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Target Pokin	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD	Target SIPD
						Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2. Penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan	2. Penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan	100,00	Penataan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	51,00	Terlaksananya kepatuhan kelaikan fungsi rumah tinggal		jumlah rumah tinggal yang ber sertifikat laik fungsi		
																Terlaksananya penilikan thd penyelenggaraan bangunan gedung		jumlah penilikan thd penyelenggaraan bangunan gedung		
																Meningkatnya kapasitas penyelenggara bangunan dan	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Jumlah Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan	
																Tersedianya rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem penataan bangunan	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen disusun	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah	
						7. Meningkatnya kemantapan jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan jalan mantap terhadap total jalan	Persentase peningkatan jalan mantap terhadap total	85,00	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap meningkat	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			57,00	Terselenggaranya monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	jumlah bulan operasional tim survey lokasi sempadan jalan / pengajuan yang dibiayai	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	
																Dokumen teknis dan data pendukung	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen teknis yang Dikelola	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	
																Dokumen perencanaan jalan tersedia	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	
																Data kondisi jalan/jembatan terkini tersedia	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Data Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	
																Jembatan yang berfungsi optimal sesuai lebar standar	Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Panjang jembatan yang dilebarkan	
																Jalan dalam kondisi baik terpelihara	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	
																Jalan dalam kondisi baik dan aman	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	
																Jalan dalam kondisi layak pakai dan berfungsi	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	
																Jembatan dalam kondisi baik dan berfungsi	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	
																Jalan baru yang layak sesuai standar teknis	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	
																Jembatan dalam kondisi baik terpelihara	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	

Kepala PD						Kabid (eselon III)					kasi / JF Penyataan					F pelaksana (staff)															
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Target Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Target Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Target Pokin	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD	Target SIPD											
			8. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	53,00%	Meningkatnya profesionalitas SDM jasa konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi bersertifikat	Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi bersertifikat	53,00	Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi yang dilaksanakan	Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi yang dilaksanakan		Jalan sesuai lebar standar teknis	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar												
							Jembatan baru yang dibangun sesuai kebutuhan jaringan	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun		Panjang jembatan yang dibangun																				
							Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah tenaga terampil bersertifikat		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi																				
						Meningkatnya ketersediaan informasi dan layanan jasa konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan layanan dan sistem informasi jasa konstruksi yang tersedia	Persentase peningkatan layanan dan sistem informasi jasa konstruksi			Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang diselenggarakan	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang diselenggarakan	Lembaga jasa konstruksi yang dibina dan diperkuat	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan diperkuat	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya												
																	Tenaga kerja konstruksi yang dilatih sesuai standar	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi sesuai standar kompetensi yang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih											
																	Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi cakupan	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang											
																	Layanan informasi jasa konstruksi yang aktif dan digunakan	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan											
						Meningkatnya kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase lembaga dan pelaku jasa konstruksi yang patuh terhadap regulasi	Persentase lembaga dan pelaku jasa konstruksi yang patuh terhadap regulasi		Terseleenggaranya pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan pengawasan dan evaluasi jasa konstruksi yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pengawasan dan evaluasi jasa konstruksi yang dilaksanakan	Terlaksananya evaluasi terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan													
				Terlaksananya pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi										Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk															
			9. Meningkatnya kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang	IK 1: Persentase pembangunan daerah yang selaras dengan RTRW	100,00%										Meningkatnya kepatuhan pembangunan terhadap tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW dan RDTR	Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW dan RDTR		Terseleenggaranya pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi penataan ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				
																									Terlaksananya penilaian terhadap pelaksanaan	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan			
							Tersedianya Forum Penataan Ruang	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																					
						IK 2 : Prosentase wilayah kecamatan yang telah dilengkapi	11	Terwujudnya kepastian hukum dan arah pembangunan sesuai tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase wilayah kecamatan yang memiliki RDTR yang telah ditetapkan	Persentase wilayah kecamatan yang memiliki RDTR yang telah ditetapkan		Terseleenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										Persentase ITR, KRK yang diberikan sesuai ketentuan waktu	Persentase ITR, KRK yang diberikan sesuai ketentuan waktu	Terlaksananya pelayanan ITR, KRK dan KKPR sesuai	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan ITR, KRK dan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		
																											Terbitnya regulasi dan dokumen legal terkait penataan ruang	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	
																											Terbitnya persetujuan substansi RDTR	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	
																											Terlaksananya fasilitasi penetapan RDTR	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	
							Terbitnya Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota																					

Kepala PD						Kabid (eselon III)					kasi / JF Penyataan					F pelaksana (staff)					
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Target Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Target Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Target Pokin	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD	Target SIPD	
									Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			Jumlah koordinasi perencanaan tata ruang yang dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan tata ruang Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi perencanaan tata ruang yang dilaksanakan			Tersosialisasikannya kebijakan dan peraturan bidang penataan ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	
													Tersedianya peta dasar untuk penyusunan RDTR				Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar		
													Tersusunnya materi teknis dan ranperkada RDTR				Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota		

3. LAIN - LAIN